

**PERANAN Mr. ASSAAT DALAM MEMPERTAHANKAN
KEMERDEKAAN INDONESIA (1946-1951)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta untuk
Memenuhi Sebagian Persyaratan
guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan



Oleh:
Desmira Feri Susanti
11406241041

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2015**

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “Peranan Mr. Assaat dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia (1946-1951)” ini disetujui oleh pembimbing untuk diujikan.



Yogyakarta, 8 April 2015

Pembimbing

Zulkarnain, M. Pd

NIP. 19740809 200812 1 001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Peranan Mr. Assaat dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia (1946-1951)” ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 17 April 2015 dan telah dinyatakan lulus.

DEWAN PENGUJI			
Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
Rhoma Dwi A. Yuliantri, M. Pd	Ketua Penguji		21/4 2015
Zulkarnain, M. Pd	Sekretaris Penguji		21/4 2015
Dr. Aman, M. Pd	Penguji Utama		20/4 2015

Yogyakarta, 23 April 2015

Dekan FIS

Universitas Negeri Yogyakarta



Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M. Ag

NIP. 19620321 198903 1 001

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya

Nama : Desmira Feri Susanti

NIM : 11406241041

Jurusan : Pendidikan Sejarah

Judul Skripsi : Peranan Mr. Assaat dalam Mempertahankan Kemerdekaan
Indonesia (1946-1951)

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil pekerjaan saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain atau telah digunakan sebagai persyaratan penyelesaian studi di Perguruan Tinggi lain, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang saya ambil sebagai acuan dengan mengikuti kaidah ilmiah yang lazim.

Apabila ternyata pernyataan ini terbukti tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, 8 April 2015

Yang menyatakan,

Desmira Feri Susanti
NIM. 11406241041

PERSEMBAHAN

Atas izin Allah SWT, dengan sepenuh cinta, kupersembahkan karya sederhana ini
untuk kedua orang tua, yang aku cintai lebih dari kata-kata apapun....

BAPAK MUSTOFA

DAN

IBU NGATMIYANI

Kubingkiskan karya ini untuk Mas Dani, Mbak Pi, dan Adek
Untuk teman-teman Pendidikan Sejarah R 2011, izinkan karya ini menjadi bagian
dari kita

Juga untuk kalian, umat manusia yang mencintai sejarah

MOTTO

Gantungkan cita-citamu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit! Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh diantara bintang-bintang.

~ Ir. Soekarno ~

Stay hungry, stay foolish.

~ Steve Jobs ~

Usaha tanpa doa itu sombong. Doa tanpa usaha itu omong kosong.

~ Anonim ~

Manusia memang tempatnya salah. Tapi, jangan buat kesalahanmu terasa lebih buruk ketika kamu tidak belajar sesuatu darinya.

~ Penulis ~

PERANAN Mr. ASSAAT DALAM MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN INDONESIA (1946-1951)

Oleh:
Desmira Feri Susanti
11406241041

ABSTRAK

Mr. Assaat adalah salah satu tokoh pejuang Republik Indonesia masa kemerdekaan. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimana latar belakang kehidupan Mr. Assaat, (2) untuk mengetahui peranan Mr. Assaat sebagai Ketua BPKNIP tahun 1946-1949, dan (3) untuk mengetahui peranan Mr. Assaat sebagai Pemangku Jabatan Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri tahun 1949-1951.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah menurut Kuntowijoyo. Langkah-langkahnya yaitu, (1) penentuan topik penelitian, (2) heuristik atau pengumpulan sumber maupun data yang relevan dengan topik penelitian, (3) verifikasi atau kritik sumber (4) interpretasi atau menafsirkan data-data yang ada dalam sumber, (5) historiografi atau penulisan hasil penelitian.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Mr. Assaat adalah salah satu tokoh pejuang bangsa Indonesia yang berasal dari Minangkabau di Sumatera Barat. (2) Mr. Assaat ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia bersama tokoh-tokoh lainnya melalui badan legislatif Indonesia saat itu, yaitu KNIP dan Badan Pekerjaannya. Beliau terpilih sebagai ketuanya pada tahun 1946 dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi negara Indonesia yang baru saja merdeka, seperti pemberontakan dalam negeri maupun permasalahan dengan Belanda. (3) Saat Indonesia berubah menjadi negara federal setelah persetujuan KMB tahun 1949, Mr. Assaat dilantik sebagai Pemangku Jabatan Presiden Republik Indonesia sebagai salah satu negara bagian Republik Indonesia Serikat. Peranannya adalah mengisi kekosongan pemerintah Republik Indonesia, pencetus ide membangun Masjid Syuhada sebagai simbol perjuangan rakyat Yogyakarta dan salah satu tokoh yang berjuang mengembalikan bentuk negara Indonesia menjadi kesatuan. Setelah jabatannya dilepaskan, Mr. Assaat menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Kabinet Natsir tahun 1950-1951 dan menyelesaikan beberapa masalah dalam negeri seperti di Aceh dan Sumatera Tengah.

Kata kunci: *Mr. Assaat, BPKNIP, Pemangku Jabatan Presiden, Menteri Dalam Negeri, 1946-1951.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Peranan Mr. Assaat dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia (1946-1951)” ini tepat pada waktunya. Tugas akhir ini ditulis sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada,

1. Allah SWT yang telah memberikan segala yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan tugas akhir ini, baik itu kesempatan, kesehatan, rizki, dan masih banyak lagi.
2. Prof. Dr. Rochmat Wahab selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial.
4. M. Nur Rokhman, M. Pd, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial.
5. Dr. Dyah Kumalasari, M. Pd, selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis. Terimakasih atas segala bimbingannya selama penulis kuliah.
6. Zulkarnain, M. Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih atas segala kemudahan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis.

7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Sejarah. Terimakasih atas segala ilmu dan bimbingan selama kuliah yang sangat bermanfaat bagi penulis.
8. Bapak dan Ibu Staff Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial, Perpustakaan dan Laboratorium Sejarah, Perpustakaan *St. Ignatius*, Perpustakaan *Jogja Library Center*. Terimakasih telah memudahkan penulis dalam mendapatkan buku-buku yang penulis butuhkan.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Mustofa dan Ibu Ngatmiyani yang tak henti-hentinya mencurahkan segala cinta, kasih sayang, restu, ridho, doa, dan materi selama penulis kuliah sampai menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Kedua kakak penulis, Mas Dani dan Mbak Pi. Terimakasih telah menjadi kakak yang baik untuk saya, meski dengan cara kalian sendiri yang kadang tak saya mengerti. Juga adik saya, Adek, terimakasih telah menunjukkan kepada Mbakmu, bahwa waktu terus berjalan, dan segalanya akan berubah.
11. Keluarga Besar Pendidikan Sejarah Reguler 2011. Terimakasih atas segala kenangan yang telah kita lalui bersama. Betapa kalian adalah satu dari sekian anugerah indah dalam hidup saya. Kita untuk selamanya, Kawan.
12. Sahabat-sahabat terbaik yang pernah saya punya. Teman-teman Pendidikan Sejarah R 2011, teman-teman KKN 253, teman-teman kos Merpati, kos Bu Tinah, dan Jilly.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis selama ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kebaikan tugas akhir ini di masa depan. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Penulis

Desmira Feri Susanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSsETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR ISTILAH	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Historiografi yang Relevan	12
G. Metode Penelitian	13
H. Pendekatan Penelitian	21
I. Sistematika Pembahasan	24

BAB II. LATAR BELAKANG KEHIDUPAN Mr. ASSAAT

A. Latar Belakang Keluarga.....	26
B. Latar Belakang Pendidikan	28
C. Latar Belakang Organisasi	30
1. <i>Jong Sumatranen Bond</i>	33
2. Indonesia Muda	34
3. Partai Indonesia	37

BAB III. PERANAN Mr. ASSAAT SEBAGAI KETUA BPKNIP TAHUN

1946-1949

A. Pembentukan KNIP.....	42
B. KNIP Berubah Menjadi Badan Legislatif.....	45
C. Mr. Assaat sebagai Ketua BPKNIP	52
1. Resolusi BPKNIP	52
2. Permasalahan yang Dihadapi Pemerintah Indonesia	55
3. Diasingkan ke Bangka	59
4. KMB (Konferensi Meja Bundar)	63

BAB IV. PERANAN Mr. ASSAAT SEBAGAI PEMANGKU JABATAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI DALAM NEGERI

TAHUN 1949-1951

A. Dampak KMB bagi Indonesia	67
B. Mr. Assaat sebagai Pemangku Jabatan Presiden Republik Indonesia	69
1. Pelantikan Mr. Assaat sebagai Pemangku Jabatan Presiden Republik Indonesia	69

2. Pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia	73
3. Pembangunan Masjid Syuhada	77
C. Kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia	78
D. Mr. Assaat sebagai Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Natsir	83
BAB V. KESIMPULAN	91
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	101

DAFTAR SINGKATAN

AMS	: <i>Algemeene Middelbare School</i>
BPKNIP	: Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
Dt	: Datuk
KMB	: Konferensi Meja Bundar
KNIP	: Komite Nasional Indonesia Pusat
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
Mr	: <i>Meester in de Rechten</i>
MULO	: <i>Meer Uitgebreid Lager Onderwijs</i>
NICA	: <i>Nederlandsch Indie Civil Administratie</i>
Partindo	: Partai Indonesia
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PNI	: Partai Nasional Indonesia
PPKI	: Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
RI	: Republik Indonesia
RIS	: Republik Indonesia Serikat
STOVIA	: <i>School tot Opleiding van Inlandsche Artsen</i>
UUD	: Undang-Undang Dasar

DAFTAR ISTILAH

Advokat	: Pengacara
Belasting	: Pajak/bea cukai
Demarkasi	: Batas pemisah
Diplomasi	: Hubungan resmi antar negara
Eksekutif	: Kekuasaan menjalankan undang-undang
Fusi	: Penggabungan
Kedaulatan	: Kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara
Konferensi	: Rapat/perundingan
Legislatif	: Kekuasaan membuat undang-undang
Liberal	: Bersifat bebas
Mediator	: Perantara
Prestise	: Wibawa
Pribumi	: Penghuni asli
Ratifikasi	: Pengesahan
Serikat	: Perkumpulan
Yudikatif	: Kekuasaan mengawasi jalannya undang-undang

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto Mr. Assaat	101
Lampiran 2. Penetapan PPKI dalam Pembentukan KNIP	102
Lampiran 3. Peraturan Presiden No. 6 Tahun 1946 Tentang Penyempurnaan Susunan KNIP	105
Lampiran 4. Wilayah Republik Indonesia berdasarkan Persetujuan Renville.	115
Lampiran 5. Undang-Undang Tentang Mengadakan Peraturan-Peraturan Istimewa Sidang ke-VI Komite Nasional Pusat.....	116
Lampiran 6. Pemberitahuan Presiden kepada Ketua BPKNIP	117
Lampiran 7. Undang-Undang No. 7 Tahun 1949 tentang Penunjukan Pemangku Sementara Jabatan Presiden Republik Indonesia	118
Lampiran 8. Keputusan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat	119
Lampiran 9. Foto pelantikan Mr. Assaat sebagai Pemangku Sementara Jabatan Presiden Republik Indonesia	120
Lampiran 10. Foto pelantikan Dr. Halim sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia	121
Lampiran 11. Foto Menteri-Menteri dalam Kabinet Natsir	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mr. Assaat adalah salah seorang tokoh pejuang pada masa kemerdekaan Indonesia. Pada masa awal pembentukan pemerintahan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Mr. Assaat menjabat sebagai Ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau yang disingkat sebagai BPKNIP. BPKNIP pada saat itu merupakan lembaga legislatif yang dibentuk sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat¹ dan Dewan Perwakilan Rakyat² dibentuk menurut Undang-Undang.

Awal mulanya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau (PPKI)³ membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai badan eksekutif yang akan menggantikan PPKI. Tidak lama setelah KNIP terbentuk, muncul gagasan dari golongan pemuda dalam lembaga tersebut untuk mengubah KNIP menjadi badan legislatif. KNIP kemudian diubah menjadi badan legislatif setelah dikeluarkannya Maklumat Negara RI No.

¹ Selanjutnya akan ditulis MPR.

² Selanjutnya akan ditulis DPR.

³ PPKI adalah sebuah panitia yang dibentuk untuk menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kemerdekaan Indonesia. Panitia ini dibentuk oleh Jenderal Terauchi dan diketuai oleh Ir. Soekarno dan wakilnya Mohammad Hatta. Selengkapnya lihat: A. G. Pringgodigdo. *Perubahan Kabinet Presidensiil Mendjadi Kabinet Parlementer*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1969, hlm. 13-14.

X yang berisi pemberian kekuasaan legislatif kepada KNIP sebelum MPR dan DPR terbentuk.⁴

Maklumat ini juga berisi tentang persetujuan pembentukan sebuah badan pekerja yang dipilih dari anggota dan bertanggung jawab kepada KNIP. BPKNIP kemudian dibentuk dengan beranggotakan 15 orang dari anggota KNIP. Tugas BPKNIP adalah untuk melaksanakan tugas sehari-hari KNIP. Tugas tersebut diantaranya membuat dan mengusulkan undang-undang dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara bersama-sama dengan presiden.⁵

Mr. Assaat terpilih sebagai Ketua BPKNIP berturut-turut dari tahun 1946 sampai tahun 1949. Pada masa pimpinan Mr. Assaat, BPKNIP menghasilkan beberapa keputusan, diantaranya adalah dua resolusi BPKNIP seperti tercantum dalam pengumuman Badan Pekerja No. 23. Resolusi pertama mengenai sikap penentuan nasib dan pemerintahan sendiri berdasarkan demokrasi.⁶ Resolusi kedua mengenai usul kepada pemerintah untuk mengadakan perbaikan dalam susunan pemerintah maupun KNIP.⁷

⁴ Maklumat Negara Republik Indonesia No. X, selengkapnya lihat *Ibid*, hlm. 28.

⁵ Assaat. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia dalam Masa Peralihan*. Yogyakarta: Badan Penerbit Nasional, 1947, hlm. 12.

⁶ Soebadio Sastrosatomo. *Perjuangan Revolusi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987, hlm. 229.

⁷ *Ibid*.

BPKNIP pada saat itu merupakan lembaga legislatif yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan Indonesia. Mr. Assaat sebagai ketuanya tentu memiliki peran penting dalam setiap kebijakan yang diambil oleh KNIP maupun badan pekerjaanya. Banyak permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dan berusaha diatasi melalui sidang-sidang KNIP maupun badan pekerjaanya.

Setelah proklamasi kemerdekaan dan pembentukan aparatur negara, perjuangan bangsa Indonesia belum selesai. Kedatangan tentara Sekutu ke Indonesia yang bertugas melucuti senjata Jepang akibat kalah dalam Perang Dunia II ternyata diboncengi oleh tentara NICA.⁸ Belanda rupanya masih ingin menguasai Indonesia. Berbagai pertempuran fisik antara tentara Belanda dan bangsa Indonesia tidak dapat dihindarkan. Perjuangan diplomasi melalui perundingan-perundingan juga dilakukan disamping melalui pertempuran fisik.

Salah satu perundingan yang paling berpengaruh adalah Konferensi Meja Bundar (KMB) yang mengubah peta geopolitik Indonesia sebagai negara kesatuan. KMB berlangsung mulai tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda.⁹ Hasil utama

⁸ NICA atau *Nederlandsch Indie Civil Administratie* adalah unsur pemerintahan sipil sementara Belanda di Indonesia dibawah pimpinan Van Mook. Tugasnya adalah memulihkan kembali kekuasaan Hindia-Belanda di Indonesia. Selengkapnya lihat: Amrin Imran, dkk. *Indonesia dalam Arus Sejarah* 6. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2012, hlm. 199.

⁹ Ginandjar Kartasasmita, dkk. *30 Tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta: Sekretariat Negara, 1995, hlm. 273.

dari perundingan ini adalah Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949.¹⁰

Salah satu dampak yang paling besar dari hasil KMB ini adalah bentuk negara Indonesia yang berubah dari negara kesatuan menjadi negara federal. Dampak dari KMB ini mendapat tentangan dari berbagai pihak yang tidak menyetujui bentuk negara federal. Sidang pleno KNIP pimpinan Mr. Assaat yang membahas mengenai masalah ini berjalan alot, akan tetapi akhirnya sidang dapat menerima hasil-hasil KMB.

Negara federal hasil KMB tersebut diberi nama Republik Indonesia Serikat/RIS dengan Soekarno sebagai presidennya dan Mohammad Hatta sebagai Perdana Menterinya.¹¹ RIS beranggotakan negara-negara bagian yang beberapa diantaranya merupakan negara boneka bentukan Belanda, yaitu Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan dan lain-lain.¹² Republik Indonesia sendiri hanya menjadi negara bagian dalam RIS tersebut.

Sejak para pejabat pemerintah Indonesia diangkat sebagai pejabat RIS, terjadi kekosongan kekuasaan pemerintah negara bagian Republik Indonesia. Presiden Soekarno kemudian melantik ketua BPKNIP Mr.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Ginandjar Kartasasmita, dkk. *30 Tahun Indonesia Merdeka (1945-1955)*. Jakarta: Sekretariat Negara, 1995, hlm. 283.

¹² Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993, hlm. 205.

Assaat sebagai Pemangku Jabatan Presiden Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta.¹³ Peranan Mr. Assaat selama menjabat sebagai Pemangku Jabatan Presiden Republik Indonesia menjadi penting untuk dikaji. Ketika jabatan itu tidak diisi, maka akan terjadi kekosongan pemerintahan. Sebuah negara yang tidak mempunyai pemerintahan yang berdaulat akan sangat rentan terhadap intervensi negara lain.

Mr. Assaat juga salah satu tokoh yang memperjuangkan kembalinya bentuk negara Indonesia ke negara kesatuan. Melalui program yang dijalankan oleh kabinetnya, pemerintah Republik Indonesia berusaha mengembalikan bentuk negara Indonesia yang sesuai dengan jiwa proklamasi dan UUD 1945. Bentuk negara federal bukanlah bentuk negara yang diinginkan oleh bangsa Indonesia.

Mr. Assaat adalah tokoh yang dikenal sederhana. Ketika menjadi ketua BPKNIP, Mr. Assaat dari rumah ke kantornya sehari-hari, kadang-kadang berjalan kaki atau bersepeda.¹⁴ Ketika menjadi Pemangku Jabatan Presiden, beliau tidak ingin dipanggil “Yang Mulia”, melainkan “Bung Presiden”. Ketika negara-negara bagian meleburkan diri kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950, jabatan Mr. Assaat sebagai Pemangku Jabatan Presiden juga dilepaskan. Karir Mr. Assaat

¹³ Amrin Imran, dkk, *op.cit.*, hlm. 550.

¹⁴ Marthias Duski Pandoe. “Mr. Assaat Presiden RI ke-3”. Dalam Julius Pour (Ed). *Jernih Melihat Cermat Mencatat (Antologi Karya Jurnalistik Wartawan Senior Kompas)*. Jakarta: Kompas, 2000, hlm 58.

kemudian beralih ke lembaga legislatif yaitu DPR. Beliau kemudian menjabat di dalam kabinet Natsir sebagai Menteri Dalam Negeri.¹⁵

Penulis memilih rentang waktu mulai tahun 1946-1951. Alasannya, tahun 1946 Mr. Assaat terpilih sebagai ketua KNIP dengan badan pekerjaanya. Tahun 1951 dipilih karena pada tahun tersebut, setelah Mr. Assaat melepaskan jabatannya sebagai Pemangku Jabatan Presiden Republik Indonesia beliau bergabung dalam Kabinet Natsir sebagai Menteri Dalam Negeri sampai tahun 1951.

Kajian mengenai peranan Mr. Assaat ini penting untuk diteliti. Tulisan mengenai peranan Mr. Assaat belum banyak dikaji. Peranan Mr. Assaat sendiri pada masa kemerdekaan sangat penting. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua BPKNIP yang merupakan lembaga legislatif Indonesia saat itu dan pernah pula memangku Jabatan Presiden Republik Indonesia pada masa Republik Indonesia Serikat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari tulisan yang berjudul “Peranan Mr. Assaat dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 1946-1951”, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana latar belakang kehidupan Mr. Assaat?

¹⁵Kahin, Audrey. “Rebellion to Integration, West Sumatera and the Indonesian Polity 1926-1998.” a.b. Azmi dan Zulfahmi. *Dari Pemberontakan ke Integrasi, Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008, hlm. 262.

2. Bagaimana peranan Mr. Assaat sebagai Ketua BPKNIP tahun 1946-1949?
3. Bagaimana peranan Mr. Assaat sebagai Pemangku Jabatan Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri tahun 1949-1951?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum
 - a. Meningkatkan kemampuan berfikir kritis, analitis, sistematis, dan objektif sesuai dengan metodologi penelitian sejarah.
 - b. Mengaplikasikan metode penelitian sejarah dalam menyusun karya sejarah.
 - c. Memperoleh gelar sarjana pendidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta.
 - d. Memperkaya karya-karya sejarah, khususnya sejarah kemerdekaan Indonesia.
2. Tujuan Khusus
 - a. Mengetahui latar belakang kehidupan Mr. Assaat.
 - b. Mengetahui peranan Mr. Assaat sebagai Ketua BPKNIP tahun 1946-1949.
 - c. Mengetahui peranan Mr. Assaat sebagai Pemangku Jabatan Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri tahun 1949-1951.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pembaca

- a. Memperoleh pengetahuan mengenai sosok tokoh dan latar belakang kehidupan Mr. Assaat.
- b. Memperoleh pengetahuan mengenai peranan Mr. Assaat sebagai Ketua BPKNIP tahun 1946-1949.
- c. Memperoleh pengetahuan mengenai peranan Mr. Assaat sebagai Pemangku Jabatan Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri tahun 1949-1951.

2. Bagi Penulis

- a. Sebagai tolok ukur kemampuan penulis dalam menerapkan metode penelitian sejarah.
- b. Sebagai upaya untuk melatih kemampuan berfikir kritis, analitis, sistematis, dan objektif sesuai dengan metodologi penelitian sejarah.
- c. Menambah wawasan mengenai kondisi politik Indonesia pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945.
- d. Memperoleh gelar sarjana pendidikan Jurusan Sejarah FIS UNY.

E. Kajian Pustaka

Pustaka sangat diperlukan dalam penulisan sebuah karya ilmiah, terutama sejarah. Kajian pustaka diperlukan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber terkait masalah yang akan dikaji. Kajian Pustaka

merupakan telaah terhadap pustaka atau literatur yang menjadi landasan pemikiran dalam penelitian.¹⁶

Mr. Assaat adalah salah satu tokoh pejuang Indonesia yang berasal dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat.¹⁷ Beliau mendapat gelar Mr (*meester in de rechten*) atau sarjana hukum setelah menamatkan studi di Belanda.¹⁸ Pembahasan mengenai latar belakang kehidupan Mr. Assaat, mulai dari latar belakang keluarga, pendidikan, maupun organisasinya setelah terjun ke dunia politik, menggunakan ulasan dalam buku *Ensiklopedi Nasional Indonesia* yang diterbitkan oleh Cipta Adi Pustaka tahun 1988. Dalam ulasan tersebut, dibahas mengenai biografi Mr. Assaat. Penulis juga menggunakan buku dari Yayasan Gedung-gedung Bersejarah Jakarta yang berjudul *45 Tahun Sumpah Pemuda dan Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sumatera Barat* yang ditulis oleh Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk membahas mengenai berbagai organisasi yang diikuti oleh Mr. Assaat pada masa pergerakan nasional Indonesia.

Peranan Mr. Assaat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yaitu saat menjabat sebagai ketua BPKNIP dan Pemangku Jabatan Presiden Republik Indonesia. Mr. Assaat memegang jabatan sebagai ketua

¹⁶ Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi Program Studi Pendidikan Sejarah FIS UNY*. Yogyakarta: Prodi Pendidikan Sejarah, 2013, hlm. 3.

¹⁷ Marthias Duski Pandoe, *op.cit.*, hlm. 58.

¹⁸ *Ibid.*

BPKNIP menggantikan Moh. Natsir yang diangkat sebagai menteri penerangan. Mr. Assaat memegang jabatan tersebut sampai tahun 1949 setelah ditunjuk sebagai Pemangku Jabatan Presiden RI masa RIS.

Salah satu dampak dari Konferensi Meja Bundar adalah berubahnya bentuk negara Indonesia dari kesatuan menjadi federal dengan nama Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949. Soekarno terpilih menjadi Presiden RIS dengan Mohammad Hatta sebagai Perdana Menterinya. Republik Indonesia adalah salah satu negara bagian RIS dengan Pemangku Jabatan presidennya Mr. Assaat. Sejak saat itu, jabatan ketua BPKNIP Mr. Assaat berakhir.

Peranan Mr. Assaat saat menjabat sebagai ketua BPKNIP ini dibahas dalam buku karya Soebadio Sastrosatomo yang berjudul *Perjuangan Revolusi*. Buku ini membahas antara lain mengenai proses berdirinya KNIP pada tahun 1945 hingga peranan KNIP dalam perpolitikan Indonesia. Penulis juga menggunakan artikel-artikel dalam surat kabar *Merdeka* dan *Kedaulatan Rakyat* yang terbit pada tahun 1949-1950. Artikel-artikel tersebut juga digunakan untuk membahas peranan Mr. Assaat sebagai Pemangku Jabatan presiden RI masa RIS. Hal ini dikarenakan penulis belum menemukan buku yang secara khusus membahas peranan Mr. Assaat sebagai Pemangku Jabatan Presiden RI.

Tahun 1950, setelah RIS kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, jabatan Mr. Assaat sebagai Pemangku Jabatan Presiden Republik Indonesia dilepaskan. Mr. Assaat kemudian bergabung

dalam anggota legistalif. Pada masa kabinet Natsir, beliau menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri hingga tahun 1951, kemudian kembali menjadi anggota legislatif.

Penulis menggunakan buku karya Audrey Kahin yang berjudul *Rebellion to Integration, West Sumatra and the Indonesian Polity 1926-1998*. Buku ini telah diterjemahkan oleh Drs. Azmi, MA, Ph.D dan Drs. Zulfahmi, Dipl. I.I dengan judul *Dari Pemberontakan ke Integrasi, Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998* yang diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia tahun 2008. Buku ini membahas mengenai dinamika politik di Sumatera Barat mulai dari akhir pemerintahan kolonial hingga Reformasi. Penulis hanya menggunakan satu bab dalam buku tersebut. Bab tersebut membahas mengenai peranan Mr. Assaat ketika menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Natsir.

Penulis juga menggunakan buku karya Marthias Dusky Pandoe yang berjudul *Jernih Melihat, Cermat Mencatat: Antologi Karya Jurnalistik Wartawan Senior Kompas* yang diterbitkan oleh Kompas tahun 2010. Buku ini merupakan kumpulan tulisan dengan berbagai tema dari Marthias Dusky Pandoe, seorang wartawan senior Kompas. Mr. Assaat secara khusus dibahas dalam satu artikel yang berjudul “Mr. Assaat, Presiden ke 3 RI”. Artikel tersebut juga membahas mengenai karir Mr. Assaat setelah melepaskan jabatan presidennya.

F. Historiografi yang Relevan

Historiografi adalah suatu sintesis dari seluruh hasil penelitian atau penemuan dalam suatu penulisan utuh.¹⁹ Pada tahap ini, penulis perlu mengerahkan seluruh daya pikirannya, keterampilan teknis penggunaan kutipan dan catatan, serta penggunaan pikiran-pikiran kritis dan analisisnya.²⁰ Sebuah penulisan historis memerlukan adanya historiografi yang relevan.

Historiografi yang relevan yaitu sebuah tulisan historis yang mempunyai topik yang sama. Hal ini berguna sebagai pembanding, pembeda maupun pelengkap untuk penulisan yang akan dibuat. Penulis telah menemukan historiografi yang relevan dengan judul yang penulis pilih.

Historiografi yang relevan tersebut adalah skripsi karya Indra Wijaya Kusuma yang berjudul “Peranan Komite Nasional Indonesia Pusat dalam Pemerintahan RI di Masa Revolusi (1945-1949)” dari Jurusan Ilmu Sejarah, FIS, UNY, tahun 2009. Skripsi ini membahas mengenai proses pembentukan KNIP pada tahun 1945. Dibahas pula mengenai kinerja KNIP pada masa revolusi Indonesia tahun 1945-1949 serta peranannya dalam pemerintahan pada kurun waktu tersebut.

¹⁹ Helius Sjamsuddin. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2012, hlm. 121.

²⁰ *Ibid.*

Skripsi tersebut memiliki kaitan dengan skripsi yang akan penulis buat. Persamaan dengan skripsi yang akan penulis buat adalah pembahasan mengenai KNIP. Perbedaannya, skripsi yang akan penulis buat mengkonsentrasikan pokok bahasan pada peranan Mr. Assaat selama menjabat sebagai ketua BPKNIP, Pemangku Jabatan Presiden Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri sementara skripsi yang ditulis oleh Indra tersebut membahas peranan KNIP dalam pemerintahan secara keseluruhan.

G. Metode Penelitian

Sejarah disebut sebagai ilmu karena untuk memperolehnya diperlukan metode tersendiri. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yakni *methodos* yang artinya cara atau jalan.²¹ Metode berkaitan dengan cara kerja/prosedur untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Metode ilmiah penting dalam menerangkan sejumlah pengetahuan secara sistematis sebagai sebuah ilmu.

Metode dalam studi sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis dalam mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara sistematis, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesis secara tertulis.²² Metode penelitian sejarah yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari

²¹ Abd Rahman Hamid, Muhammad Saleh Majid. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2011, hlm. 40.

²²*Ibid.*, hlm. 42.

lima tahap yang dikemukakan oleh Kuntowijo. Tahapan dalam penelitian sejarah adalah pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi.²³

1. Pemilihan Topik

Pemilihan topik merupakan langkah pertama dalam sebuah penelitian sejarah. Sejarah yang mempunyai dimensi waktu yang sangat panjang tentunya memiliki berbagai peristiwa yang bisa dikaji sebagai sebuah penelitian. Topik yang baik seharusnya mempunyai dimensi waktu dan ruang yang tidak terlalu luas sehingga kajian menjadi lebih mendalam. Topik yang dapat dikerjakan juga harus sesuai dengan waktu yang tersedia atau dimiliki oleh peneliti.

Topik sebaiknya dipilih berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual dengan peneliti.²⁴ Kedekatan emosional misalnya peneliti melakukan penelitian sejarah mengenai tempat tinggalnya sehingga peneliti sudah mengetahui seluk-beluk objek yang akan menjadi kajiannya. Kedekatan intelektual maksudnya adalah peneliti sudah memiliki pengetahuan yang memadai tentang objek yang akan dikaji sehingga penelitian menjadi memungkinkan untuk dilakukan.

²³ Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Pustaka, 1995, hlm. 90.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 91.

Kedekatan emosional antara penulis dengan skripsi ini adalah ketika penulis menemukan artikel dalam internet yang membahas mengenai Mr. Assaat dan Syafruddin Prawiranegara. Kedua tokoh tersebut disebut sebagai “Dua Presiden Indonesia yang terlupakan”. Penulis kemudian merasa tertarik dan ingin mengkaji tokoh tersebut secara lebih mendalam.

Kedekatan intelektual juga menjadi alasan penulisan skripsi ini. Topik mengenai Mr. Assaat adalah topik yang belum banyak dibahas dalam buku-buku sejarah. Penulis belum pernah menemukan historiografi yang membahas secara keseluruhan mengenai peranan Mr. Assaat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Sumber-sumber yang penulis temukan mengungkapkan bahwa peranan Mr. Assaat tidaklah kecil. KNIP pada waktu itu merupakan lembaga legislatif yang berperan besar di Indonesia. Selama menjabat sebagai Pemangku Jabatan Presiden RI, peranan Mr. Assaat juga tak kalah penting. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka topik yang dipilih penulis dalam menyusun skripsi adalah “Peranan Mr. Assaat dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia (1946-1951).”

2. Heuristik

Heuristik adalah tahap kedua dari penelitian sejarah setelah peneliti memilih topik yang akan ditelitinya. Heuristik adalah pengumpulan sumber atau data sejarah yang relevan dengan topik

penelitian tersebut. Sumber sangat diperlukan untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan.

Sumber yang digunakan dalam skripsi yang berjudul “Peranan Mr. Assaat dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia (1946-1951)” diperoleh dari berbagai perpustakaan, diantaranya Perpustakaan dan Laboratorium Sejarah Fakultas Ilmu Sosial UNY, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial UNY, Perpustakaan Pusat UNY, Perpustakaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Perpustakaan *St Ignatius, Jogja Library Center* dan lain-lain. Sumber-sumber yang diperoleh kemudian dibedakan menjadi sumber tertulis dan tidak tertulis. Penulis dalam mengerjakan penelitian ini menggunakan sumber tertulis. Sumber tertulis terdiri dari sumber primer dan sekunder. Penulis menggunakan sumber primer dan sekunder dalam penelitian historis ini.

a. Sumber primer

Sumber primer atau sumber asli adalah evidensi atau bukti yang kontemporer atau sezaman dengan sesuatu peristiwa yang terjadi.²⁵ Adapun sumber-sumber primer yang telah penulis temukan antara lain.

A.G. Pringgodigdo. (1969). *Perubahan Kabinet Presidensiil Menjadi Kabinet Parlementer*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

²⁵Helius Sjamsuddin. *op.cit.*, hlm. 84.

Assaat. (1947). *Hukum Tata Negara Republik Indonesia dalam Masa Peralihan*. Yogyakarta: Badan Penerbit Nasional.

Soebadio Sastrosatomo. (1987). *Perjuangan Revolusi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia, Sekretariat Negara No 151, Yogyakarta, 29 Desember 1946, Peraturan Presiden No 6 Tahun 1946. (Milik Nova Sugiyanti, Pendidikan Sejarah Reguler 2011)

Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia, Sekretariat Negara No 155, Jakarta, 1945, Penetapan PPKI dalam Pembentukan KNIP. (Milik Nova Sugiyanti, Pendidikan Sejarah Reguler 2011)

Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia, Sekretariat Negara No 168, Yogyakarta, 5 Desember 1949 Undang-Undang No 7 Tahun 1949 tentang Penunjukan Pemangku Jabatan Presiden. (Milik Nova Sugiyanti, Pendidikan Sejarah Reguler 2011)

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah apa yang telah ditulis oleh sejarawan sekarang atau sebelumnya berdasarkan sumber-sumber pertama.²⁶ Sumber-sumber sekunder yang telah penulis temukan antara lain.

Kahin, Audrey. (2008). "Rebellion to Integration, West Sumatra and Indonesia Polity 1926-1998." a.b. Azmi dan Zulfahmi. *Dari Pemberontakan ke Integrasi, Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

P.N.H. Simanjuntak. (2003). *Kabinet-kabinet Republik Indonesia dari Awal Kemerdekaan sampai Reformasi*. Jakarta: Djambatan.

Samsul Wahidin. (1986). *MPR RI dari Masa ke Masa*. Jakarta: Bina Aksara.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 83.

3. Verifikasi

Verifikasi adalah kritik sumber atau keabsahan sumber.²⁷ Verifikasi ada dua macam, yaitu autentisitas/keaslian sumber/kritik ekstern, dan kredibilitas/kebiasaan dipercayai/kritik intern.²⁸ Tujuan dari verifikasi ini adalah setelah penulis berhasil mengumpulkan sumber-sumber dalam penelitiannya, penulis tidak akan menerima begitu saja apa yang tertulis dalam sumber-sumber yang telah diperoleh.²⁹ Setelah diverifikasi, barulah sumber-sumber sejarah tersebut bisa digunakan untuk penelitian.

Kritik yang dilakukan penulis terhadap sumber-sumber yang telah diperoleh diantaranya terhadap artikel-artikel dalam surat kabar *Merdeka* maupun *Kedaulatan Rakjat*. Dilihat dari segi fisik, kertas yang digunakan surat kabar tersebut sudah berubah kecoklatan dan sobek di berbagai tempat. Hal ini dikarenakan surat kabar tersebut sudah sangat lama terbit yaitu sejak tahun 1949 dan 1950. Dilihat dari segi isi, penggunaan ejaan dan gaya bahasa dalam surat kabar tersebut juga menunjukkan periodenya, yaitu periode 1949-1950. Artinya masih menggunakan ejaan lama.

Kritik terhadap sumber primer yang penulis peroleh yaitu buku karya A. G. Pringgodigdo yang berjudul *Perubahan Kabinet*

²⁷ Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 100.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Helius Sjamsuddin, *op.cit.*, hlm 103.

Presidensiil Mendjadi Kabinet Parlementer. Dilihat dari segi fisik, buku tersebut terlihat sudah tua karena terbit sejak tahun 1969. Ejaan yang digunakan juga masih ejaan lama. Buku tersebut tidak sejaman dengan periode penulisan skripsi ini, akan tetapi buku tersebut ditulis langsung oleh pelaku yang pada masa awal kemerdekaan Indonesia menjabat sebagai Sekretaris Negara.

Sumber primer yang kedua yaitu buku karya Mr. Assaat sendiri yang berjudul *Hukum Tata Negara Republik Indonesia dalam Masa Peralihan*. Buku tersebut terbit tahun 1947 sehingga kertasnya sudah berubah warna menjadi coklat. Ejaan yang digunakan juga masih menggunakan ejaan lama. Periode buku tersebut sejaman dengan periode skripsi ini, dan ditulis langsung oleh tokoh yang penulis kaji.

4. Interpretasi

Interpretasi adalah penafsiran dari sumber-sumber sejarah yang digunakan. Penulis menganalisis sumber-sumber sejarah yang telah diperolehnya kemudian menyusunnya dalam bentuk hasil penelitian. Unsur subjektivitas penulis harus dihilangkan agar hasil penulisannya tidak subjektif. Interpretasi dilakukan melalui dua cara yaitu analisis dan sintesis.³⁰ Analisis berarti menguraikan, sementara sintesis adalah menyatukan data-data yang telah diperoleh melalui analisis sehingga dapat menghasilkan sebuah tulisan.

³⁰ Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 102.

Penulis menafsirkan bahwa peranan Mr. Assaat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia sangat penting. Mr. Assaat pernah menjabat sebagai ketua KNIP dengan badan pekerja yang saat itu merupakan lembaga legislatif Indonesia sebelum MPR dan DPR terbentuk. Mr. Assaat juga pernah menjabat sebagai Pemangku Jabatan Presiden RI masa RIS. Mr. Assaat merupakan tokoh pejuang Indonesia yang belum terlalu dikenal oleh masyarakat Indonesia sendiri.

5. Historiografi

Historiografi adalah suatu sintesis dari seluruh hasil penelitian atau penemuan dalam suatu penulisan utuh.³¹ Penulis perlu mengerahkan seluruh daya pikirannya, keterampilan teknis penggunaan kutipan dan catatan, serta penggunaan pikiran-pikiran kritis dan analisisnya.³² Aspek kronologi sangat penting dalam penulisan sejarah.³³ Berbeda dengan ilmu sosial lain, sejarah bersifat diakronis atau memanjang dalam waktu. Pembahasan perlu dibedakan dalam periode-periode waktu tertentu.

Historiografi merupakan tahap akhir dari penelitian sejarah. Hasilnya disajikan dalam sebuah bentuk tulisan. Penyajian tulisan hasil penelitian ini digunakan untuk mengetahui peranan Mr. Assaat

³¹ Helius Sjamsuddin, *op.cit.*, hlm. 121.

³² *Ibid.*

³³ Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 104.

dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada periode 1946-1951.

H. Pendekatan Penelitian

Seorang peneliti membutuhkan bantuan ilmu-ilmu lain dalam melakukan sebuah penelitian sejarah. Penelitian sejarah memerlukan pendekatan multidimensional untuk dapat merekonstruksi suatu peristiwa sejarah. Sejarah, yang mengkaji aktivitas manusia dalam dimensi waktu, tentu tidak terlepas dari manusia sebagai makhluk sosial.

Pendekatan penelitian adalah dari sudut pandang mana saja seorang peneliti memandang masalah yang sedang ditelitinya. Penggambaran suatu peristiwa sejarah sangat tergantung dari bagaimana kita memandangnya, aspek mana yang menjadi perhatian kita. Penulis menggunakan pendekatan sosiologi, politik dan pendekatan ilmu hukum tata negara dalam penelitian ini.

1. Pendekatan Sosiologi

Sosiologi merupakan salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosial yang objek kajiannya adalah masyarakat.³⁴ Pendekatan sosiologi sangat berguna dalam penelitian historis, terutama jika mengkaji tentang peranan seorang tokoh. Pendekatan sosiologi digunakan untuk memahami unsur-unsur sosial yang ada di sekitar Mr. Assaat, seperti

³⁴ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 18.

lingkungan keluarga, pendidikan, organisasi maupun masyarakat Sumatera Barat dimana Mr. Assaat dilahirkan.

2. Pendekatan Politik

Politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat kearah kehidupan bersama yang harmonis.³⁵ Pendekatan politik adalah pendekatan yang menyangkut kegiatan yang berhubungan dengan negara dan pemerintahan.

Pendekatan politik digunakan untuk menganalisis kondisi-kondisi politik pada saat Mr. Assaat menjabat sebagai ketua KNIP dengan badan pekerjaanya. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia belum mempunyai lembaga perwakilan rakyat. Dibentuklah sebuah komite yang bertugas membantu tugas-tugas presiden dan disebut KNIP. Fungsi KNIP kemudian berubah menjadi badan legislatif. Dibentuklah Badan Pekerja KNIP yang bertugas menjalankan tugas sehari-hari KNIP.

Pendekatan politik juga digunakan untuk menganalisis kondisi perpolitikan Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Pada saat itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah bentuk menjadi negara federal dengan nama Republik Indonesia Serikat sebagai akibat dari disahkannya hasil sidang KMB. Akibatnya Republik Indonesia hanya

³⁵ Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Prima Grafika, 2008, hlm. 15.

menjadi bagian dari negara federal tersebut. Ketika Soekarno dan Hatta diangkat menjadi Presiden dan Perdana Menteri RIS, maka diangkatlah Mr. Assaat sebagai Pemangku Jabatan Presiden Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta.

3. Pendekatan Ilmu Hukum Tata Negara

Ilmu hukum tata negara adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari prinsip-prinsip dan norma-norma hukum yang tertuang secara tertulis ataupun yang hidup dalam kenyataan praktik kenegaraan.³⁶ Hal ini berkenaan dengan konstitusi, institusi-institusi negara dan hubungannya dengan sesama institusi maupun dengan warga negara.³⁷

Pendekatan ilmu hukum tata negara digunakan untuk menganalisis perkembangan dan perubahan institusi-institusi negara Indonesia. Sejak memproklamasikan kemerdekaannya, Indonesia belum memiliki lembaga-lembaga negara. Dibentuklah KNIP sebagai badan pembantu presiden dalam menjalankan fungsi pengawasan dan menetapkan GBHN. Tidak lama setelah dibentuk, KNIP berubah fungsi menjadi badan legislatif sehingga dibentuk Badan Pekerja KNIP.

³⁶ Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Grafindo Raja Persada, 2012, hlm. 30.

³⁷ *Ibid.*

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi yang berjudul “Peranan Mr. Assaat dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia (1946-1951)” akan disusun dalam lima bab, yaitu sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama dalam skripsi ini yaitu bab pendahuluan yang akan berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, historiografi yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LATAR BELAKANG KEHIDUPAN Mr. ASSAAT

Bab kedua ini akan membahas mengenai tokoh Mr. Assaat beserta latar belakang kehidupannya, mulai dari keluarga, pendidikan, dan organisasinya.

BAB III PERANAN Mr. ASSAAT SEBAGAI KETUA BPKNIP TAHUN 1946-1949

Bab ini akan membahas mengenai peranan Mr. Assaat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Secara khusus bab ini akan membahas mengenai peranan Mr. Assaat dalam parlemen Indonesia pada saat itu, yaitu KNIP dan Badan Pekerjaannya hingga akhirnya terpilih menjadi ketuanya sampai tahun 1949.

BAB IV PERANAN Mr. ASSAAT SEBAGAI PEMANGKU JABATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI DALAM NEGERI TAHUN 1949-1951

Bab ini akan membahas mengenai jabatannya sebagai Pemangku Jabatan Presiden RI. Mr. Assaat kemudian duduk dalam parlemen Indonesia sampai tahun 1951. Mr. Assaat juga pernah duduk dalam kabinet Natsir, menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini akan berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan melalui kajian pustaka dan literatur yang ada.

BAB II

LATAR BELAKANG KEHIDUPAN Mr. ASSAAT

A. Latar Belakang Keluarga

Berbicara mengenai sosok Mr. Assaat, banyak orang yang tidak mengenal salah satu tokoh pejuang Indonesia ini. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia mencatat bahwa tokoh ini mempunyai peranan besar untuk Indonesia. Ternyata, peranannya yang besar terhadap bangsanya, lantas tidak membuat tokoh ini dikenal luas oleh masyarakat seperti halnya tokoh pejuang lain. Buku-buku sejarah jarang membicarakannya, atau sekedar mencatat namanya. Literatur mengenai Mr. Assaat sangat sulit ditemui.

Mr. Assaat adalah salah satu tokoh Indonesia berdarah Minangkabau.¹ Beliau dilahirkan di Kampung Pincuran Landai, Kanagarian Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Agam, Sumatera Barat, pada tanggal 18 September 1904.² Beliau menikah dengan seorang wanita bernama Roesiah, akan tetapi meninggal pada tahun 1949 karena

¹ Minangkabau adalah suatu kelompok suku yang mendiami daerah Sumatera Barat sekarang, sehingga daerah ini identik dengan daerah budaya Minangkabau. Kampung halaman mereka terletak mulai dari kaki Bukit Barisan yang membentang sepanjang pantai barat Sumatera sampai ke daratan rendah Riau di pantai timur, yang berbatasan dengan Selat Malaka. Selengkapnya lihat: Graves, Elizabeth E. "The Minangkabau Response to Dutch Colonial Rule Nineteenth Century." a.b. Novi Andri, Leni Marlina, Nurasni. *Asal-Usul Elite Minangkabau Modern Respon terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/XX*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007, hlm. x-1. Lihat juga: Gusti Asnan. *Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat Tahun 1950-an*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007, hlm. 10.

² Marthias Duski Pandoe. "Mr. Assaat Presiden RI ke-3". Dalam Julius Pour (Ed). *Jernih Melihat Cermat Mencatat (Antologi Karya Jurnalistik Wartawan Senior Kompas)*. Jakarta: Kompas, 2000, hlm. 57.

sakit dengan meninggalkan dua orang putra dan seorang putri.³ Kelak, Mr. Assaat menikah dengan adik dari dokter yang merawat istrinya tersebut.⁴

Mr. Assaat mempunyai gelar Datuk Mudo di belakang namanya. Gelar Datuk adalah gelar yang disandang oleh seorang penghulu dalam adat Minangkabau. Penghulu suku atau biasanya disebut penghulu saja adalah seorang pemimpin suku. Penghulu diberi gelar kehormatan dengan sebutan Datuk atau disingkat Dt, dimana ia berada di puncak hirarki adat mewakili sukunya.⁵

Pemberian gelar kepada Mr. Assaat ini dikatakan hanyalah untuk mengangkat simbol-simbol adat dalam kehidupan keseharian mereka di perantauan. Beberapa aktivis politik dari Minangkabau yang ada di Jakarta menyetujui penobatan mereka sebagai pemangku adat.⁶ Salah satunya adalah Mr. Assaat. Contoh lainnya adalah Mohammad Natsir dengan gelarnya Datuk Sinaro Nan Panjang.⁷

Mr. Assaat meninggal pada 16 Juni 1976 pada usia 71 tahun di Rumah Sakit Ciptomangunkusumo.⁸ Jenazahnya kemudian disemayamkan di rumah saudaranya di Jakarta. Pemakamannya dihormati dengan upacara

³ *Ibid.*, hlm. 58.

⁴ Tim Penyusun. *Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 2*. Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1988, hlm. 376.

⁵ Graves, Elizabeth E, *op.cit.*, hlm. 21.

⁶ Gusti Asnan, *op.cit.*, hlm. 29.

⁷ *Ibid.*

⁸ Tim Penyusun, *op.cit.*, hlm. 376.

kebesaran militer diikuti oleh keluarga, teman seperjuangan dan sahabat-sahabatnya.⁹ Sebelumnya, Mr. Assaat sempat dipenjara selama empat tahun karena ikut terlibat pemberontakan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) pimpinan Sjafruddin Prawiranegara.¹⁰

Selama hidupnya, Mr. Assaat dikenal sebagai tokoh yang sederhana. Peci beludru tidak pernah lepas darinya dalam masa perjuangannya ikut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Berjalan kaki ataupun bersepeda merupakan hal yang biasa dalam hidup Mr. Assaat, bahkan saat menjalankan tugasnya dalam pemerintahan Indonesia.

B. Latar Belakang Pendidikan

Mr. Assaat memulai pendidikannya di sekolah agama swasta Adabiah di Padang.¹¹ Awal mulanya, sekolah ini didirikan atas prakarsa Haji Abdullah Ahmad, saudara kandung Mr. Assaat dan Haji Abdul Karim Amrullah pada tahun 1909.¹² Sekolah ini adalah sekolah agama pertama di Sumatera Barat yang menggunakan sistem seperti sekolah pada umumnya, yaitu menggunakan meja dan kursi. Sekolah-sekolah agama pada saat itu

⁹ Marthias Duski Pandoe, *op.cit.*, hlm. 59.

¹⁰ Erwin Moechtar. (2004). *Mr. Assaat*. Tersedia pada <http://www.cimbuak.net/tokoh-minang/53-tokoh-minangkabau/204-tokoh-minang>. Diakses pada 13 Mei 2014.

¹¹ *Ibid.*

¹² A.B. Lopian, dkk. *Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 5*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2012, hlm. 355.

umumnya menggunakan sistem surau, yaitu murid duduk bersila di sekitar gurunya.¹³ Munculnya sekolah ini telah mengubah sistem pendidikan di Minangkabau dan merupakan pelopor perubahan dan pembaruan sistem pendidikan Islam di Sumatera Barat.

Mr. Assaat melanjutkan pendidikannya ke MULO¹⁴ di Padang.¹⁵ Setelah menamatkan MULO, Mr. Assaat melanjutkan sekolah ke STOVIA¹⁶ karena mempunyai cita-cita menjadi seorang dokter. Akan tetapi, setelah menjalani pendidikannya di STOVIA, Mr. Assaat merasa jiwanya tidak terpanggil untuk menjadi seorang dokter. Mr. Assaat kemudian meninggalkan STOVIA dan masuk ke AMS,¹⁷ sekolah setingkat menengah atas sekarang.¹⁸

Selesai menamatkan pendidikannya di AMS, Mr. Assaat melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Hakim Tinggi di Jakarta bernama

¹³ *Ibid.*

¹⁴ MULO atau *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* adalah sekolah tingkat menengah pertama pada masa kolonial Belanda di Indonesia. Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia. *Sejarah Nasional Indonesia V Edisi Pemutakhiran*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008, hlm. 109.

¹⁵ Erwin Moechtar, *loc.cit.*

¹⁶ STOVIA atau *School tot Opleiding van Inlandsche Artsen* adalah sekolah khusus pendidikan dokter untuk pribumi pada masa kolonial Belanda di Indonesia. A.B. Lopian, dkk, *op.cit.*, hlm. 239.

¹⁷ AMS atau *Algemeene Middelbare School* adalah sekolah setingkat menengah atas pada masa kolonial Belanda di Indonesia yang didirikan untuk membawa muridnya memasuki tingkat perguruan tinggi. M.C. Ricklefs. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991, hlm. 239.

¹⁸ Erwin Moechtar, *loc.cit.*

Rechts Hoge School.¹⁹ Di sekolah ini, Mr. Assaat tidak diluluskan oleh profesornya karena ikut terlibat organisasi politik saat itu, sehingga beliau memilih meninggalkan Indonesia dan pergi ke Belanda untuk mengenyam pendidikan. Mr. Assaat kemudian memperoleh gelar *Meester in de rechten* (Mr) atau sarjana hukum dari Universitas Leiden di Belanda.²⁰

Mr. Assaat kembali ke Indonesia pada tahun 1939 setelah menamatkan pendidikannya. Beliau membuka praktik advokat di Jakarta sampai masuknya Jepang ke Indonesia pada tahun 1942, kemudian pindah ke dunia perbankan.²¹ Masa pendudukan Jepang, Mr. Assaat diangkat sebagai Camat Gambir, kemudian menjadi Wedana²² Mangga Besar di Jakarta.²³

C. Latar Belakang Organisasi

Awal abad 20 merupakan awal dari munculnya kebangkitan nasional di Indonesia. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya kaum intelektual yang bermunculan. Kemunculan kaum intelektual ini tidak

¹⁹ Marthias Duski Pandoe, *op.cit.*, hlm. 59.

²⁰ Tim Penyusun, *op.cit.*, hlm. 376.

²¹ *Ibid.*

²² Jabatan Wedana adalah pembantu pimpinan wilayah Daerah Tingkat II (kabupaten) membawahi beberapa camat, atau pembantu bupati. Lihat Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia, 2008, hlm. 1560.

²³ Marthias Duski Pandoe, *op.cit.*, hlm. 59.

terlepas dari adanya Politik Etis²⁴ yang dijalankan oleh pemerintah Belanda terhadap kaum pribumi.

Kaum intelektual ini adalah anak dari para bangsawan pribumi yang mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan barat. Pendidikan modern yang mereka peroleh telah mengubah pola berpikir mereka. Mereka mulai berfikir untuk berjuang melawan Belanda bukan saja melalui pertempuran fisik, akan tetapi juga melalui sebuah organisasi modern. Muncullah organisasi Budi Utomo di Jawa pada 20 Mei 1908²⁵, yang ditetapkan sebagai awal mula kebangkitan nasional di Indonesia.

Situasi masyarakat Sumatera Barat pada awal abad 20-an masih dalam masa penderitaan akibat kesewenangan pemerintah Belanda. Tanam paksa yang seharusnya sudah dihapuskan sejak tahun 1870 di seluruh Jawa dan Sumatera, ternyata masih berlaku di Sumatera Barat untuk tanaman kopi sampai tahun 1908.²⁶ Tahun berikutnya, Belanda menghapuskan tanam paksa tersebut, akan tetapi kemudian menggantinya dengan

²⁴ Politik Etis adalah politik balas budi pemerintah Belanda terhadap rakyat Hindia Belanda saat itu karena telah dikeruk kekayaannya tanpa mengembalikan sepeserpun. Tujuan dari Politik Etis ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Hindia Belanda, melalui intervensi langsung negara dalam kehidupan ekonomi, yang tercantum dalam slogan “irigasi, edukasi, dan emigrasi.” Akan tetapi pada kenyataannya, Politik Etis ini justru semakin menyengsarakan rakyat karena terjadi banyak penyimpangan. Selengkapnya lihat Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, *op.cit.*, hlm. 21-29.

²⁵ Suhartono. *Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994, hlm. 30.

²⁶ Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sumatera Barat*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982, hlm. 55.

*belasting*²⁷, sehingga menimbulkan perlawanan rakyat Minangkabau di berbagai daerah di Sumatera Barat yang dipimpin oleh para ulama.²⁸

Embrio kebangkitan nasional di Sumatera Barat lahir dari lembaga pendidikan Islam yang telah direorganisasi dari sistem surau ke sistem kelas.²⁹ Contohnya adalah sekolah agama Adabiah, tempat Mr. Assaat mengenyam pendidikannya. Pendidikan barat juga ikut mempengaruhi cara berfikir para generasi muda di Sumatera Barat menjadi lebih maju dan memunculkan kaum elit politik Minangkabau.

Tradisi merantau orang Minangkabau, yaitu keluar dari tanah kelahirannya membuat para elit politik asal Sumatera Barat ikut berjuang bersama para tokoh pergerakan nasional lain di Jawa. Pengaruh mereka tetap terasa di Sumatera Barat meskipun mereka berada di Jawa. Mereka melihat berbagai kejadian di Jawa dan membawa beritanya ke daerah asal mereka. Secara tidak langsung, konsep dasar organisasi di Jawa dijadikan ide dasar atau konsep perjuangan bagi organisasi maupun partai-partai di Sumatera Barat.³⁰

²⁷ *Belasting* adalah semacam iuran paksa dari rakyat Minangkabau yang berupa rodi dan uang kontan kepada pemerintah Belanda. Rakyat harus membayar pajak terhadap tanah kepunyaan mereka sendiri yang telah diwarisi sejak berabad-abad lamanya. Selengkapnya lihat *Ibid.*, hlm. 56.

²⁸ Kahin, Audrey. "Rebellion to Integration, West Sumatera and the Indonesian Polity 1926-1998." a.b. Azmi dan Zulfahmi. *Dari Pemberontakan ke Integrasi, Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008, hlm. 12.

²⁹ Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op.cit.*, hlm. 54.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 57.

Mr. Assaat memulai karirnya dalam bidang gerakan kebangsaan saat menjadi mahasiswa melalui *Jong Sumatranen Bond*. Begitu *Jong Sumatranen Bond* meleburkan diri dalam Indonesia Muda bersama perkumpulan-perkumpulan pemuda lain, Mr. Assaat ikut bergabung di dalamnya. Beliau juga ikut bergabung bersama tokoh-tokoh besar pejuang bangsa Indonesia dalam Partai Indonesia, atau Partindo. Pengalamannya dalam organisasi-organisasi masa perang ini kelak membantunya dalam perjuangannya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Beliau dapat menduduki jabatan-jabatan penting karena pengalamannya tersebut.

1. *Jong Sumatranen Bond*

Awal mula berdirinya organisasi *Jong Sumatranen Bond* adalah karena adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua di Sumatera Barat tentang pelaksanaan ajaran Islam dalam masyarakat.³¹ Golongan tua menghendaki ajaran Islam dilaksanakan secara konsekuen, sementara golongan muda menghendaki pelaksanaan ajaran Islam secara lebih lemah dan sesuai dengan perkembangan jaman. Pertentangan ini semakin ramai dengan golongan intelektual yang memperoleh pendidikan barat dan mempunyai pola pikir yang berbeda dengan golongan yang lain.

Melihat fenomena perbedaan pendapat tersebut, kaum intelektual Minangkabau yang merantau ke Jakarta membentuk organisasi pemuda bernama *Jong Sumatranen Bond* pada tanggal 9

³¹ *Ibid.*, hlm. 89.

Desember 1917.³² Organisasi ini kebanyakan beranggotakan dari lapisan tingkat atas masyarakat Minangkabau. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk menambah pengaruh bangsa Indonesia dalam pemerintahan dan mengajak pemuda berfikir secara nasional dengan menghilangkan perasaan kesukuan masing-masing.³³

Jong Sumatranen Bond kemudian diperkenalkan ke Padang oleh Nazir Datuk Pamontjak.³⁴ Ide-ide *Jong Sumatranen Bond* dapat diterima oleh golongan pemuda yang masih berada di Minangkabau. Sejak saat itu, banyak berdiri cabang-cabang *Jong Sumatranen Bond* di wilayah Sumatera.

Jong Sumatranen Bond kemudian diubah namanya menjadi Pemuda Sumatra setelah sepuluh tahun berdiri. Organisasi tersebut kemudian melebur menjadi Indonesia Muda bersama dengan organisasi kepemudaan lainnya sebagai tindak lanjut Kongres Pemuda II. Melalui *Jong Sumatranen Bond* inilah, Mr. Assaat memulai karirnya dalam gerakan kebangsaan.

2. Indonesia Muda

Indonesia Muda adalah gabungan atau fusi dari organisasi-organisasi kepemudaan di Indonesia pada masa pergerakan nasional. Ide untuk mengadakan persatuan di kalangan pemuda ini sebenarnya

³² Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, *op.cit.*, hlm. 429.

³³ Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op.cit.*, hlm. 91.

³⁴ A.B. Lopian, dkk, *op.cit.*, hlm. 356.

sudah ada sejak Kongres Pemuda I tahun 1926 di Jakarta, akan tetapi belum terwujud.³⁵ Sampai tahun 1927, banyak organisasi pemuda yang menghendaki fusi, seperti *Jong Java*, Pemuda Indonesia, Perhimpunan Indonesia di Belanda, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia.

Tanggal 26-28 Oktober 1928, diadakan Kongres Pemuda II di Jakarta.³⁶ Kongres ini dihadiri para pemuda dari berbagai organisasi kepemudaan di Indonesia saat itu. Seperti yang telah kita ketahui bersama, dari kongres inilah lahir satu peristiwa yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda.³⁷ Keputusan kongres ini sangat berpengaruh pada organisasi kepemudaan pada masa setelahnya. Keinginan untuk mengadakan fusi semakin besar sejak kongres ini diadakan.

Organisasi-organisasi pemuda yang ada pada waktu itu kemudian mengadakan persiapan untuk keperluan fusi. Tanggal 23 April dan 25 Mei 1929 diadakan rapat dari wakil perkumpulan yang telah siap mengadakan fusi.³⁸ Mereka adalah wakil dari *Jong Java*, Pemuda Sumatera dan Pemuda Indonesia. Didirikanlah satu komisi

³⁵ *Ibid.*, hlm. 360.

³⁶ Suhartono, *op.cit.*, hlm. 78.

³⁷ Sumpah Pemuda adalah sumpah yang diucapkan oleh para pemuda dari berbagai organisasi kepemudaan Indonesia pada masa kolonial Belanda. Sumpah ini diucapkan pada saat Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah ini berisi tiga sumpah setia persatuan Indonesia, yaitu persatuan tanah air Indonesia, bangsa Indonesia dan bahasa Indonesia. Selengkapnya lihat *Ibid.*, hlm. 79.

³⁸ A.B. Lopian, dkk, *op.cit.*, hlm. 363.

besar Indonesia Muda yang anggotanya diambil dari perkumpulan-perkumpulan tersebut.

Mr. Assaat menduduki jabatan sebagai Bendahara I dalam susunan Komisi Besar Indonesia Muda ini.³⁹ Pada tahap ini, karir Mr. Assaat semakin menanjak dari sebelumnya. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai anggota Pengurus Besar Perhimpunan Pemuda Indonesia yang kemudian ikut bergabung dalam Indonesia Muda.⁴⁰

Komisi Besar Indonesia Muda kemudian menyelenggarakan kongres untuk mendirikan badan fusi yang bernama Indonesia Muda. *Jong Java*, Perhimpunan Indonesia, *Jong Celebes* dan Pemuda Sumatera kemudian membubarkan diri dengan diresmikannya Indonesia Muda ini. Piagam resmi Indonesia Muda ditandatangani oleh Koentjoro Poerbopranoto, Muh. Yamin, Joesoepadi, Sjahrial, Assaat, Soewadji Prawirohardjo, Adnan Gani, Tamzil, Soerjadi, dan Pantouw.⁴¹

Indonesia Muda memutuskan tidak ikut dalam aksi politik, dan yang dapat menjadi anggota hanya pelajar saja, sedangkan pemuda bukan pelajar tidak dapat menjadi anggota.⁴² Hal ini menyebabkan

³⁹ Lihat susunan Komisi Besar Indonesia Muda dalam *Ibid.*, hlm. 364.

⁴⁰ Erwin Moechtar, *op.cit.*

⁴¹ Lihat Piagam resmi Indonesia Muda dalam Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah Jakarta. *45 Tahun Sumpah Pemuda*. Jakarta: Gunung Agung, 1974, hlm. 82-83.

⁴² *Ibid.*, hlm. 93.

banyak anggotanya yang kemudian memutuskan untuk keluar karena kecewa dan mendirikan perkumpulan lain. Sejak saat itu, banyak berdiri perkumpulan pemuda lainnya di luar Indonesia Muda. Beberapa diantaranya seperti Suluh Pemuda Indonesia yang bersifat radikal, Persatuan Pemuda Rakyat Indonesia, dan lain-lain.⁴³

Pemerintah Belanda tetap mencurigai aktivitas Indonesia Muda meskipun organisasi ini tidak terjun ke dunia politik. Pemerintah melakukan tekanan dan kekangan terhadap organisasi pemuda ini. Para pelajar di sekolah-sekolah Belanda dilarang menjadi anggota Indonesia Muda. Hal ini juga yang menyebabkan banyak anggota yang memutuskan untuk keluar.

3. Partai Indonesia

Partai Indonesia, atau yang disingkat Partindo merupakan partai baru hasil perpecahan dari partai sebelumnya, yaitu PNI (Partai Nasional Indonesia) pimpinan Soekarno. PNI bertujuan untuk bekerja demi kemerdekaan Indonesia. Kegiatan partai ini adalah memperbaiki keadaan politik, ekonomi, dan sosial dengan mendirikan sekolah, poliklinik, bank nasional dan perkumpulan koperasi.⁴⁴

⁴³ A.B. Lopian, dkk, *op.cit.*, hlm. 366.

⁴⁴ Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, *op.cit.*, hlm. 367.

Di bawah kepemimpinan Soekarno, PNI berkembang dengan pesat dengan dasarnya berdiri di atas kaki sendiri, marhaenisme⁴⁵ dan non-kooperasi.⁴⁶ Propaganda-propaganda Soekarno selalu berhasil menarik dukungan masyarakat. Hal inilah yang kemudian menyebabkan pemerintah Belanda mengambil tindakan karena khawatir dengan perkembangan PNI.

Pemerintah memberikan peringatan kepada pemimpin PNI agar membatasi propagandanya dalam pembukaan sidang Dewan Rakyat tanggal 15 Mei 1928.⁴⁷ Peringatan ini dihiraukan oleh para pemimpin PNI sehingga memicu peringatan kedua. Para pemimpin PNI seperti Soekarno, Maskun, Gatot Mangkupraja dan Supriadinata kemudian ditangkap Belanda atas dasar isu pemberontakan PNI.⁴⁸

Penangkapan terhadap para pemimpin PNI merupakan awal dari melemahnya partai ini. Akhirnya, PNI memutuskan untuk membubarkan diri pada kongresnya tahun 1931.⁴⁹ Pembubaran ini kemudian menimbulkan perpecahan di kalangan pendukung-pendukung PNI. Masing-masing pihak kemudian mendirikan partai

⁴⁵ Marhaenisme adalah paham yang bertujuan memperjuangkan nasib kaum kecil untuk mendapatkan kebahagiaan hidup. Paham ini tumbuh dalam masyarakat Indonesia dengan dasarnya sosionasional, sosiodemokrasi, gotong royong, kebangsaan, kemerdekaan beragama, dan kerakyatan. Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit.*, hlm. 879.

⁴⁶ Suhartono, *op.cit.*, hlm. 70.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, *op.cit.*, hlm. 367.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 373.

baru yaitu Partai Indonesia atau Partindo dan Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI-Baru.

Mr. Assaat bergabung dalam salah satu partai tersebut, yaitu Partindo. Beliau ikut bergabung bersama para pemimpin Partindo seperti Sartono, A.K. Gani, Adam Malik, Amir Syarifuddin, dan lain-lain. Saat itu, beliau sedang mengenyam pendidikan di *Rechts Hoge School*. Kegiatannya dalam bidang politik selama menjadi mahasiswa ini, diketahui oleh profesornya dan orang Belanda. Akibatnya, beliau tidak diluluskan meskipun sudah mengikuti ujian akhir beberapa kali. Merasa tersinggung dengan perlakuan tersebut, Mr. Assaat kemudian meninggalkan sekolahnya dan pergi ke Belanda untuk mengenyam pendidikan. Beliau memperoleh gelar “Mr” atau Sarjana Hukum dari Universitas Leiden di Belanda.⁵⁰

Tahun 1931, setelah keluar dari penjara, Soekarno memutuskan untuk bergabung dengan Partindo karena usahanya untuk mempersatukan kembali kedua partai itu gagal.⁵¹ Partindo kemudian berkembang pesat dan dalam waktu singkat Soekarno berhasil menduduki jabatan ketua. Perkembangan Partindo ini diikuti oleh perkembangan PNI-Baru setelah dipimpin oleh Sutan Sjahrir dan Mohammad Hatta.

⁵⁰ Erwin Moechtar, *op.cit.*

⁵¹ Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, *op.cit.*, hlm. 375.

Perkembangan kedua partai ini kembali menimbulkan kekhawatiran pemerintah Belanda. Dibuatlah berbagai macam peraturan untuk mengekang perkembangan kedua partai tersebut. Pers dan kebebasan berbicara dibatasi. Polisi Belanda yang biasa hadir dalam rapat-rapat partai dianjurkan bertindak lebih keras. Pegawai pemerintah dilarang bergabung dan gubernur jenderal diberi hak luar biasa untuk mengasingkan seseorang yang dianggap membahayakan.⁵²

Hak luar biasa ini kemudian menimpa para pemimpin partai sehingga mereka ditangkap dan diasingkan. Soekarno, yang sebelumnya pernah diasingkan kembali ditangkap dan diasingkan ke Flores lalu dipindah ke Bengkulu. Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir dibuang ke Boven Digul di Papua kemudian dipindahkan ke Bandanaira.⁵³

Dengan adanya penangkapan terhadap para pemimpin partai, ditambah dengan larangan mengadakan rapat di seluruh Indonesia, gerakan partai-partai nonkooperasi di Indonesia sejak saat itu mulai melemah. Partindo akhirnya membubarkan diri pada tahun 1936.⁵⁴ PNI-Baru juga mengalami kelumpuhan. Hingga akhirnya, setelah Jepang berkuasa di Indonesia, semua organisasi pemuda yang ada pada waktu itu dibubarkan.

⁵² *Ibid.*, hlm. 376.

⁵³ Moedjanto. *Indonesia Abad ke-20 Jilid 1*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1988, hlm. 53.

⁵⁴ Suhartono, *op.cit.*, hlm. 82.

Setelah Jepang dinyatakan kalah dalam Perang Pasifik, Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa kemerdekaan ini, Mr. Assaat terjun ke dalam dunia politik dan menjadi Ketua BPKNIP pada tahun 1946-1949. Mr. Assaat kemudian diangkat sebagai Pemangku Jabatan Presiden Republik Indonesia pada tahun 1949 saat bentuk negara Indonesia berubah dari kesatuan menjadi federal. Pembahasan mengenai hal ini akan dijelaskan lebih lengkap pada bab-bab selanjutnya.

BAB III

PERANAN Mr. ASSAAT SEBAGAI KETUA BPKNIP TAHUN 1946-1949

A. Pembentukan KNIP

Salah satu unsur dari sebuah negara adalah pemerintah, di samping wilayah, penduduk dan kedaulatan. Pemerintah merupakan suatu organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya.¹ Pemerintah inilah yang nantinya akan membuat kebijakan-kebijakan yang mengatur kehidupan warga negaranya.

Republik Indonesia yang baru saja merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 tentu membutuhkan unsur pemerintah tersebut. Begitu memproklamasikan kemerdekaan, para tokoh bangsa melalui PPKI segera mengadakan rapat guna membentuk pemerintahan. Salah satu rapat yang dilaksanakan oleh PPKI adalah rapat pembentukan KNIP² yang akan menggantikan PPKI sebagai badan eksekutif.³

¹ Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1977, hlm. 44.

² Lihat Penetapan PPKI dalam pembentukan KNIP dalam Lampiran2 halaman 102 Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia, Sekretariat Negara No 155, Jakarta, 1945, Penetapan PPKI dalam Pembentukan KNIP. (Milik Nova Sugiyanti, Pendidikan Sejarah Reguler 2011)

³ Di Indonesia sistem pemerintahan dibagi menjadi kekuasaan eksekutif atau pemerintahan negara, legislatif atau dewan perwakilan rakyat, dan yudikatif atau kekuasaan kehakiman. Selengkapnya lihat Kansil. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 15.

Rapat pembentukan KNIP dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945.⁴ Soekarno dan Hatta yang pada rapat PPKI sebelumnya telah terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pertama mengangkat 135 orang anggota KNIP yang kesemuanya adalah anggota PPKI.⁵ Dalam perkembangannya, keanggotaan KNIP ditambah dari berbagai golongan dan daerah di Indonesia. Setelah KNIP dilantik dengan ketuanya Mr. Kasman Singodimejo, PPKI secara resmi dibubarkan.⁶ Sejak saat itu, badan eksekutif di Indonesia dijalankan oleh KNIP.

KNIP dibentuk di seluruh Indonesia dengan pusatnya di Jakarta. Dibentuk pula komite nasional daerah di daerah-daerah di Indonesia. Komite nasional daerah tersebut bertugas membantu pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan.

Tugas dari KNIP adalah menjalankan fungsi pengawasan dan berhak ikut serta dalam menetapkan garis-garis besar haluan negara.⁷ Artinya segala penetapan undang-undang harus disetujui oleh KNIP maupun oleh Presiden.⁸ Hal ini sesuai dengan dasar hukum pembentukan KNIP yaitu UUD 1945 Peraturan Peralihan Pasal IV, yang berbunyi;

⁴ Aman. *Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan*. Yogyakarta: Pujangga Press, 2013, hlm. 25.

⁵ *Ibid.*

⁶ Ismail Suny. *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*. Jakarta: Aksara Baru, 1986, hlm. 27.

⁷ Aman, *op.cit.*, hlm. 25.

⁸ Ismail Suny, *op.cit.*, hlm. 28.

“Sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk menurut UUD ini segala kekuasaannya dijalankan oleh presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional.”⁹

Pasal tersebut berarti bahwa segala kekuasaan kenegaraan pada masa itu berada dalam tangan presiden. Komite nasional hanya bertugas sebagai pembantu presiden, dan sekedar memberikan pertimbangan-pertimbangan dan usul-usul.¹⁰ Komite Nasional sebagai lembaga pembantu tidak dapat mengontrol presiden, begitu juga wakil presiden dan para menteri.¹¹ Sistem pemerintahan seperti ini memperlihatkan bahwa kekuasaan presiden sangat luas.

Keadaan tersebut menimbulkan kesan bahwa negara yang baru saja merdeka ini diperintah oleh seorang diktator. Kepemimpinan oleh seorang diktator tentu melanggar jiwa UUD 1945 yang demokratis. Hal ini tentu saja sangat merugikan bagi bangsa Indonesia karena negara yang baru saja merdeka membutuhkan pengakuan dari dunia internasional yang sebagian besar menggunakan sistem demokrasi.

Pemecahan masalah kemudian muncul dari kalangan pemuda dalam keanggotaan KNIP. Supeno, Sakirman, Mangunsarkoro dan Soebadio mengusulkan untuk mengubah KNIP menjadi sebuah badan

⁹ Soebadio Sastrosatomo. *Perjuangan Revolusi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987, hlm. 31.

¹⁰ Kansil, *op.cit.*, hlm. 42.

¹¹ Samsul Wahidin. *MPR RI dari Masa ke Masa*. Jakarta: Bina Aksara, 1986, hlm. 84.

legislatif.¹² Usul ini disambut baik oleh anggota KNIP yang lain khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

B. KNIP Berubah Menjadi Badan Legislatif

Golongan pemuda dalam KNIP melihat bahwa kekuasaan presiden yang terlalu luas dan dapat menimbulkan kesan kediktatoran harus diubah. Sistem pemerintahan presidensial seperti yang tercantum dalam UUD 1945 harus diubah dengan sistem parlementer dengan seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahannya. Perubahan ini tentu tidak dapat dilakukan karena lembaga perwakilan yang berhak mengubah undang-undang belum terbentuk.

Golongan pemuda kemudian berinisiatif untuk mengubah KNIP menjadi badan legislatif. Berdasarkan Pasal IV Peraturan Peralihan UUD 1945, mereka mengajukan sebuah petisi yang sudah ditandatangani oleh 50 orang anggota KNIP. Petisi ini ditujukan kepada Presiden Soekarno supaya segera diadakan sidang pleno untuk membahas masalah terkait akan diubahnya KNIP menjadi badan legislatif. KNIP kemudian mengadakan sidang pleno pada tanggal 16 Oktober 1945 untuk membahas masalah tersebut.¹³

Hasil sidang pleno KNIP tersebut adalah Maklumat Wakil Presiden Nomor X (baca eks, bukan sepuluh), tertanggal 16 Oktober

¹² Soebadio Sastrosatomo, *op.cit.*, hlm. 61.

¹³ Samsul Wahidin, *op.cit.*, hlm. 85.

1945.¹⁴ Melalui maklumat ini KNIP diberikan kekuasaan legislatif sebelum MPR dan DPR terbentuk. KNIP juga ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara bersama-sama dengan presiden. Begitu juga dengan komite nasional yang dibentuk di berbagai daerah di Indonesia. Komite nasional daerah berkedudukan sebagai dewan perwakilan daerah dan dipimpin oleh komite nasional pusat.

Disebutkan pula dalam maklumat tersebut bahwa tugas sehari-hari KNIP dilaksanakan oleh sebuah badan pekerja yang terdiri dari sebagian anggota KNIP. Hal ini dikarenakan anggota-anggota KNIP juga mempunyai tugas di daerah asal masing-masing sebagai wakil dari pusat. Mereka tidak bisa seterusnya berada di Jakarta dimana komite nasional pusat berada. Oleh karena itulah, anggota badan pekerja adalah orang-orang yang berkedudukan di Jakarta dan sekitarnya agar sewaktu-waktu jika akan diadakan sidang, para anggota mudah dihubungi. Pada saat itu, perhubungan dengan jarak antar pulau masih tergolong sulit.

BPKNIP kemudian dibentuk dengan ketuanya Sutan Sjahrir dan bertanggung jawab kepada KNIP.¹⁵ Tugas dari BPKNIP ini adalah menjalankan kekuasaan KNIP sehari-hari, apabila KNIP tidak bersidang, baik tugas tertulis maupun tidak tertulis. Tugas tersebut diantaranya

¹⁴ Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945 selengkapnya lihat dalam *Ibid*.

¹⁵ B.N. Marbun. *DPR-RI: Pertumbuhan dan Cara Kerjanya*. Jakarta: Gramedia, 1992, hlm. 78.

membuat dan mengusulkan undang-undang, kontrol¹⁶, ratifikasi¹⁷, dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara bersama-sama dengan presiden.¹⁸ Dengan demikian, KNIP berfungsi sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat, sementara BPKNIP sebagai Dewan Perwakilan Rakyatnya.

Setelah KNIP berubah menjadi lembaga legislatif, maka usaha selanjutnya untuk mencapai sebuah negara demokrasi adalah membentuk kabinet parlementer. Kabinet Indonesia pertama yang diketuai Presiden Soekarno oleh golongan pemuda dianggap sebagai bentukan Jepang karena kabinet ini dibentuk oleh PPKI.¹⁹ Sedangkan PPKI sendiri merupakan lembaga persiapan kemerdekaan yang dibentuk oleh Jepang. Para pemuda yang berjiwa revolusioner ini sangat anti Jepang.

Kabinet parlementer kemudian dibentuk dengan Perdana Menteri Sutan Sjahrir. Pembentukan kabinet ini dilakukan karena KNIP yang telah berubah menjadi badan legislatif mempunyai hak untuk mengubah undang-undang. Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah pemerintahan presidensial. Tentang

¹⁶ Kontrol adalah kekuasaan badan legislatif untuk meminta tanggung jawab dari pemerintah terhadap politik dan kebijaksanaannya dalam menjalankan pemerintahan. Assaat. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia dalam Masa Peralihan*. Yogyakarta: Badan Penerbit Nasional, 1947, hlm. 12.

¹⁷ Ratifikasi adalah pengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen, khususnya pengesahan undang-undang, perjanjian antar negara, dan persetujuan hukum internasional. Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia, 2008, hlm. 1147.

¹⁸ Assaat, *op.cit.*, hlm. 25.

¹⁹ Soebadio Sastrosatomo, *op.cit.*, hlm. 97.

perubahan UUD 1945 ini diatur dalam Bab XVI pasal 37 dimana MPR dapat mengadakan perubahan terhadap UUD 1945 apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota dan disetujui oleh 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.²⁰ Dalam hal ini, pasal yang diubah adalah pasal 4 ayat 1 tentang sistem pemerintahan presidensial.

Usaha selanjutnya adalah dengan menegakkan kebebasan berpendapat seperti tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”²¹ Untuk mencapainya tersebut, pemerintah atas usul BPKNIP mengeluarkan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945.²² Maklumat ini berisi mengenai pemberian kebebasan kepada masyarakat untuk membentuk partai. Sejak saat itu, banyak berdiri partai-partai politik dengan ideologinya yang berbeda-beda. Partai-partai tersebut diantaranya Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Masyumi, Partai Murba, Partai Kristen Indonesia, dan lain-lain.²³

²⁰ *Ibid.*, hlm. 61.

²¹ Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Lihat: Redaksi Sinar Grafika. *Tiga Undang-Undang Dasar: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1950, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950*. Jakarta: Sinar Grafika, 1990, hlm. 14.

²² A.G. Pringgodigdo. *Perubahan Kabinet Presidensiil Mendjadi Kabinet Parlementer*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1969, hlm. 35.

²³ Ginandjar Kartasasmita, dkk. *30 Tahun Indonesia Merdeka (1945-1955)*. Jakarta: Sekretariat Negara, 1995, hlm. 63.

BPKNIP mengajukan petisi kepada pemerintah, untuk mengubah pertanggung-jawaban menteri kabinet yaitu dialihkan kepada KNIP, bukan kepada presiden. Hal ini dilakukan untuk menyempurnakan sistem pemerintahan parlementer. Pemerintah menyetujuinya dengan diberlakukannya Maklumat Presiden tanggal 14 November 1945.²⁴ Maklumat ini berisi mengenai persetujuan presiden atas usul dialihkannya pertanggung-jawaban menteri kepada KNIP. Sejak saat itu, sistem pemerintahan telah diubah dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer secara utuh.

Diubahnya KNIP menjadi badan legislatif dan diangkatnya Sutan Sjahrir sebagai Perdana Menteri, menjadikan usaha para pemuda untuk mengubah sistem pemerintahan Indonesia menjadi lebih demokratis telah berhasil. Kekuasaan presiden menjadi lebih terbatas dan tidak menimbulkan kesan otoriter. Aspirasi masyarakat dapat tersalurkan melalui KNIP sebagai lembaga legislatif meskipun pada pembentukannya anggotanya masih dipilih oleh presiden, akan tetapi rakyat Indonesia mengakui lembaga tersebut.

Melalui perubahan ini, jabatan kepala negara/presiden dipisahkan dari jabatan kepala pemerintahan/perdana menteri.²⁵ Artinya, Perdana Menteri Sjahrir sebagai kepala pemerintahan memiliki peran yang

²⁴ Miriam Budiardjo, *op.cit.*, hlm. 197.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 199.

lebih luas daripada presiden. Jabatannya sebagai ketua BPKNIP kemudian digantikan oleh Supeno dan Muhammad Natsir sebagai wakilnya.

Selain usaha para tokoh bangsa untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, mereka dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya juga dihadapkan pada persoalan mengenai Belanda yang masih ingin berkuasa di Indonesia. Belanda kembali datang ke Indonesia setelah Jepang dinyatakan kalah dalam Perang Pasifik dan keluar dari negara Indonesia. Sejak kedatangannya kembali itulah Belanda terus-menerus melakukan penyerangan di berbagai wilayah di Indonesia.

Akibat serangan-serangan yang dilakukan oleh tentara Belanda, Jakarta dianggap sudah tidak aman lagi bagi pemerintahan Indonesia. Pemerintah Indonesia kemudian dipindahkan ke Yogyakarta dengan alasan di kota ini pemerintah Republik masih berkuasa penuh sehingga keamanannya terjaga. Presiden mengangkat menteri penerangan baru yaitu Muhammad Natsir, sementara Supeno ditunjuk sebagai pemimpin Balai Pemuda dalam masa pemerintahan di Yogyakarta.²⁶ Jabatan ketua dan wakil ketua BPKNIP kemudian digantikan oleh Mr. Assaat dan Yusuf Wibisono.²⁷

KNIP dan Badan Pekerjaannya dalam perjuangannya ikut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia telah mengalami beberapa perpindahan markas. Salah satu penyebabnya yaitu keberadaan Sekutu dan

²⁶ Soebadio Sastrosatomo, *op.cit.*, hlm. 228.

²⁷ *Ibid.*

Belanda yang menyebabkan pergolakan di berbagai daerah. Hal ini menyebabkan situasi bangsa menjadi tidak stabil dan tidak aman. Demi alasan keamanan inilah KNIP berpindah-pindah markas ataupun tempat untuk mengadakan sidang.

Pada masa awal pembentukannya tahun 1945 sidang pertama KNIP bertempat di Jakarta, yaitu di Gedung Komidi (sekarang Gedung Kesenian) di Pasar Baru.²⁸ Pada tahun itu juga sempat berpindah ke Yogyakarta. Pada tanggal 14 Maret 1946 kedudukan BPKNIP pindah ke Purwokerto,²⁹ akan tetapi pindah kembali ke Yogyakarta karena situasi Purwokerto yang dianggap kurang aman.

Sidang-sidang yang diadakan KNIP juga terpaksa berpindah-pindah tempat karena saat itu Indonesia masih berada dalam situasi perang kemerdekaan. Beberapa sidang KNIP pada masa-masa awal pembentukannya dilaksanakan di Jakarta. Sidang keempat dilaksanakan di Solo, kelima di Malang dan terakhir di Yogyakarta.³⁰

²⁸ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993, hlm. 100.

²⁹ Usman Raliby. *Documenta Historica*. Jakarta: Bulan Bintang, 1953, hlm. 277.

³⁰ B.N. Marbun, *op.cit.*, hlm. 80.

C. Mr. Assaat sebagai Ketua BPKNIP

1. Resolusi BPKNIP

Mr. Assaat mulai menjadi anggota BPKNIP sejak tahun 1945, tepatnya sejak Sidang Pleno KNIP ketiga tanggal 26 November 1945.³¹ Mr. Assaat bersama tokoh-tokoh lainnya seperti Adam Malik, Soebadio Sastrosatomo, A. Halim dan lain-lain mewakili aliran buruh, tani, sosialis dan pemuda dalam keanggotaan BPKNIP. Mr. Assaat kemudian terpilih menjadi ketua BPKNIP pada tahun 1946 menggantikan Supeno dalam Sidang Pleno KNIP keempat di Solo.³² Secara berturut-turut sampai tahun 1949, Mr. Assaat kembali terpilih menjadi Ketua BPKNIP.

Tidak lama setelah Mr. Assaat terpilih sebagai ketua, BPKNIP mengeluarkan dua buah resolusi seperti tercantum dalam Pengumuman Badan Pekerja No. 23. Resolusi pertama berisi tentang pengakuan atas hak yang sepenuhnya untuk menentukan nasib dan bentuk pemerintahan sendiri berdasarkan demokrasi.³³ Resolusi ini dikeluarkan sebagai reaksi atas kondisi Indonesia pada awal kemerdekaan yang belum stabil akibat keberadaan Sekutu dan Belanda di wilayah Indonesia. Setelah resolusi ini dikeluarkan, BPKNIP menyatakan mendukung kebijakan pemerintah dalam menghadapi

³¹ Soebadio Sastrosatomo, *op.cit.*, hlm. 223.

³² B.N. Marbun, *loc.cit.*

³³ Lihat teks Resolusi I BPKNIP lengkap dalam Soebadio Sastrosatomo, *op.cit.*, hlm. 229.

Belanda maupun Sekutu, yaitu dengan jalan damai melalui perundingan.

BPKNIP dalam rapatnya tanggal 19 Februari 1946 menyatakan bahwa hanya pemerintah Republik Indonesialah yang mempunyai kedaulatan atas seluruh Indonesia.³⁴ Pernyataan ini sebagai reaksi atas keterangan resmi pemerintah Belanda yang menegaskan adanya pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. BPKNIP kemudian mengusulkan kepada pemerintah untuk mendesak PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) supaya menyelesaikan permasalahan antara Belanda dan Indonesia ini.

Resolusi II BPKNIP berisi mengenai usul kepada presiden untuk mengadakan tindakan guna memperbaiki susunan pemerintah maupun KNIP.³⁵ Resolusi ini dikeluarkan karena kabinet pimpinan Sjahrir dianggap bukan kabinet nasional dimana tidak semua partai yang ada di Indonesia duduk dalam kabinet ini. Perbaikan susunan KNIP dimaksudkan agar lembaga ini lebih mencerminkan lembaga pemerintahan yang demokratis.

KNIP kemudian mengadakan sidang guna membahas masalah mengenai perbaikan dalam pemerintahan ini. Sidang pleno dilaksanakan di Surakarta pada 28 Februari 1946 dan dipimpin oleh

³⁴ *Ibid.*, hlm. 230.

³⁵ Lihat Resolusi II BPKNIP selengkapnya dalam: *Ibid.*, hlm. 229-230.

Mr. Assaat.³⁶ Dalam sidang ini, terjadi perdebatan antara Kabinet Sjahrir dengan Persatuan Perjuangan sebagai oposisi pemerintah. Persatuan Perjuangan tidak menyetujui jalan perundingan yang ditempuh Kabinet Sjahrir. Persatuan Perjuangan menghendaki tujuh pasal program³⁷ yang telah mereka susun menjadi program pemerintah.

Akibat perdebatan ini Kabinet Sjahrir I jatuh dan Perdana Menteri Sjahrir mengembalikan mandatnya sebagai Perdana Menteri kepada Presiden Soekarno. Presiden Soekarno kemudian memberikan mandat kepada Persatuan Perjuangan untuk membentuk kabinet. Akan tetapi, Persatuan Perjuangan tidak dapat melaksanakan mandat tersebut sehingga Presiden Soekarno kembali memberikan mandat membentuk kabinet kepada Sjahrir. Kabinet baru kemudian dibentuk dan dikenal sebagai Kabinet Sjahrir II.

Sidang KNIP pleno kelima kembali diselenggarakan pada tanggal 25 Februari sampai 6 Maret 1947 di Malang.³⁸ Dalam sidang ini, Mr. Assaat kembali terpilih sebagai Ketua KNIP sekaligus BPKNIP. Rapat ini dilaksanakan guna membahas mengenai Peraturan

³⁶ Bibit Suprpto. *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 38.

³⁷ Tujuh pasal program Persatuan Perjuangan terdiri dari: pengakuan atas kemerdekaan 100% dan mengusir seluruh tentara asing dari daratan dan lautan Indonesia; pemerintahan rakyat; tentara rakyat; melucuti senjata Jepang; Mengurus tawanan bangsa Eropa; menyita pertanian (perkebunan) musuh dan menyelenggarakannya; menyita dan menyelenggarakan perindustrian dari musuh. Soebadio Sastrosatomo, *op.cit.*, hlm. 233.

³⁸ B.N. Marbun, *loc.cit.*

Presiden No. 6 Tahun 1946 yang berisi mengenai penyempurnaan dan penambahan anggota KNIP dari luar Jawa. Setelah melalui perdebatan-perdebatan, akhirnya peraturan presiden tersebut disetujui melalui sidang oleh BPKNIP.

Presiden Soekarno melalui Peraturan Presiden No. 6 Tahun 1946 tersebut kemudian menyempurnakan susunan keanggotaan KNIP.³⁹ Penyempurnaan ini bertujuan agar dapat menampung dan sesuai dengan aliran-aliran politik, serta golongan-golongan besar yang ada dalam masyarakat Indonesia. Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan mengenai penambahan wakil-wakil dari luar Jawa. Dengan adanya peraturan ini, wakil-wakil partai maupun wakil-wakil dari daerah luar Jawa dalam KNIP kemudian bertambah. Dengan bertambahnya wakil-wakil dalam KNIP, maka sifat komite ini menjadi lebih demokratis yang menampung aspirasi masyarakat banyak.

2. Permasalahan yang Dihadapi Pemerintah Indonesia

Masa awal kemerdekaan, kondisi dalam negeri Indonesia kacau dan tidak stabil. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, baik dari dalam negeri Indonesia sendiri, maupun faktor dari luar. Dari dalam, pemerintah Indonesia harus menghadapi pemberontakan dari rakyatnya sendiri. Dari luar, pemerintah Indonesia harus menghadapi

³⁹ Lihat Peraturan Presiden No. 6 Tahun 1949 tentang Penyempurnaan Susunan KNIP dalam Lampiran 3 halaman 105 Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia, Sekretariat Negara No 151, Yogyakarta, 29 Desember 1946, Peraturan Presiden No 6 Tahun 1946. (Milik Nova Sugiyanti, Pendidikan Sejarah Reguler 2011).

Belanda yang masih berusaha menguasai Indonesia dan tidak mau mengakui kedaulatan Indonesia.

Tahun 1947, tepatnya tanggal 21 Juli, Belanda melakukan serangan di beberapa daerah di Jawa dan Sumatera dan dikenal sebagai Agresi Militer Belanda I.⁴⁰ Daerah-daerah RI yang merupakan penghasil beras seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah jatuh ke tangan Belanda sehingga semakin menyulitkan pihak RI. Belanda juga secara sepihak menetapkan garis demarkasi Van Mook yang menjadi garis batas antara daerah kedudukan masing-masing pihak saat gencatan senjata atas desakan Dewan Keamanan PBB dilaksanakan.⁴¹

Sebelumnya, Indonesia dan Belanda telah melakukan usaha damai melalui Perjanjian Linggarjati. Perjanjian ini dilaksanakan pada tanggal 15 November 1946 dan berisi antara lain; pemerintah Belanda mengakui secara de facto pemerintahan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera, akan dibentuk Negara Indonesia Serikat dan Uni Indonesia Belanda.⁴² Dengan adanya agresi militer tersebut, maka Belanda telah melanggar perjanjian yang telah dilakukan karena menyerang wilayah republik maupun di luar republik.

Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Tiga Negara untuk membantu menyelesaikan masalah antara Belanda dan

⁴⁰ G. Moedjanto. *Indonesia Abad ke-20 Jilid 2*. Yogyakarta: Kanisius, 1988, hlm. 15.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 17.

⁴² Aman, *op.cit.*, hlm. 45.

Indonesia. Komisi ini terdiri dari Belanda, Australia, dan Amerika.⁴³ Komisi ini bertugas mempertemukan pihak RI dan Belanda dalam sebuah perundingan yang dikenal sebagai Perundingan Renville. Pada saat itu, kabinet Indonesia yang memerintah adalah kabinet Amir.

Perundingan Renville dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 1947 di atas kapal Amerika, Renville yang sedang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok.⁴⁴ Isi pokok dari perundingan ini adalah mengenai persetujuan gencatan senjata antara pihak Indonesia dan Belanda; kesediaan kedua belah pihak untuk menyelesaikan pertikaian dengan jalan damai dengan bantuan Komisi Tiga Negara; dan kedaulatan Indonesia tetap berada di tangan Belanda sampai dibentuknya Negara Indonesia Serikat.⁴⁵ Dengan ditandatanganinya persetujuan ini, pertikaian Indonesia dan Belanda selanjutnya akan diselesaikan melalui perundingan.

Selain menghadapi serangan dari Belanda, pemerintah juga harus menghadapi pemberontakan dari dalam negeri sendiri. Pemberontakan yang terjadi adalah pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia) di Madiun. Tanggal 18 September 1948, PKI mengumumkan berdirinya Soviet Republik Indonesia di Madiun.⁴⁶

⁴³ *Ibid.*, hlm. 48.

⁴⁴ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hlm. 138.

⁴⁵ G. Moedjanto, *op.cit.*, hlm. 22

⁴⁶ Ginandjar Kartasasmita, *dkk, op.cit.*, hlm. 212.

Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Peristiwa Madiun. Pemberontakan ini disebabkan karena jatuhnya Kabinet Amir setelah penandatanganan Persetujuan Renville yang dinilai semakin merugikan pihak Indonesia.

Guna mengatasi pemberontakan PKI, BPKNIP mengadakan sidang dan menerima usul Wakil Presiden Hatta mengenai Undang-Undang Tentang Pemberian Kekuasaan kepada Presiden dalam Keadaan Bahaya.⁴⁷ Atas dasar undang-undang tersebut, pemerintah segera mengerahkan tentaranya untuk menumpas pemberontakan tersebut. Dengan mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya, pemerintah akhirnya berhasil menumpas pemberontakan PKI.

Dari uraian tersebut, dapat dilihat bahwa BPKNIP ikut serta dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh Indonesia yang baru saja merdeka, baik masalah dari dalam maupun dari luar. BPKNIP dalam hal ini berperan sebagai lembaga legislatif yang meratifikasi hasil-hasil perundingan yang telah dicapai dan memberikan kekuasaan kepada presiden untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Kinerja lembaga tersebut pada kurun waktu tahun 1947-1948 lebih difokuskan pada masalah-masalah perang maupun pemberontakan. Akibatnya pada tahun 1948 KNIP

⁴⁷ A.H. Nasution. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 8*. Bandung: Disjarah-AD dan Penerbit Angkasa, 1978, hlm. 259.

tidak mengadakan sidang pleno sama sekali karena situasi negara yang diliputi peperangan.

3. Diasingkan ke Bangka

Keikutsertaan Mr. Assaat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia membuatnya ikut ditangkap dan diasingkan oleh Belanda bersama pemimpin-pemimpin bangsa lainnya. Saat itu, akhir tahun 1948, tepatnya tanggal 19 Desember, tentara Belanda mendarat di Yogyakarta.⁴⁸ Mereka melancarkan serangan yang dikenal sebagai Agresi Militer Belanda II. Belanda telah melanggar perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dengan melancarkan serangan ini. Alasannya, saat itu Yogyakarta adalah ibukota republik yang berarti menjadi pusat pemerintahan RI dan menjadi sumber semangat perlawanan dan perjuangan bangsa Indonesia.

Lapangan terbang Maguwo dapat dikuasai Belanda tanpa menghadapi banyak perlawanan dari pihak Republik. Seluruh kota Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda.⁴⁹ Jatuhnya Yogyakarta ini kemudian disusul dengan beberapa daerah lain di Jawa dan Sumatera. Agresi militer ini membuat KNIP terus mengkonsentrasikan pada pertahanan negara dan persiapan serangan balik.

⁴⁸ Mohamad Roem. *Bunga Rampai dari Sejarah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1972, hlm. 90.

⁴⁹ Sejak Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda, Presiden Soekarno menginstruksikan Sjafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran saat itu untuk membentuk pemerintah darurat di Bukittinggi. Kemudian didirikanlah Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI dengan Sjafruddin sebagai pejabat presidennya. Aman, *op.cit.*, hlm. 51.

BPKNIP saat itu sedang akan mengadakan sidang di kantornya di Jalan Malioboro untuk membahas situasi perundingan dengan Belanda yang semakin memanas.⁵⁰ Saat Belanda menyerang kota, anggota BPKNIP yang lain segera pulang ke rumah masing-masing. Mr. Assaat segera pergi menuju Gedung Agung yang berada di Jalan Malioboro, tempat tinggal Presiden Soekarno saat itu.⁵¹

Presiden, wakil presiden, dan beberapa pejabat tinggi negara ditawan dan diasingkan oleh Belanda. Para tokoh tersebut ditangkap saat sedang menghadiri sidang kabinet di Gedung Agung.⁵² Mr. Assaat juga ikut ditawan oleh Belanda bersama dengan tokoh-tokoh tersebut.

Mr. Assaat bersama Mohammad Hatta, Mr. A.G. Pringgodigdo, Mohamad Roem, Ali Sastroamidjojo, dan Surjadarma kemudian diasingkan ke Bangka.⁵³ Presiden Soekarno, Sjahrir dan H. Agus Salim diasingkan ke Brastagi kemudian dipindah ke Sumatera Utara.⁵⁴ Saat berada di tawanan inilah, istri Mr. Assaat yang sedang

⁵⁰ Tim Penyusun. *Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 2*. Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1988, hlm. 376.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² R. Maladi. *Perang Rakyat Semesta 1948-1949*. Seminar Revolusi Kepahlawanan dan Pembangunan Bangsa, Penyelenggara Museum Beteng Yogyakarta MSI Cabang Yogyakarta Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 16 November 1994.

⁵³ Mohamad Roem, *op.cit.*, hlm. 92.

⁵⁴ A.H. Nasution. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 11 Periode Konferensi Meja Bundar*. Disjarah-AD dan Penerbit Angkasa Bandung, 1979, hlm. 104.

sakit meninggal dunia dalam perawatan dokter Bahder Djohan. Kelak, Mr. Assaat menikah dengan adik dari dokter Bahder Djohan tersebut.⁵⁵

Memasuki tahun 1949, perlawanan dari pihak Republik Indonesia mulai dipersiapkan. Puncak perlawanan tersebut terjadi pada tanggal 1 Maret 1949, dan dikenal sebagai Serangan Umum 1 Maret 1949 di bawah pimpinan Letkol Soeharto.⁵⁶ Serangan perlawanan ini berhasil menduduki kota Yogyakarta selama enam jam dan mengusir tentara Belanda. Ketika tentara bantuan Belanda yang lebih besar datang, para tentara Indonesia meninggalkan Yogyakarta untuk bergerilya di hutan-hutan.

Belanda pada akhirnya bersedia mengentikan agresi militernya atas Indonesia tersebut. Hal ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang simpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi Belanda. Salah satunya adalah dukungan dari negara-negara di Asia yang mengadakan Konferensi Asia di New Delhi, India.⁵⁷ Negara-negara peserta konferensi tersebut selalu menyuarakan

⁵⁵ Tim Penyusun, *loc.cit.*

⁵⁶ Ginandjar Kartasasmita, dkk, *op.cit.*, hlm. 245.

⁵⁷ Konferensi Asia di New Delhi, India dilaksanakan pada 20-25 Januari 1949. Konferensi ini diselenggarakan atas inisiatif dari Perdana Menteri India Pandit Jawaharlal Nehru. Negara-negara yang hadir dalam konferensi tersebut antara lain, India, Selandia Baru, Thailand, Filipina, Pakistan, Myanmar, negara-negara Arab dan masih banyak lagi. Hasil dari konferensi ini adalah pembebasan tawanan politik, dikembalikannya daerah-daerah yang diduduki Belanda, penghapusan blokade ekonomi serta pembentukan UUD. Selengkapnya lihat Fitri Puspa Sari, 2014, "Konferensi Asia di New Delhi 20-25 Januari 1949 (Bentuk Dukungan Negara-negara Asia kepada Indonesia Pasca Agresi Militer Belanda II), *Avatara*, Vol. 2, No. 1, hlm. 130-139.

masalah Indonesia dengan Belanda dalam sidang-sidang Dewan Keamanan PBB.

Dengan gigihnya perlawanan dari pihak Republik, dan atas desakan Dewan Keamanan PBB, Belanda akhirnya bersedia menghentikan agresinya. Tentara Belanda yang berada di Yogyakarta ditarik keluar dari kota tersebut. Tentara Indonesia yang sebelumnya meninggalkan Yogyakarta kemudian kembali lagi ke kota.

Para pemimpin bangsa yang ditawan Belanda baru dibebaskan setelah ditandatanganinya Persetujuan Roem-Royen⁵⁸ antara Indonesia dan Belanda. Dalam persetujuan tersebut, antara lain disepakati bahwa pimpinan dan pemerintah RI akan dikembalikan ke Yogyakarta dan RI akan ikut serta dalam sebuah konferensi di Belanda. Tanggal 6 Juli 1949, para pemimpin bangsa yang diasingkan kembali ke Yogyakarta melalui Lapangan Terbang Maguwo.⁵⁹

Dengan kembalinya para pemimpin bangsa tersebut, maka secara resmi pemerintah RI telah kembali ke Yogyakarta. Sjafruddin Prawiranegara yang sebelumnya diberi mandat untuk membentuk pemerintah darurat kemudian menyerahkan kembali mandat tersebut kepada Presiden Soekarno. Pemerintah Indonesiapun kembali dapat berjalan di Yogyakarta.

⁵⁸ Dalam perundingan ini, delegasi Indonesia diketuai oleh Mohamad Roem sedangkan Belanda diwakili oleh Van Royen, serta UNCI (*United Nations Comission for Indonesia*) dari PBB sebagai fasilitator. Perundingan dilaksanakan pada 17 April 1949 di Jakarta. Selengkapnya lihat Ginandjar Kartasmita, dkk, *op.cit.*, hlm. 248.

⁵⁹ Mohamad Roem, *op.cit.*, hlm. 108.

4. KMB (Konferensi Meja Bundar)

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Belanda kembali datang ke Indonesia dengan membonceng Sekutu. Mereka kemudian melakukan penyerangan atas berbagai wilayah di Indonesia dengan tujuan menguasai kembali bekas tanah jajahannya. Berbagai pertempuran fisik antara tentara Belanda dan bangsa Indonesia tidak dapat dihindarkan. Beberapa diantara pertempuran tersebut adalah pertempuran di Surabaya, Ambarawa, Medan Area, Bandung, dan lain-lain.

Di samping berjuang mempertahankan kemerdekaan melalui pertempuran fisik, bangsa Indonesia juga menempuh jalur diplomasi atau perundingan. Berbagai perundingan kemudian diadakan untuk menyelesaikan masalah antara Belanda dan Indonesia tersebut. Di antara berbagai perundingan yang telah dilaksanakan antara Belanda dan Indonesia, salah satu yang paling berpengaruh adalah Konferensi Meja Bundar.

KMB berlangsung mulai tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda.⁶⁰ Perundingan ini dihadiri oleh tiga pihak, yakni Republik Indonesia diwakili Mohammad Hatta,

⁶⁰ Ginandjar Kartasasmita, *op.cit.*, hlm. 273.

BFO⁶¹ diwakili oleh Sultan Hamid II, dan Belanda diwakili Van Maarseveen.⁶² Hadir pula sebuah komisi PBB sebagai mediatornya. Hasil utama dari perundingan ini adalah Belanda akan menyerahkan kedaulatan penuh kepada Republik Indonesia Serikat selambat-lambatnya pada akhir Desember 1949.⁶³

Tanggal 25 November 1949, KNIP mengadakan sidang pleno untuk mendengar penjelasan Mohammad Hatta tentang hasil yang dicapai dalam KMB.⁶⁴ Sidang pleno KNIP kembali diselenggarakan pada 7 Desember 1949 di Yogyakarta yang dipimpin oleh Mr. Assaat. Sidang pleno ini diadakan untuk membahas hasil-hasil KMB yang sebelumnya telah ditandatangani oleh para peserta konferensi.

Dalam sidang tersebut, terjadi perdebatan yang sengit antara para peserta sidang. Banyak peserta yang tidak menerima hasil-hasil KMB karena dianggap semakin merugikan pihak Indonesia. Sementara para delegasi KMB menyatakan bahwa hasil-hasil KMB tersebut adalah yang terbaik yang bisa didapatkan oleh pihak Indonesia. Dalam sebuah meja perundingan, tidak mudah untuk mendapatkan semua hal

⁶¹ BFO atau *Bjeenkomst Voor Federal Overleg* adalah perkumpulan dari negara-negara bagian yang dibentuk oleh Belanda di luar Republik. BFO diketuai oleh Sultan Hamid II dari Kalimantan Barat. Selengkapnya lihat Amrin Imran, dkk. *Indonesia dalam Arus Sejarah 6*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2012, hlm. 230.

⁶² Aman, *op.cit.*, hlm. 55.

⁶³ Amrin Imran, dkk, *op.cit.*, hlm. 545.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 546.

yang diinginkan oleh masing-masing peserta perundingan. Hal ini menyebabkan sidang berjalan dengan alot dan membutuhkan waktu sehari-hari karena sulit dicapainya satu suara.

Hari terakhir setelah sidang berjalan selama tujuh hari, yaitu tanggal 15 Desember 1949, terpaksa keputusan akan diambil dengan pemungutan suara.⁶⁵ Hal ini sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai sidang pleno KNIP keenam tersebut yaitu Undang-Undang Tentang Mengadakan Peraturan-Peraturan Istimewa Sidang ke-VI Komite Nasional Pusat.⁶⁶ Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa segala keputusan dalam rapat diambil dengan suara terbanyak mutlak, dan jika dihadiri oleh lebih dari separuh anggota ditambah satu.

Dalam sidang tersebut, terdapat 320 anggota yang hadir dan berhak mengeluarkan suara, sementara sebanyak 31 orang keluar sidang sebelum pengambilan suara.⁶⁷ Hasilnya 226 anggota menerima hasil-hasil KMB dan 62 anggota menolak.⁶⁸ Dengan demikian KMB dapat diterima oleh sidang meskipun harus melalui proses yang memakan waktu sehari-hari.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Lihat Lampiran 5 halaman 116 Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia Sekretariat Negara Yogyakarta 5 Desember 1949 Undang-Undang tentang Mengadakan Peraturan-Peraturan Istimewa Sidang ke-VI Komite Nasional Pusat. (Milik Nova Sugiyanti Pendidikan Sejarah Reguler 2011)

⁶⁷ "KMB Diterima." Surat Kabar *Kedaulatan Rakjat* Edisi Extra Terbit Siang, Rabu 14 Desember 1949.

⁶⁸ Amrin Imran, dkk, *op.cit.*, hlm. 547.

Tepat pukul 13.00 sidang pleno KNIP yang keenam ini ditutup oleh Mr. Assaat.⁶⁹ Pada malam harinya, KNIP mengadakan sidang lagi untuk memilih tokoh-tokoh yang akan duduk dalam Senat⁷⁰ dan DPR RIS dari anggota-anggota KNIP. Kursi untuk Senat disediakan sebanyak 2 kursi, sedangkan untuk DPR RIS sebanyak 6 kursi.⁷¹

⁶⁹ “Assaat merasa berbahagia dapat menutup sidang ke-6.” Surat Kabar *Merdeka* No. 1212 Tahun ke V, Edisi Sabtu 17 Desember 1949.

⁷⁰ Dalam sistem pemerintahan RIS, lembaga legislatif menggunakan sistem dua kamar, yaitu DPR dan Senat serta menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Senat merupakan perwakilan dari setiap negara bagian. Setiap negara bagian mengirimkan dua wakilnya untuk menjadi anggota Senat. Lihat Saldi Isra. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 119.

⁷¹ “KMB Diterima.” Surat Kabar *Kedaulatan Rakyat* Edisi Extra Terbit Siang, Rabu 14 Desember 1949.

BAB IV
Mr. ASSAAT SEBAGAI PEMANGKU JABATAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI DALAM NEGERI 1949-
1951

A. Dampak KMB bagi Indonesia

Sidang KNIP telah mengesahkan hasil-hasil KMB meski harus melalui perdebatan yang alot antara pihak yang menerima dan pihak yang menolak hasil-hasil KMB. Dengan disahkannya hasil KMB ini, Indonesia akhirnya berhasil mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda meskipun dalam bentuk negara federal. Konsekuensi selanjutnya setelah KMB disahkan adalah pelaksanaan dan dampak dari konferensi tersebut bagi Indonesia. Salah satu dampak yang paling besar dari hasil KMB ini adalah bentuk negara Indonesia yang berubah dari negara kesatuan menjadi negara federal. Hal ini disebabkan karena Belanda hanya akan menyerahkan kedaulatan kepada negara Indonesia dalam bentuk negara federal.

Negara federal ini diberi nama Republik Indonesia Serikat atau RIS dengan Soekarno sebagai Presidennya¹ dan Mohammad Hatta sebagai Perdana Menterinya.² RIS beranggotakan negara-negara bagian yang beberapa diantaranya merupakan negara boneka bentukan Belanda yaitu

¹ Lihat Pemberitahuan Presiden kepada Ketua BPKNIP mengenai pemilihan Soekarno sebagai Presiden RIS dalam Lampiran 6 halaman 117 Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia, Sekretariat Negara No 167, Yogyakarta, 17 Desember 1949, Pemberitahuan Presiden Kepada Ketua BPKNIP. (Milik Nova Sugiyanti, Pendidikan Sejarah Reguler 2011)

² Ginandjar Kartasasmita, dkk. *30 Tahun Indonesia Merdeka (1945-1955)*. Jakarta: Sekretariat Negara, 1995, hlm. 283.

Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan dan lain-lain.³ Republik Indonesia sendiri hanya menjadi negara bagian dalam RIS tersebut.

Republik Indonesia merupakan salah satu negara bagian dalam RIS. Wilayah negara bagian ini adalah wilayah berdasarkan Persetujuan *Renville* dengan pusat pemerintahannya di Yogyakarta. Wilayah tersebut meliputi Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, Jawa Timur, dan sebagian wilayah Sumatera.⁴

Sejak berdirinya RIS, para pejabat pemerintah Indonesia banyak yang diangkat sebagai pejabat RIS. Hal ini mengakibatkan terjadinya kekosongan kekuasaan pemerintah negara bagian Republik Indonesia. Presiden Soekarno kemudian menunjuk Ketua BPKNIP saat itu, yaitu Mr. Assaat sebagai Pemangku Jabatan Presiden Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta.⁵

Oleh karena sistem pemerintahan saat itu sistem parlementer, maka segala peraturan yang dibuat oleh presiden harus disetujui oleh parlemen,

³ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993, hlm. 205.

⁴ Lihat peta daerah kekuasaan Republik Indonesia dan Belanda berdasarkan Persetujuan *Renville* dalam: A.H. Nasution. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 7 Periode Renville*. Bandung: Disjarah-AD dan Penerbit Angkasa, 1978, hlm. 454.

⁵ Penunjukkan Pemangku Sementara Jabatan Presiden Republik Indonesia ini berdasarkan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1949 yang ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 5 Desember 1949 oleh Presiden Soekarno. Lihat selengkapnya dalam Lampiran 7 halaman 118, Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia, Sekretariat Negara No 168, Yogyakarta, 5 Desember 1949 Undang-Undang No 7 Tahun 1949 tentang Penunjukkan Pemangku Jabatan Presiden. (Milik Nova Sugiyanti, Pendidikan Sejarah Reguler 2011)

dalam hal ini BPKNIP. Dalam rapatnya tanggal 3 Desember 1949, BPKNIP menyetujui penunjukan Mr. Assaat sebagai Pemangku Jabatan Presiden Indonesia untuk sementara waktu.⁶ Soekarno dan Mohammad Hatta kemudian meninggalkan Yogyakarta dan kembali ke Jakarta setelah kurang lebih empat tahun ditinggalkan, untuk menjalankan tugas sebagai Presiden dan Perdana Menteri RIS.

B. Mr. Assaat sebagai Pemangku Jabatan Presiden Republik Indonesia

1. Pelantikan Mr. Assaat sebagai Pemangku Jabatan Presiden Republik Indonesia

Pelantikan Mr. Assaat sebagai Pemangku Jabatan Presiden Republik Indonesia dilaksanakan di Istana Kepresidenan Yogyakarta pada tanggal 27 Desember 1949.⁷ Pelantikan oleh Presiden Soekarno ini dilaksanakan setelah mendengarkan upacara penyerahan kedaulatan di Amsterdam dan Jakarta. Dalam sambutannya, Presiden Soekarno menyatakan bahwa Mr. Assaat dianggapnya sebagai patriot sejati dan dicintai rakyat daerah Republik Indonesia.⁸ Presiden Soekarno yakin

⁶ Lihat Keputusan BPKNIP dalam Lampiran 8 halaman 119, Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia Sekretariat Negara, Keputusan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. (Milik Nova Sugiyanti, Pendidikan Sejarah Reguler 2011)

⁷ “Atjara Penjerahan di Jogjakarta.” Surat Kabar *Merdeka* No. 1219 Tahun ke V, Edisi Senin 26 Desember 1949.

⁸ “Penjerahan Kedaulatan Republik Indonesia kepada RIS.” Surat Kabar *Merdeka* No. 1221 Tahun ke V, Edisi Jumat 30 Desember 1949.

bahwa Mr. Assaat dapat menjalankan tugasnya sebagai Pemangku Jabatan Presiden Republik Indonesia.

Upacara pelantikan ini juga dimaksudkan sebagai sidang istimewa BPKNIP untuk mengumumkan bahwa Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta tidak bisa menjalankan jabatannya karena diangkat sebagai Presiden dan Perdana Menteri RIS.⁹ BPKNIP melalui Mr. Assaat juga menyampaikan resolusinya mengenai penyerahan Bendera Merah Putih kepada Presiden RIS sebagai tanda penyerahan kedaulatan dari RI kepada RIS.¹⁰ Jabatan Mr. Assaat sebagai Ketua BPKNIP kemudian digantikan oleh wakilnya yaitu Prawoto.

Mengenai jabatan Mr. Assaat sebagai Pemangku Jabatan Presiden Republik Indonesia ini, masih menuai perdebatan di antara para sejarawan. Seperti yang telah kita ketahui, sampai tahun 2015 ini, Indonesia telah dipimpin oleh 7 orang presiden (Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wachid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo). Padahal diantara Soekarno dan Soeharto, ada dua nama yang pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, yaitu Syafruddin Prawiranegara¹¹ dan Mr. Assaat.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Syafruddin Prawiranegara pernah menjabat sebagai kepala negara dalam Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Bukittinggi saat Presiden dan Wakil Presiden Indonesia ditangkap Belanda setelah Agresi Militer Belanda kedua pada tahun 1948. Aman. *Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan*. Yogyakarta: Pujangga Press, 2013, hlm. 51.

Beberapa sejarawan berpendapat bahwa Mr. Assaat bukanlah Presiden Republik Indonesia, melainkan hanya pemangku jabatan sementara. Akan tetapi ada pula sejarawan yang menyatakan bahwa Mr. Assaat layak disebut sebagai mantan Presiden Republik Indonesia. Diantara sejarawan tersebut adalah Asvi Warman Adam, Sejarawan dan Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.¹² Akan tetapi, sejarawan Anhar Gonggong mengatakan bahwa Mr. Assaat hanyalah presiden negara bagian saja, jadi bukan Presiden Indonesia seluruhnya. Mr. Assaat hanyalah kepala pemerintahan darurat, bukan presiden.¹³

Bambang Purwanto, Guru Besar Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, menyatakan bahwa sejarah Indonesia telah melakukan pengingkaran terhadap eksistensi Mr. Assaat sebagai Presiden Republik Indonesia.¹⁴ Menurut beliau, pengingkaran tersebut memiliki konsekuensi terhadap Universitas Gadjah Mada. Hal tersebut disebabkan karena statuta pendirian

¹² Meisy Meidina Billem. (2014). *Mr. Assaat Mantan Presiden RI yang Tak Dicatat Sejarah*. Tersedia pada <http://geotimes.co.id/seni-budaya/seni-budaya-news/profil-tokoh/9472-mr-assaat-,-salah-satu-mantan-presiden-ri-yang-tak-dicatat-sejarah>. Diakses pada 18 November 2014.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Bambang Purwanto. *Sejarawan Akademik dan Disorientasi Historiografi: Sebuah Otokritik*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Diucapkan dalam Rapat Terbuka Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada pada tanggal 28 September 2004 di Yogyakarta.

universitas ini ditandatangani oleh Mr. Assaat saat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.¹⁵

Sebelum menjadi Universitas Gadjah Mada, awalnya universitas ini bernama Balai Perguruan Tinggi Kebangsaan Gadjah Mada, yang berdiri pada 3 Maret 1946.¹⁶ Saat itu baru terdapat Fakultas Hukum dan Fakultas Sastra. Dalam perkembangan selanjutnya, tanggal 19 Desember 1949, diresmikanlah Universitas Gadjah Mada yang terdiri dari enam fakultas, yaitu Kedokteran, Hukum, Teknik, Sastra dan Filsafat, Pertanian, dan Kedokteran Hewan.¹⁷

Terlepas dari perdebatan mengenai jabatan Mr. Assaat apakah layak disebut presiden atau tidak, tokoh ini telah berperan penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sudah seharusnya sejarah menghargai jasa-jasanya. Dan sudah seharusnya pula Mr. Assaat dikenal luas oleh para sejarawan maupun yang mempunyai minat terhadap sejarah pada khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Peranan Mr. Assaat sebagai Pemangku Jabatan Presiden Republik Indonesia pada masa RIS menjadi penting untuk dikaji. Republik Indonesia saat itu adalah sebuah negara berdaulat meskipun merupakan negara bagian dari RIS. Jika saja jabatan presiden tidak

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Ginandjar Kartasasmita, dkk, *op.cit.*, hlm. 99.

¹⁷ *Ibid.*

diisi maka akan terjadi kekosongan kekuasaan yang bisa berbahaya bagi sebuah negara. Republik Indonesia bisa saja diintervensi oleh negara lain jika pemerintahan tidak segera diisi.

Menjadi tokoh yang berperan penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak lantas mengubah sifat Mr. Assaat. Beliau adalah tokoh yang dikenal sederhana dan bersahaja. Saat menjadi Ketua BPKNIP beliau setia menggunakan sepedanya untuk bekerja atau bahkan berjalan kaki dari rumah ke kantornya.¹⁸ Saat menjadi Pemangku Jabatan Presiden Republik Indonesia, beliau tidak mau dipanggil Paduka Yang Mulia, yang saat itu merupakan panggilan yang lazim kepada seorang pejabat tinggi. Beliau hanya meminta untuk dipanggil “Bung Presiden” saja.¹⁹

2. Pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia

Setelah dilantik menjadi Pemangku Jabatan Presiden Republik Indonesia, Mr. Assaat menyatakan bahwa kabinet baru untuk negara bagian Republik Indonesia belum bisa dibentuk apabila Wakil Presiden Mohammad Hatta masih berada di Yogyakarta.²⁰ Setelah Wakil Presiden Mohammad Hatta meninggalkan Yogyakarta, barulah

¹⁸ Marthias Duski Pandoe. “Mr. Assaat Presiden RI ke-3”. Dalam Julius Pour (Ed). *Jernih Melihat Cermat Mencatat (Antologi Karya Jurnalistik Wartawan Senior Kompas)*. Jakarta: Kompas, 2000, hlm. 58.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ “Assaat menghendaki akan Parlementer Nasional Kabinet.” Surat Kabar *Merdeka* No. 1213 Tahun ke V, Edisi Senin 19 Desember 1949.

Kabinet Hatta²¹ demisioner dan harus segera dibentuk kabinet baru. Kabinet ini akan demisioner setelah terjadi penyerahan kedaulatan dari Republik Indonesia kepada RIS.²²

Kabinet Hatta kemudian mengadakan sidang sebelum demisioner. Dalam sidang tersebut, dibentuk sebuah kabinet peralihan sampai terbentuknya kabinet baru. Dipilihlah Susanto yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman sebagai Pemangku Sementara Jabatan Perdana Menteri dalam kabinet peralihan.

Guna membentuk kabinet negara bagian Republik Indonesia, Mr. Assaat mengadakan pertukaran pendapat bersama dengan wakil-wakil dari partai, organisasi, dan golongan yang ada pada saat itu.²³ Beliau kemudian menunjuk tiga orang formatur kabinet, yaitu Dr. Abdul Halim, Mr. Susanto Tirtoprodjo, dan Mohammad Natsir. Kabinet terbentuk pada 16 Januari 1950 dengan Dr. Abdul Halim sebagai perdana menterinya sehingga dinamakan Kabinet Halim.²⁴ Setelah Kabinet Halim dilantik, Kabinet Susanto dinyatakan demisioner.

²¹ Kabinet Hatta, dalam hal ini kabinet Hatta II adalah kabinet yang memerintah selama bulan Agustus sampai Desember 1949 dan berkedudukan di Yogyakarta. Selengkapnya lihat Bibit Suprpto, *op.cit.*, hlm. 95-102.

²² “Kabinet Republik Bersidang.” Surat Kabar *Merdeka* No. 1215 Tahun ke V, Edisi 21 Desember 1949.

²³ “Kabinet Parlementer Nasional segera dibentuk.” Surat Kabar *Kedaulatan Rakyat* No 3 Tahun ke VI Edisi Kamis, 6 Januari 1950.

²⁴ Bibit Suprpto. *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 119.

Usaha pembentukan Kabinet Halim ini menurut Mr. Assaat mengalami beberapa kesulitan. Hal ini karena beragamnya partai politik, golongan maupun organisasi yang ada. Akan tetapi menurut beliau, kesulitan-kesulitan tersebut dapat diatasi karena kabinet ini akhirnya dapat terbentuk dengan mencerminkan keinginan partai, golongan dan organisasi yang ada meskipun tidak semuanya dapat duduk dalam kabinet mengingat terbatasnya kursi yang tersedia.

Program kerja Kabinet Halim ini diantaranya menyelenggarakan supaya pemindahan kekuasaan ke tangan bangsa Indonesia di seluruh Indonesia terjadi dengan seksama, menyelenggarakan ketentraman umum supaya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya terjamin berlakunya hak-hak demokrasi dan terlaksananya dasar-dasar hak manusia dan kemerdekaannya. Melalui program kerja kabinet ini, pemerintah Republik Indonesia berusaha menyatukan kembali seluruh wilayah Indonesia ke dalam naungan negara kesatuan Republik Indonesia.

Setelah kabinet terbentuk, selanjutnya ditetapkan bahwa lembaga perwakilan dalam negara bagian ini adalah anggota-anggota KNIP. Negara bagian Republik Indonesia juga memberlakukan Maklumat No. X sebagai dasar terbentuknya BPKNIP.²⁵ Birokrasi pemerintah dalam negeri diatur berdasarkan Undang-undang yang berlaku yaitu UUD 1945.

²⁵ Saldi Isra, *op.cit.*, hlm. 116.

UUD 1945 yang diberlakukan di negara Republik Indonesia tidak sepenuhnya berjalan secara murni. Di dalam UUD 1945 sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem pemerintahan presidensial yang hanya mengenal presiden dan wakil presiden saja. Hal ini bertentangan dengan kenyataan yang ada di dalam pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta ini dimana kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri yaitu Halim, sementara Mr. Assaat sebagai kepala negara. Hal inilah yang menjadikan pemerintahan Republik Indonesia berusaha mengembalikan bentuk negara kesatuan dengan memasukkan usaha tersebut ke dalam program Kabinet Halim.

Selama pemerintahan Mr. Assaat, pemerintahan Republik Indonesia berjalan dengan baik dan lancar, meskipun tidak sesuai sepenuhnya dengan UUD 1945. Praktek korupsi tidak meluas seperti di negara-negara bagian lain.²⁶ Program kabinet untuk mendemokratisir kehidupan politik dan pemerintah dapat dikatakan berhasil karena terjaminnya hukum dan pemerintahan. Hal ini membuat prestise pemerintahan Republik Indonesia menjadi naik. Banyak pejabat dari negara-negara bagian lain yang lebih berkiblat pada RI pimpinan Mr. Assaat daripada RIS pimpinan Soekarno-Hatta.²⁷ Masyarakat dalam negara-negara bagian RIS juga

²⁶ A. Kardiya Wiharyanto. *Sejarah Indonesia dari Proklamasi sampai Pemilu 2009*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2011, hlm. 73.

²⁷ *Ibid.*

menganggap bahwa Republik Indonesia adalah cerminan jiwa proklamasi dan UUD 1945 yang menghendaki negara kesatuan.

3. Pembangunan Masjid Syuhada

Saat menjabat sebagai Pemangku Jabatan Presiden Republik Indonesia, Mr. Assaat mengusulkan untuk membangun sebuah masjid sebagai kenang-kenangan atas perjuangan rakyat Yogyakarta dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa rakyat Yogyakarta mempunyai peranan yang besar terhadap perjuangan mencapai dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Banyak rakyat Yogyakarta yang gugur dalam medan pertempuran memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Atas dasar itulah, Mr. Assaat mengusulkan untuk mendirikan sebuah masjid. Selain sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat Yogyakarta atas keikutsertaannya memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan, juga untuk memenuhi kebutuhan tempat ibadah di wilayah tersebut. Pada saat itu, tempat ibadah untuk umum masih sangat jarang ada di Yogyakarta sehingga masyarakat terpaksa melaksanakan ibadah di halaman gereja Kristen yang ada waktu itu.²⁸

²⁸ Olivia Lewi. 2012. *Masjid Syuhada Yogyakarta, Perpaduan Nasionalisme dan Nilai Islami*. Tersedia pada <http://nationalgeographic.co.id/berita/2012/07/masjid-syuhada-yogyakarta-perpaduan-nasionalisme-dan-nilai-islami>. Diakses pada 26 Maret 2015.

Pembangunan masjid ini selesai pada tahun 1952.²⁹ Masjid ini kemudian dinamai Masjid Syuhada, yang dalam Bahasa Indonesia berarti orang-orang yang meninggal secara syahid atau meninggal dalam rangka membela agama. Masjid ini terletak di Jalan I Dewa Nyoman Oka No 13, Kotabaru, Yogyakarta dan berdiri tegak di tengah-tengah Kotabaru.

C. Kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia

Bentuk negara federal bukanlah bentuk negara yang dikehendaki bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia menghendaki bentuk negara kesatuan sesuai dengan jiwa proklamasi dan UUD 1945. Bangsa Indonesia menganggap bentuk negara federal merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda yang masih ingin menguasai kembali bekas tanah jajahannya.

Banyak masyarakat yang tidak setuju dan menentang berdirinya RIS dan menuntut kembali ke bentuk negara kesatuan. Keinginan masyarakat Indonesia tersebut sangat besar dan mengakibatkan terjadinya demonstrasi dimana-mana. Masyarakat menuntut dibubarkannya negara federal dan meleburkan diri ke dalam Republik Indonesia.

Banyak negara boneka bentukan Belanda yang kemudian membubarkan diri dan melebur bersama Republik Indonesia pimpinan Mr.

²⁹ Tanpa Penulis. (2014). *Masjid Syuhada*. Tersedia pada <http://simbi.kemenag.go.id/simas/index.php/profil/masjid/500/>. Diakses pada 26 Maret 2015.

Assaat. Beberapa negara bagian tersebut diantaranya Negara Kalimantan Timur, Negara Sumatera Selatan, Pasundan, Bangka dan Belitung, dan lain-lain.³⁰ Hanya dalam waktu beberapa bulan saja, RIS hanya tinggal tiga negara bagian, yaitu Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera Timur, dan Republik Indonesia sendiri.³¹ Hal ini menjadi salah satu bukti awal keberhasilan pemerintah Republik Indonesia untuk mengembalikan negara RIS ke negara kesatuan.

Pemerintah Republik Indonesia berupaya mengintegrasikan daerah-daerahnya secara birokratis dengan membentuk provinsi-provinsi dan daerah-daerah administratif baik di wilayahnya sendiri maupun di wilayah negara bagian yang menggabungkan diri.³² Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk mengembalikan RIS ke negara kesatuan. Di Jawa, dibentuk Provinsi Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta setingkat provinsi, Provinsi Jawa Tengah, dan Jawa Barat.³³ Di Sumatera dibentuk Provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Tengah dan Sumatera Utara. Di Kalimantan dibentuk daerah otonom Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Di setiap provinsi dibentuk kabupaten dan kota besar maupun kecil.

³⁰ Bibit Suprpto, *op.cit.*, hlm. 122.

³¹ Ginandjar Kartasasmita, *op.cit.*, hlm. 331.

³² J. Suwarno. *Hamengkubuwono IX dan Sistem Demokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974 Sebuah Tinjauan Historis*. Yogyakarta: Kanisius, 1994, hlm. 282.

³³ *Ibid.*

Melihat banyaknya tuntutan dari masyarakat untuk kembali ke bentuk negara kesatuan, maka para pemimpin negara kemudian mengadakan perundingan. Perundingan awal sebagai usaha untuk kembali ke negara kesatuan dilakukan antara RIS, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur. RIS diwakili Perdana Menteri Hatta, Negara Indonesia Timur diwakili Sukawati, dan Negara Sumatera Timur diwakili Mansur.³⁴ Hasil perundingan ini adalah kesepakatan untuk kembali ke NKRI melalui penggabungan dengan RIS, bukan meleburkan diri dengan Republik Indonesia sebagai salah satu negara bagian dalam RIS.

Perundingan selanjutnya dilakukan antara pemerintah RIS mewakili Negara Indonesia Timur dan Sumatera Timur dengan pemerintah Republik Indonesia dengan diwakili Perdana Menteri Halim. Perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk melaksanakan negara kesatuan sesuai jiwa proklamasi dan menentukan Undang-Undang Dasar Sementara dengan mengubah konstitusi RIS.

KNIP dijadikan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia untuk sementara dan ditambah dengan anggota dari DPR RIS. BPKNIP dalam sidangnya tanggal 12 Agustus 1950 menerima rancangan UUD Sementara yang telah dirumuskan.³⁵ UUD Sementara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950. Sistem pemerintahan yang dianut

³⁴ Aman, *op.cit.*, hlm. 59.

³⁵ Saldi Isra, *op.cit.*, hlm. 125.

adalah sistem pemerintahan parlementer sama seperti sistem pemerintahan RIS.

Tanggal 14 Agustus 1950, RIS menetapkan Undang-Undang No 20 tahun 1950 tentang pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁶ Keesokan harinya dilakukan upacara penyerahan mandat dari Pemangku Jabatan Presiden Republik Indonesia Mr. Assaat kepada Presiden Soekarno.³⁷ Presiden Soekarno menyatakan terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia Di depan sidang BPKNIP tersebut.³⁸ Setelah itu, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dilantik sebagai kepala negara Republik Indonesia. Pelantikan ini menandakan UUD 1945 kembali dilaksanakan secara murni dimana pemerintahan dipegang oleh presiden dan wakil presiden.

Bersamaan dengan bubarnya RIS, Perdana Menteri Halim juga mengembalikan mandatnya kepada Mr. Assaat. Sejak pengembalian mandat ini, maka Kabinet Republik Indonesia pimpinan Perdana Menteri Halim telah demisioner. Kabinet selanjutnya dipimpin oleh Kabinet Natsir sebagai kabinet pertama setelah Indonesia kembali ke NKRI.

Sejak RIS dinyatakan bubar, jabatan Mr. Assaat selaku Pemangku Jabatan Presiden Republik Indonesia telah berakhir. Beliau kemudian

³⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Sejarah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Depdikbud, 1997, hlm. 356.

³⁷ A. Dahana, dkk, *Indonesia dalam Arus Sejarah 7*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2012, hlm. 23.

³⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *loc.cit.*

menjadi anggota dalam lembaga perwakilan rakyat saat itu. Amanat yang diembannya untuk memangku Jabatan Presiden Republik Indonesia telah selesai dan usahanya untuk mengembalikan bentuk negara kesatuan Indonesia telah berhasil.

Sejak saat itu berakhirilah riwayat RIS yang hanya bisa bertahan selama 8 bulan saja. Sejak tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keinginan bangsa Indonesia untuk kembali ke bentuk negara kesatuan sangat besar sehingga banyak negara-negara bagian yang membubarkan diri dan bergabung dengan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia saat itu telah memiliki rasa persatuan yang tinggi meskipun mereka adalah bangsa yang heterogen atau berbeda-beda. Mereka bisa bersatu dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia meskipun mempunyai latar belakang suku, agama, ras, dan golongan yang berbeda.

Peranan Mr. Assaat disini menjadi penting karena jika dirunut ke belakang, Republik Indonesia di Yogyakarta ini merupakan cerminan negara Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, sedangkan RIS adalah negara federal yang dibentuk oleh Belanda yang mau tidak mau harus disetujui oleh delegasi Indonesia dalam KMB. Mr. Assaat adalah tokoh yang menghendaki bentuk negara kesatuan dan pelaksanaan UUD 1945 secara murni sehingga beliau berusaha untuk mengembalikan bentuk negara kesatuan dan menghendaki Soekarno-Hatta tetap menjadi

presiden dan wakil presiden, meskipun beliau harus melepaskan jabatannya sebagai Pemangku Jabatan Presiden Republik Indonesia.

D. Menteri Dalam Negeri Kabinet Natsir

Negara Indonesia telah kembali ke bentuknya semula yaitu negara kesatuan, setelah selama kurang lebih delapan bulan Republik Indonesia Serikat berdiri. Bentuk federal bukanlah bentuk negara yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia membuat rakyat lebih menghendaki bentuk negara kesatuan, supaya tidak terjadi perpecahan antar masyarakat.

Bergabungnya kembali negara-negara bagian dalam RIS ke dalam Republik Indonesia, berarti juga berakhirnya jabatan Presiden Republik Indonesia yang dipegang oleh Mr. Assaat. Setelah persetujuan antara perwakilan RIS dan RI, maka Mr. Assaat mengembalikan mandatnya sebagai Pemangku Jabatan Presiden Republik Indonesia kepada Soekarno. Sejak saat itu, susunan negara serikat berubah menjadi negara kesatuan, dimana Soekarno tetap menjadi presiden dengan wakilnya Mohammad Hatta.

Sistem pemerintahan Republik Indonesia setelah kembali ke bentuk kesatuan yaitu sistem pemerintahan liberal. Terhitung sejak tahun 1950, terjadi pergantian kabinet berkali-kali, bahkan hampir setiap tahun. Hal ini salah satunya disebabkan karena kebebasan membentuk partai. Peraturan

pembebasan membuat partai ini dikeluarkan oleh pemerintah atas usul BPKNIP yang disebut Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945.³⁹

Demokrasi yang dianut dalam sistem pemerintahan liberal ini adalah demokrasi liberal.⁴⁰ Hal ini kemudian berakibat buruk ketika para wakil-wakil partai duduk dalam kabinet. Karena begitu banyaknya partai dalam kabinet, maka dominasi satu atau dua partai menjadi tidak ada. Hal ini kemudian menyebabkan rawan terjadi konflik dalam kabinet.

Parlemen dapat sewaktu-waktu menjatuhkan kabinet yang sedang berkuasa tersebut. Parlemen kemudian membentuk kabinet baru dengan menunjuk Perdana Menteri. Perdana Menteri tersebut kemudian membentuk kembali kabinet yang baru secara bebas. Begitu seterusnya hingga jatuh bangun kabinet ini selesai dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.⁴¹

Salah satu kabinet yang pernah memerintah adalah Kabinet Natsir dengan Perdana Menterinya Muhammad Natsir. Kabinet Natsir menjabat

³⁹ Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945, selengkapnya lihat: Soebadio Sastrosatomo. *Perjuangan Revolusi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987, hlm. 176.

⁴⁰ Demokrasi liberal adalah demokrasi yang mengutamakan kebebasan individu, kepentingan individu dan hak-hak asasi setiap warga negaranya. Demokrasi liberal menganut sistem politik dengan banyak partai. Artinya warga negara diberi kebebasan untuk membentuk partai-partai. Lihat Soehino. *Hukum Tatanegara Sistem Pemerintahan Negara*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1993, hlm. 57.

⁴¹ Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno berisi mengenai pembubaran Konstituante, berlakunya kembali UUD 1945 dan dibentuknya MPRS dan DPAS. Dekrit ini dikeluarkan karena kondisi politik yang tidak stabil akibat gagalnya Badan Konstituante dalam menjalankan tugasnya yaitu membuat undang-undang. Lihat Aman, *op.cit.*, hlm. 70.

selama satu kali periode dari tahun 1950-1951. Kabinet ini adalah kabinet parlementer pertama yang terbentuk setelah Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Begitu Kabinet RIS demisioner, kabinet ini mulai menjalankan programnya.

Presiden Soekarno menunjuk Muhammad Natsir sebagai formatur kabinet pada 22 Agustus 1950.⁴² Tanggal 6 September 1950, kabinet ini diresmikan melalui Keputusan Presiden No. 9 Tahun 1950.⁴³ Keesokan harinya, kabinet ini dilantik oleh Presiden Soekarno. Kabinet ini terdiri dari satu orang wakil perdana menteri, 15 kementerian dan satu orang menteri negara.⁴⁴

Salah satu program dari Kabinet Natsir adalah mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk konstituante dalam waktu singkat.⁴⁵ Program ini tidak dapat terlaksana karena pemilihan umum baru dapat terlaksana pada tahun 1955 pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Meskipun begitu, Kabinet Natsir juga mencapai beberapa keberhasilan. Salah satu keberhasilan dari Kabinet Natsir adalah Indonesia

⁴² Bibit Suprpto. *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 126.

⁴³ P.N.H. Simanjuntak. *Kabinet-Kabinet Republik Indonesia Dari Awal Kemerdekaan sampai Proklamasi*. Jakarta: Djambatan, 2003, hlm. 110.

⁴⁴ Lihat susunan lengkap personalia Kabinet Natsir dalam *Ibid.*, hlm. 111.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 112.

berhasil masuk menjadi anggota PBB pada 27 Desember 1950 sebagai anggota ke-60.⁴⁶

Mr. Assaat menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Natsir ini. Mr. Assaat saat itu bukanlah wakil dari partai manapun, akan tetapi beliau sudah memiliki banyak pengalaman dalam bidang politik sehingga dapat menduduki jabatan sebagai Menteri Dalam Negeri. Hal inilah yang mendasari Mohammad Natsir sebagai formatur kabinet dalam memilih Mr. Assaat sebagai menteri dalam kabinetnya.

Sebagai Menteri Dalam Negeri, Mr. Assaat ikut menangani masalah-masalah yang terjadi di Indonesia, salah satunya di Aceh. Masyarakat Aceh merasa tidak terima ketika Aceh digabungkan dalam Provinsi Sumatera Utara. Sebelumnya pada Desember 1949, melalui Maklumat Wakil Perdana Menteri Sjafruddin Prawiranegara pada masa Kabinet Hatta II mendirikan Provinsi Aceh secara terpisah.⁴⁷

Berturut-turut, Sjafruddin, Mr. Assaat, Hatta, dan Natsir mengunjungi daerah tersebut untuk meyakinkan PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) pimpinan Daud Beureuh.⁴⁸ Mereka merasa khawatir apabila keinginan Aceh untuk dijadikan provinsi tersendiri, akan merambat ke

⁴⁶ Bibit Suprpto, *op.cit.*, hlm. 128.

⁴⁷ Kahin, Audrey. "Rebellion to Integration, West Sumatera and the Indonesian Polity 1926-1998." a.b. Azmi dan Zulfahmi. *Dari Pemberontakan ke Integrasi, Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008, hlm. 260.

⁴⁸ *Ibid.*

daerah-daerah lain menuntut hal yang sama. Pada akhirnya, masalah ini dapat diselesaikan.

Masalah di Sumatera belum selesai sampai di situ. Di Sumatera Tengah terjadi masalah mengenai gubernur baru, yaitu Nasrun yang tidak seefektif pendahulunya. Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Tengah (DPRST) membuat mosi menuntut penggantian Nasrun.⁴⁹ Sebulan setelah pelantikan kabinet, Mr. Assaat mendatangi Sumatera Tengah untuk membicarakan masalah tersebut.

Kabinet Natsir menolak calon yang diberikan oleh DPRST dan mengangkat Roeslan Moeljohardjo sebagai Pejabat Gubernur Sumatera Tengah. Karena DPRST menolak, Kabinet Natsir kemudian mengesahkan UU No 1 Tahun 1951 khusus untuk Sumatera Tengah yang membekukan DPRD dan mengangkat kembali Roeslan.⁵⁰ Penguasa setempat terpaksa menerimanya, tetapi tetap menuntut pengaktifan kembali DPRST. Masalah ini tidak selesai sampai Kabinet Natsir demisioner dan digantikan Kabinet Sukiman.

Salah satu sebab dibubarkannya Kabinet Natsir adalah masalah mosi Hadikusumo. Hadikusumo dari PNI meminta dicabutnya PP No. 39 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintahan di Jawa dan Sumatera.⁵¹ Hadikusumo menuntut

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 261.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 263.

⁵¹ P.N.H. Simanjuntak, *op.cit.*, hlm. 114.

untuk segera mengganti peraturan tersebut dengan peraturan yang lebih demokratis dan membubarkan DPRD yang telah terbentuk berdasarkan peraturan tersebut.

Menteri Dalam Negeri Mr. Assaat tidak menyetujui pencabutan PP tersebut dan membubarkan lembaga perwakilan yang sudah terbentuk. Mr. Assaat hanya setuju untuk mengadakan beberapa perubahan dalam peraturan tersebut dan membuat undang-undang yang baru. Guna mengatasi masalah ini, parlemen mengadakan pemungutan suara dan hasilnya 76 suara setuju, 46 menolak dan satu blangko atau tidak memberikan suara.⁵²

Dengan disetujuinya mosi tersebut, Mr. Assaat kemudian berhenti dari jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri. Pada 23 Januari 1951, Mr. Assaat secara resmi mengajukan pengunduran diri akan tetapi ditolak oleh kabinet.⁵³ Hal ini karena pendirian Mr. Assaat sama dengan pendirian pemerintah Natsir keseluruhan. Kabinet Natsir akhirnya menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden Soekarno dan demisioner pada 21 Maret 1951.⁵⁴

Setelah tidak lagi menjabat dalam Kabinet Natsir, nama Mr. Assaat tidak terlihat lagi dalam dunia perpolitikan Indonesia saat itu. Pada tahun 1955, Mr. Assaat sempat ditunjuk oleh Mohammad Hatta untuk

⁵² *Ibid.*, hlm. 115.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Bibit Suprpto, *op.cit.*, hlm. 133.

membentuk kabinet baru menggantikan Kabinet Sukiman yang memerintah dari tahun 1951-1952 bersama Sukiman dan Wilopo.⁵⁵ Usaha ketiga formatur tersebut menemui kegagalan sehingga Mohammad Hatta menunjuk Burhanuddin Harahap sebagai formatur, kemudian terbentuklah Kabinet Burhanuddin Harahap.

Sejak saat itu, Mr. Assaat tidak berkecimpung lagi dalam dunia politik Indonesia. Mr. Assaat lebih banyak bergerak dalam bidang perekonomian. Mr. Assaat juga sempat terlibat dalam gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia bersama Sjafruddin Prawiranegara sehingga membuatnya ditangkap dan ditahan selama beberapa tahun.⁵⁶

Nama Mr. Assaat belum banyak dikenal di kalangan masyarakat Indonesia pada umumnya. Peranannya dalam ikut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga belum banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Nama Mr. Assaat bahkan belum dicatat sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia, padahal perjuangannya untuk bangsa Indonesia tidak bisa dikatakan kecil.

Baru pada tahun 2009 lalu, oleh Yayasan Serikat Oesaha Adabiah Sumatera Barat, tempat Mr. Assaat memulai pendidikannya, nama Mr.

⁵⁵ G. Moedjanto. *Indonesia Abad ke-20 Jilid 2*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1988, hlm. 93.

⁵⁶ Erwin Moechtar, *op.cit.*

Assaat akan diusulkan untuk dijadikan pahlawan nasional.⁵⁷ Usul ini telah disampaikan kepada pemerintah pusat untuk dibahas lebih lanjut.⁵⁸

Usul mengenai pengangkatan Mr. Assaat sebagai pahlawan nasional ini menjadi penting. Hal tersebut mengingat peranannya yang begitu besar dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jika pada akhirnya Mr. Assaat terlibat PRRI, hal itu menjadi masalah lain yang seharusnya tidak mengaburkan peranan Mr. Assaat sebelumnya.

⁵⁷ Tanpa Penulis. 2009. *Mr. Assaat Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional*. Tersedia pada <http://m.kompas.com/properti/read/2009/09/01/01032786/mr..assaate.diusulkan>. Diakses pada 9 April 2015.

⁵⁸ *Ibid.*

BAB V

KESIMPULAN

Mr. Assaat adalah salah satu tokoh Indonesia berdarah Minangkabau. Beliau dilahirkan di Kampung Pincuran Landai, Kanagarian Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Agam, Sumatera Barat, pada tanggal 18 September 1904. Mr. Assaat mempunyai gelar Datuk Mudo di belakang namanya. Gelar Datuk adalah gelar yang disandang oleh seorang penghulu dalam adat Minangkabau. Mr. Assaat meninggal pada 16 Juni 1976 pada usia 71 tahun di Rumah Sakit Ciptomangunkusumo. Pemakamannya dihormati dengan upacara kebesaran militer diikuti oleh keluarga, teman seperjuangan dan sahabat-sahabatnya.

Mr. Assaat memulai pendidikannya di sekolah agama swasta Adabiah di Padang kemudian melanjutkan ke MULO Padang lalu ke STOVIA di Jakarta. Merasa jiwanya tidak terpanggil menjadi seorang dokter, Mr. Assaat kemudian meninggalkan STOVIA dan masuk ke AMS. Beliau kemudian melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Hakim Tinggi di Jakarta. Di sekolah ini, Mr. Assaat tidak diluluskan oleh profesornya karena ikut terlibat organisasi politik saat itu, sehingga beliau memilih meninggalkan Indonesia dan pergi ke Belanda untuk mengenyam pendidikan. Mr. Assaat kemudian memperoleh gelar *Meester in de rechten* (Mr), atau sarjana hukum dari Universitas Leiden di Belanda.

Mr. Assaat memulai karir dalam bidang politik melalui organisasi *Jong Sumatranen Bond*, yang kemudian diubah menjadi Pemuda Sumatera. Mr. Assaat juga pernah menjabat sebagai anggota Pengurus Besar Perhimpunan Pemuda Indonesia. Setelah organisasi-organisasi kepemudaan waktu itu meleburkan diri

menjadi Indonesia Muda, Mr. Assaat menjabat sebagai Bendahara I dalam Komisi Besar Indonesia Muda. Mr. Assaat kemudian tergabung dalam Partindo bersama tokoh-tokoh lain seperti Sartono, A.K. Gani, Adam Malik, Amir Syarifuddin, dan lain-lain.

Tahun 1945, Mr. Assaat masuk menjadi salah satu anggota KNIP. Tahun 1946, dan berturut-turut sampai tahun 1949 terpilih sebagai Ketua BPKNIP. Pada masa kepemimpinannya, BPKNIP mengeluarkan dua buah resolusi. Resolusi pertama berisi tentang pengakuan atas hak yang sepenuhnya untuk menentukan nasib dan bentuk pemerintahan sendiri berdasarkan demokrasi. Resolusi II berisi mengenai usul kepada presiden untuk mengadakan tindakan untuk memperbaiki susunan pemerintah maupun KNIP.

BPKNIP juga ikut serta dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh Indonesia yang baru saja merdeka, baik masalah dari dalam maupun dari luar. Antara lain menangani masalah pemberontakan dalam negeri maupun menghadapi serangan-serangan dari Belanda seperti Agresi Militer I dan II. Kinerja lembaga tersebut pada kurun waktu tahun 1947-1948 lebih difokuskan pada masalah-masalah perang maupun pemberontakan. Akibatnya pada tahun 1948 KNIP tidak mengadakan sidang pleno sama sekali karena situasi negara yang diliputi peperangan.

Keikutsertaan Mr. Assaat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia membuatnya ikut ditangkap dan diasingkan oleh Belanda bersama pemimpin-pemimpin bangsa lainnya. Saat itu, akhir tahun 1948, tentara Belanda mendarat di Yogyakarta. Mereka melancarkan serangan yang dikenal sebagai Agresi Militer

Belanda II. Presiden, wakil presiden, dan beberapa pejabat tinggi negara, termasuk Mr. Assaat ditawan dan diasingkan oleh Belanda. Para tokoh tersebut ditangkap saat sedang menghadiri sidang kabinet di Istana Kepresidenan Yogyakarta. Mr. Assaat bersama beberapa pemimpin bangsa lainnya diasingkan ke Bangka. Mereka baru dibebaskan setelah ditandatangani Persetujuan Roem-Royen antara Indonesia dan Belanda.

Tahun 1949, sebagai dampak dari hasil Konferensi Meja Bundar, Indonesia berubah menjadi negara federal dengan nama Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia sendiri hanya menjadi negara bagian dalam federasi tersebut. Saat Presiden Soekarno terpilih sebagai Presiden RIS, maka kemudian ditunjuklah Mr. Assaat yang saat itu menjabat sebagai Ketua BPKNIP sebagai Pemangku Jabatan Presiden Republik Indonesia. Selama pemerintahan Mr. Assaat, pemerintahan Republik Indonesia berjalan dengan baik dan lancar.

Saat menjabat sebagai Pemangku Jabatan Presiden Republik Indonesia, Mr. Assaat mengusulkan untuk membangun sebuah masjid sebagai kenang-kenangan atas perjuangan rakyat Yogyakarta dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Masjid ini kemudian dinamai Masjid Syuhada, yang dalam Bahasa Indonesia berarti orang-orang yang meninggal secara syahid atau meninggal dalam rangka membela agama. Masjid ini terletak di Jalan I Dewa Nyoman Oka No 13, Kotabaru, Yogyakarta.

Tidak lama setelah RIS terbentuk, masyarakat menuntut untuk membubarkannya dan kembali ke bentuk negara kesatuan. Keinginan mereka diwujudkan dengan melakukan demonstrasi besar-besaran menuntut

dibubarkannya RIS. Banyak negara bagian yang kemudian meleburkan diri dalam negara Republik Indonesia pimpinan Mr. Assaat.

Melihat banyaknya tuntutan dari masyarakat untuk kembali ke bentuk negara kesatuan, maka para pemimpin negara kemudian mengadakan perundingan. Setelah melalui berbagai perundingan, dicapai kesepakatan bahwa Indonesia akan kembali ke bentuk negara kesatuan sesuai dengan jiwa UUD dan Proklamasi 1945. Tanggal 15 Agustus 1950 dilakukan upacara penyerahan mandat dari Pemangku Jabatan Presiden Republik Indonesia Mr. Assaat kepada Presiden Soekarno. Presiden Soekarno menyatakan terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak saat itu, jabatan Mr. Assaat selaku Pemangku Jabatan Presiden Republik Indonesia telah berakhir. Beliau kemudian menjadi anggota dalam lembaga perwakilan rakyat saat itu.

Mr. Assaat kemudian menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Kabinet Natsir. Saat memegang jabatan ini, Mr. Assaat berusaha menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam negeri. Diantaranya adalah masalah di Aceh maupun Sumatera Tengah. Mr. Assaat mengundurkan diri sebagai Menteri Dalam Negeri setelah parlemen menyetujui pencabutan PP (Peraturan Pemerintah) No. 39 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintahan di Jawa dan Sumatera. Mr. Assaat kemudian kembali menjadi anggota legislatif. Pada tahun 1955, nama Mr. Assaat muncul kembali saat ditunjuk oleh Mohammad Hatta untuk membentuk kabinet baru menggantikan Kabinet Sukiman. Setelah itu Mr. Assaat tidak berkecimpung lagi dalam dunia politik. Beliau lebih banyak berkecimpung dalam perekonomian. Mr.

Assaat juga sempat terlibat dalam gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia bersama Sjafruddin Prawiranegara sehingga membuatnya ditangkap dan ditahan selama beberapa tahun. Nama Mr. Assaat baru diusulkan menjadi pahlawan nasional pada tahun 2009 oleh Yayasan Serikat Oesaha Adabiah Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip:

Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia, Sekretariat Negara No 151, Yogyakarta, 29 Desember 1946, Peraturan Presiden No 6 Tahun 1946. (Milik Nova Sugiyanti, Pendidikan Sejarah Reguler 2011)

Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia, Sekretariat Negara No 155, Jakarta, 1945, Penetapan PPKI dalam Pembentukan KNIP. (Milik Nova Sugiyanti, Pendidikan Sejarah Reguler 2011)

Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia, Sekretariat Negara No 168, Yogyakarta, 5 Desember 1949 Undang-Undang No 7 Tahun 1949 tentang Penunjukkan Pemangku Jabatan Presiden. (Milik Nova Sugiyanti, Pendidikan Sejarah Reguler 2011)

Buku:

A. Dahana, dkk. (2012). *Indonesia dalam Arus Sejarah 7*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

A.B. Lopian, dkk. (2012). *Indonesia dalam Arus Sejarah 5*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

A.G. Pringgodigdo. (1969). *Perubahan Kabinet Presidensiil Mendjadi Kabinet Parlementer*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

A.H. Nasution. (1978). *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 7 Periode Renville*. Bandung: Disjarah-AD dan Penerbit Angkasa.

_____ (1978). *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 8 Agresi Militer Belanda I*. Bandung: Disjarah-AD dan Penerbit Angkasa.

_____ (1979). *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 11 Periode Konferensi Meja Bundar*. Bandung: Disjarah-AD dan Penerbit Angkasa.

A. Kardiyat Wiharyanto. (2011). *Sejarah Indonesia dari Proklamasi sampai Pemilu 2009*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Abd Rahman Hamid, Muhammad Saleh Majid. (2011). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.

Aman. (2013). *Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan*. Yogyakarta: Pujangga Press.

- Amrin Imran, dkk. (2012). *Indonesia dalam Arus Sejarah 6*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Assaat. (1947). *Hukum Tata Negara Republik Indonesia dalam Masa Peralihan*. Yogyakarta: Badan Penerbit Nasional.
- B.N. Marbun. (1992). *DPR-RI: Pertumbuhan dan Cara Kerjanya*. Jakarta: Gramedia.
- Bibit Suprpto. (1985). *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (1997). *Sejarah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Depdikbud.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia.
- G. Moedjanto. (1988). *Indonesia Abad ke-20 1*. Yogyakarta: Kanisius.
- G. Moedjanto. (1988). *Indonesia Abad ke-20 2*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ginandjar Kartasasmita, dkk. (1995). *30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1955*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Graves, Elizabeth E. (2007). "The Minangkabau Response to Dutch Colonial Rule Nineteenth Century." a.b. Novi Andri, Leni Marlina, dan Nurasni. *Asal-Usul Elite Minangkabau Modern Respons terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/XX*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gusti Asnan. (2007). *Memikir Ulang Regionalisme Sumatera Barat Tahun 1950-an*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Helius Sjamsuddin. (2012). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Ismail Suny. (1986). *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*. Jakarta: Aksara Baru.
- Jimly Asshiddiqie. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kahin, Audrey. (2008). "Rebellion to Integration, West Sumatra and Indonesia Polity 1926-1998." a.b. Azmi dan Zulfahmi. *Dari Pemberontakan ke Integrasi, Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Kansil. (1983). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Kuntowijoyo. (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Pustaka.
- M.C. Ricklefs. (1991). *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. (1993). *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Miriam Budiardjo. (1977). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Miriam Budiardjo. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Prima Grafika.
- Moh. Kusnardi dan Bintan R Saragih. (1983). *Susunan Pembagian Kekuasaan menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Gramedia.
- Mohamad Roem. (1972). *Bunga Rampai dari Sejarah*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.
- P.J. Suwarno. (1994). *Hamengkubuwono IX dan Sistem Demokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974 Sebuah Tinjauan Historis*. Yogyakarta: Kanisius.
- P.N.H. Simanjuntak. (2003). *Kabinet-kabinet Republik Indonesia dari Awal Kemerdekaan sampai Reformasi*. Jakarta: Djambatan.
- Redaksi Sinar Grafika. (1990). *Tiga Undang-Undang Dasar: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1950, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saldi Isra. (2010). *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlemen dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Samsul Wahidin. (1986). *MPR RI dari Masa ke Masa*. Jakarta: Bina Aksara.
- Soebadio Sastrosatomo. (1987). *Perjuangan Revolusi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Soehino. (1993). *Hukum Tata Negara Sistem Pemerintahan Negara*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Soerjono Soekanto. (2010). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suhartono. (1994). *Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia. (2008). *Sejarah Nasional Indonesia V*. Jakarta: Balai Pustaka.

Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1982). *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sumatera Barat*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Tim Penyusun. (1988). *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Jakarta: Cipta Adi Pustaka.

Usman Raliby. (1953). *Documenta Historica*. Jakarta: Bulan Bintang.

Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah Jakarta. (1974). *45 Tahun Sumpah Pemuda*. Jakarta: Gunung Agung.

Artikel:

Bambang Purwanto. *Sejarawan Akademik dan Disorientasi Historiografi: Sebuah Otokritik*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Diucapkan dalam Rapat Terbuka Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada pada tanggal 28 September 2004 di Yogyakarta.

Fitri Puspa Sari, 2014, "Konferensi Asia di New Delhi 20-25 Januari 1949 (Bentuk Dukungan Negara-negara Asia kepada Indonesia Pasca Agresi Militer Belanda II), *Avatara*, Vol. 2, No. 1, hlm. 130-139.

Marthias Dusky Pandoe. (2010). "Mr. Assaat: Presiden RI ke-3". Dalam Julius Pour (Ed). *Jernih Melihat Cermat Mencatat (Antologi Karya Jurnalistik Wartawan Senior Kompas)*. Jakarta: Kompas, hlm. 54-59.

R. Maladi. *Perang Rakyat Semesta 1948-1949*. Seminar Revolusi Kepahlawanan dan Pembangunan Bangsa, Penyelenggara Museum Beteng Yogyakarta MSI Cabang Yogyakarta Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 16 November 1994.

Surat Kabar:

"Assaat menghendaki akan Parlementer Nasional Kabinet." Surat Kabar *Merdeka* No. 1213 Tahun ke V, Edisi Senin 19 Desember 1949.

"Assaat merasa berbahagia dapat menutup sidang ke-6." Surat Kabar *Merdeka* No. 1212 Tahun ke V, Edisi Sabtu 17 Desember 1949.

“Atjara Penjerahan di Jogjakarta.” Surat Kabar *Merdeka* No. 1219 Tahun ke V, Edisi Senin 26 Desember 1949.

“Kabinet Parleментар Nasional segera dibentuk.” Surat Kabar *Kedaulatan Rakyat* No 3 Tahun ke VI Edisi Kamis, 6 Januari 1950.

“KMB Diterima.” Surat Kabar *Kedaulatan Rakjat* Edisi Extra Terbit Siang, Rabu 14 Desember 1949.

“Penjerahan Kedaulatan Republik Indonesia kepada RIS.” Surat Kabar *Merdeka* No. 1221 Tahun ke V, Edisi Jumat 30 Desember 1949.

Internet:

Erwin Moechtar. (2004). *Mr. Assaat*. Tersedia pada <http://www.cimbuak.net/tokoh-minang/53-tokoh-minangkabau/204-tokoh-minang>. Diakses pada 13 Mei 2014.

Meisy Meidina Billem. (2014). *Mr. Assaat Mantan Presiden RI yang Tak Dicatat Sejarah*. Tersedia pada <http://geotimes.co.id/seni-budaya/seni-budaya-news/profil-tokoh/9472-mr-assaat--salah-satu-mantan-presiden-ri-yang-tak-dicatat-sejarah>. Diakses pada 18 November 2014.

Olivia Lewi. 2012. Masjid Syuhada Yogyakarta, Perpaduan Nasionalisme dan Nilai Islami. Tersedia pada <http://nationalgeographic.co.id/berita/2012/07/masjid-syuhada-yogyakarta-perpaduan-nasionalisme-dan-nilai-islami>. diakses pada 26 Maret 2015.

Tanpa Penulis. (2014). *Masjid Syuhada*. Tersedia pada <http://simbi.kemenag.go.id/simas/index.php/profil/masjid/500/>. Diakses pada 26 Maret 2015.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. Foto Mr. Assaat



Foto 1. Mr. Assaat (sumber: <http://tokohindonesia.com>)



Foto 2. Mr. Assaat bersama Presiden Soekarno dan A. Halim (Sumber: <http://aswlnazir.com>)

LAMPIRAN 2. Penetapan PPKI dalam Pembentukan KNIP

HIMPUNAN UNDANG - UNDANG
NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

1945 No.

KOMITE NASIONAL. PARTAI NASIONAL INDONESIA
BADAN PENOLONG KELOMAGA KORBAN PERANG.
BADAN KEAMANAN RAKJAT.

Penetapan Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia tentang pembentukan Komite
Nasional diselenggarakan Indonesia, gerakan
Partai Nasional Indonesia, Badan Penolong
Korban Perang, dan Badan Keamanan Rakjat.

Dalam rapat tanggal 22-8-1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia menetapkan soal-soal: Komite Nasional, Partai Nasional
Indonesia dan badan keamanan seperti berikut:

KOMITE NASIONAL.

1. Komite Nasional dibentuk diselenggarakan Indonesia dengan pusat
nya di Djakarta.
2. Komite Nasional adalah penjelmaan kebajikan toedjoeran dan
tjita-tjita Bangsa Indonesia untuk menjelenggarakan kemerdekaan
Indonesia, yang berdasarkan kedaulatan ra'jat.
3. O e s a n a Komite Nasional ialah:
 - a. Menjatakan keamanan ra'jat Indonesia untuk hidup sebagai
bangsa yang merdeka.
 - b. Mempersatukan ra'jat dari segala lapisan dan jabatan,
seperti terpadu pada segala tempat diselenggarakan Indonesia
persatuan kebangsaan yang beseat dan erat.
 - c. Membantu menenteramkan ra'jat dan toeroet menjaga kes-
lamatan oemoem.
 - d. Membantu pemimpin dalam menjelenggarakan tjita-tjita
Bangsa Indonesia, dan di daerah/membantu Pemerintah
daerah untuk kesejahteraan oemoem.
4. Komite Nasional dipusat memimpin dan memberi petoendjoek
kepada Komite-komite Nasional di daerah.
Dimana perlu, di daerah didirikan pusat daerah, jaitoe oen-
toek: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timor, Sumatera, Borneo,
Soelawesi, Maloeke, Soenda Ketjil.
5. Komite Nasional dipusat, dipusat daerah dan di daerah di-
pimpin oleh seorang ketua dan beberapa orang anggota pengoeroes,
yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional.
Pusat pertama kali ketua pusat daerah ditetapkan oleh Pe-
mimpin Besar Ir. Soekarno.

PARTAI NASIONAL INDONESIA.

1. Gerakan ini bernama Partai Nasional Indonesia, yang berke-
doedoean ditempat pengoeroes Besarnya.
2. T o e d j o e a n partai ialah: Negara Republik Indonesia
yang berdaulat, adil dan makmur, berdasarkan kedaulatan Rakjat.
3. O e s a n a untuk menjapai toedjoeran itoe ialah:
 - a. Memperkuat persatuan Bangsa dan Negara.
 - b. Memperbesar rasa tjinta, setia dan bakti kepada Tanah Air.
 - c. Mengiciarkan program ekonomi dan sosial seperti dibawah
ini:
 1. Perekonomian diselenggarakan sebagai oesana bersama berdasar
atas azas gotong-rojong.
 2. Tjabang-tjabang produksi yang penting bagi negara dan
yang mengoedasi hadjat hidup orang banyak dikuasai
oleh negara.
 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di-
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergoedakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakjat.

- 2 -

4. Fakir-miskin dan anak-anak yang telantar dipelihara oleh negara.
5. Hak tiap-tiap warga-negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanoesisan.
- d. Mempantoe tertjapainja keadilan sosial dan peri kemanoesisan dengan djalan perdamaian Internasional.
4. Jang boleh mendjadi anggota partai ialah orang Indonesia jang berumur 18 tahun keatas.
5. P i m p i a n partai terdiri dari pada :
 - a. Pengeroes Besar
 - b. Pengeroes Daerah
 - c. Pengeroes Tjabang
 Pimpinan diatas langsung memimpin pimpinan dibawahnja.
6. K e o e a n g, a n partai terdapat dari ioean anggotanja dan pendapat lain-lain.
7. Boeat pertama kali Ketoea dan Ketoea Moeda Pengeroes Daerah ditetapkan oleh Ir. Soekarno.

PENDAHOLEKAN.

Dimasa sekarang ini maka sangatlah perloe mengaakan satoe Badan jang dapat menajaminkan kepada rakjat jang menderita akibat peperangan pertolongan dan bantoean.

Pertolongan dan bantoean ini hendaknja setjara lahir dan bathin, maka itoe pada tanggal 20/8-2605 berdirilah dikota djaker soeatoe badan jang diberi nama:

"BADAN PENOLONG KELOEARGA KORBAN PERANG".

Dalam garis-garis besarnya akan ditetapkan Anggaran Dasar dan Choosesnja, akan tetapi jang penting haroes dipentingkan dan loe, maka itoe ada satoe bagian jang sekarang djoega soedah dapat dengan segera bekerdja jaitoe :

"BADAN KEAMANAN RAKJAT".

Nanti akan didjelaskan beberapa pasal-pasal patokan bekerdjanja.

Pasal 1.

Nama. Sebagai iboe organisasi jang haroes mengerdjakan dan memelihara keselamatan masjarakat, maka didirikan satoe badan jang diberi nama: "BADAN PENOLONG KELOEARGA KORBAN PERANG".

Pasal 2.

Maksud dan toedjoean.

Memelihara keselamatan masjarakat dan keamanan itoe adalah satoe, maka itoe di "Badan Penolong Keloearga Korban Perang" diadakan satoe bagian jang bernama : "BADAN KEAMANAN RAKJAT".

Pasal 3.

Pengeroes "Badan Keamanan Rakjat":

Kepala-Kepala "Badan Keamanan Rakjat" dari Poesat sampai ke Daerah-daerah mendjadi anggauta Pengeroes Harian dari "Badan Penolong Keloearga Korban Perang".

Pasal 4.

Dasar pembentoean.

Jang mengepalai "Badan Keamanan Rakjat" haroes mendjalankan pekerdjaannja dengan : s o e k a r e l a .

Pasal 5.

Panggilan.

Mereka jang maoe dan ingin membantoe pekerdjaan "Badan Keamanan Rakjat" akan dipanggil pada tanggal 24/8-2605.

Di Ken-ken panggilan ini akan diselenggarakan oleh "Badan Penolong Keloearga Korban Perang".

Pasal 6

- 3 -

Pasal 6.

Soesoenan Pimpinan.

1. Di Syuu pimpinan dipegang oleh Kepala Badan Keamanan Rakjat Syuu..
2. Di Ken atau Si pimpinan dipegang oleh Kepala Badan Keamanan Rakjat Ken atau Si.
3. Di Son pimpinan dipegang oleh Kepala Badan Keamanan Rakjat Son.
4. Di Ku pimpinan dipegang oleh Kepala Badan Keamanan Rakjat Ku.
5. Seteroesnja di Tonari Kumi pekerdjaan dilakoekan oleh 5 pemoeds jang tjakap.

Pasal 7.

Pengangkatan:

1. Kepala Badan Keamanan Rakjat di Poesat diangkat oleh Pengoeroes Besar Harian Badan Penolong Keloearga Korban Perang.
2. Kepala Badan Keamanan Rakjat di Syuu ditetapkan dan dishhkan oleh Ketoea Pengoeroes Besar Badan Penolong Keloearga Korban Perang atas oesoel Pengoeroes Harian Badan Penolong Keloearga Korban Perang di Syuu.

Pasal 8.

Toegas kewadajiban:

Badan Keamanan Rakjat haroes memelinara keamanaan bersama-sama dengan rakjat dan djawatan-djawatan negeri jang bersangkoetar

Pasal 9.

Badan Penolong Keloearga Korban Perang dan Badan Keamanan Rakjat ada dibawah pengawasan dan pimpinan Komite Nasional.

LAMPIRAN 3. Peraturan Presiden No. 6 Tahun 1946 Tentang Penyempurnaan
Susunan KNIP.

PERATURAN PRESIDEN² No. 6 TAHUN 1946.

2) Sebagai alat (penerjemah) yang dapat diantar golongan2 yang
berkepentingan berupa rumah meninggal golongan2 sedikitnya sa-
jumlahnya dua kali jumlah penambah tersebut dalam lembaran.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Page 16.

Menimbang bahwa perlu diadakan penjemputan susunan Komite Nasional Pusat yang sesuai dengan aturan politik, serta golongan besar dalam masyarakat Indonesia; penjurusan susunannya dengan pertimbangan jawab Pemerintah kepada Komite Nasional Pusat;

Mengingat Peraturan Peralihan Undang No. 12, th. 1946 putusan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat tanggal 24 bulan Oktober 1946;

Menetapkan Peraturan tentang penjemputan susunan Komite Nasional Pusat.

P. 2011012, 29 Desember 1946.

Dibebaskan untuk melakukan tugas sebagai anggota Komite Nasional Rakyat menurut susunan yang lama ialah anggota 2, yang mendjabat pangkat seperti dibawah ini:

sebagai berikut ini:

Presiden, Wk. Presiden Negara Republik Indonesia; Menteri Wk. Menteri, Direktur Jenderal dan Sekretaris dari satu Departemen; Sekretaris Negara; Ketua Wk. Ketua dan anggota Dewan Pertimbangan Agung Ketua dan Hakim Mahkamah Agung Ketua Pengadilan Tinggi; Jaksa Agung; Presiden dan Wk. Presiden Bang Negera Indonesia; Gubernur, Residen; Pradjudit Tentara dari pangkat kolonel keatas.

Р а з р 1 2.

- 1) Kepada partai politik besar (bag.a) serta golongan2 besar (bag.b) yang memang tertantum dalam daftar lampiran diberi hak untuk mengajukan tjalon2 guna diangkat sebagai anggota2 Komite Nasional Pusat.
- 2) Banjaknja tjalon, ialah sedikitnja dua kali djumlah hak perwakilan dalam Komite Nasional Pusat seperti yang tersebut dalam daftar lampiran.

P a g e 3.

- 1) Penambahan wakil untuk daerah2 diluar Djawa-Madura dilakukan sederaah demi sederaah.
- 2) Djumlah penambahan jang tersebut dalam ayat 1 diterangkan dalam lampiran Peraturan ini.

P a s a l 4.

- 1) Untuk menetapkan penambahan wakil2 dideerah luar Djawa-Badur, maka Gubernur (atau wakilnja) daerah yang bersangkutan bersama dengan badan2 perdjajaan politik jang ada dideerahnja atau untuk daerahnja berhak mengadakan tjalon2 untuk diangkat sebagai anggota Komite Nasional Pusat.
- 2) Djumlah tjalon2 itu, ialah sedikitesedikitnja dua kali djumlah wakil tambahan itu.
- 3) Dalam mengadakan tjalon2 Gubernur serta badan2 perdjajaan tersebut pada ajat 1 sedapatnja mengingat akan pembagian daerahnja d-lam karesidenan2.

Р а з а л 5.

- 1) Perwakilan golongan warga negara yang dibawah pemerintah kolonial

tidak

-2-

tidak termasuk dalam golongan Indonesia ditambah menurut daftar lampiran.
2) Gabungan2 (perkumpulan2) yang terdapat diantara golongan2 yang berkepentingan berhak untuk mengajukan tjalon2 sedikit2nja se-djumlah dua kali djumlah penambahan tersebut dalam lampiran.

P a s a l 6.

- 1) Daftar tjalon2 harus selambat2nja diterima oleh Sekretariat negara, tujuh hari sesudah pengumuman Peraturan ini dilakukan.
- 2) Pengangkatan anggota2 baru akan dilakukan dengan Maklumat Presiden.

P a s a l 7.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Jogjakarta, 29 Desember 1946.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

(SUKARNO).

Diumumkan pada tanggal 30 Desember 1946.

SEKRETARIS NEGARA

(A.G. KRANGGODIGDO).

PENDALASAN.

1. ORGANO :

Seolah menjadi kebiasaan dalam tiap-tiap negara dan bersempitan kedaulatan rakyat, bahwa pemerintahnya ber-paling muka kepada rakyat jika ia menghadapi soal yang penting dalam melakukan kewajibannya. Seolah lazim pula, bahwa jalan yang ditempuh untuk menghadapi rakyat itu ialah pertanggung-jawab yang ia lakukan kepada pewan-perwakilan rakyatnya.

Pada keadaan yang biasa hal ini bukanlah hal yang sepele dijalankan. Apa seandainya memanggil pewan per-wakilan rakyat untuk berunding dimana pemerintah dapat memberikan pertanggung-jawab, yang ia sepelehi itoe.

Demikianlah menurut kebiasaan biasa, jalannya soal dalam pemerintahan negara Republik kita. Bagaimanakah halnya dengan pewan perwakilan rakyat Republik Indonesia ? Masalah pertanggung-jawab antara Indonesia Belanda adalah pasti soal yang penting. Apa seandainya memanggil berkongres pewan perwakilan rakyat; dimana pemerintah dapat mengadakan pertanggung-jawabnya. Dimana kita selanjutnya dapat menentokan sikap; me-meriksa atau menolak masalah pertanggung-jawab Indonesia - Belanda itoe.

Akan tetapi tidak semudah itoe halnya bagi peme-rintah kita. Sepele saja jelas baiklah kita terangkan doe-doknya soal.

Pewan perwakilan rakyat yang kita maksudkan itoe hingga kini belum bisa dibentuk. Sebab seandainya pewan perwakilan rakyat yang seandainya hanya dapat ditjapai dengan pemilihan yang sempurna ialah pemilihan yang dasarnya; tiap-tiap warga negara berhak untuk memilih sendiri wakilnya dalam badan itoe. Dapatkah pemilihan sematjam ini kita lakukan? tentu tidak; di daerah-daerah pertanggung-jawab dan daerah yang didoe-doe oleh lawan pe-milihan sematjam itoe tentu tidak mungkin dilakukan.

Naka oleh karena itoe dalam peraturan peralihan Undang-undang dasar pasal IV yang diubah dengan Makluma wakil Presiden No. X tanggal 18 Oktober 1945 ditetapkan bahwa sebelum pewan perwakilan rakyat dapat dibentuk kewajiban pewan itoe dilakukan oleh sebuah Komite Nasional Pusat.

Bagaimanakah terdapatnya Komite Nasional Pusat sekarang itoe ? Seolah tentu dengan tidak memakai jalan pemilihan. Kalau dengan pemilihan tentu Komite Nasional Pusat tidak merupakan Komite Nasional Pusat lagi ma-lainkan menjadi badan perwakilan rakyat.

Memang seandainya Komite Nasional Pusat yang seka-rang ada ialah semata-mata hasil pengangkatan, oleh karena itoe dalam rapat pleno di Solo timbul kehendak rapat untuk membaharui seandainya Komite Nasional Pusat yang ada. Akan tetapi oleh rapat pleno tersebut dengan tegas dirasakan djoega bahwa pemilihan yang semat-jam ini langgenglah yang bisa mendapatkan seandainya perwa-kilan yang memajukan rasa kendil. Dirasakan pula bahwa tjara pembentukan demikian ini, belum dapat dilakukan oleh karena itoe rapat mentjari jalan lain untuk pem-bentukan Komite Nasional Pusat baru yang bisa mende-kati rasa kendil. Untuk mendapatkan jalan ini oleh rapat dibentuklah sebuah panitia.

Akan tetapi sebuah pekerjaan panitia ini tidak dite-rima oleh rapat, begitoe pula beberapa soal lain yang dimajukan sidang. Di antaranya dimajukan soal yang baroe-baroe ini dikemukakan pula dalam surat kabar sepele bagian pokok Komite Nasional Pusat (pasal 1 sub a) disesoon atas pemilihan Komite Nasional Daerah. (Kedaulatan Rakyat tanggal

-2-

tanggal 12 bulan 12 tentang "memperbaharui Komite Nasional Pusat"). Hanya beberapa anggota yang menjatuhkan pasal sematjam ini dari sidang yang dihadiri oleh koarang lebih 200 orang.

Hal ini memang sudah dimengerti. Sebab, bukannya Komite Nasional Daerah sendiri sesenannya juga juga belom selesai dengan perwakilan yang sesanggahnya ?

Dalam pada itoe karena djoemlah secara yang hadir pada waktu mengambil keputusan tentang soal ini koarang dari setengah djoemlah anggota Komite Nasional Pusat maka dalam rapat pleno di Solo ketoes terpaksa menjerahkan hanya "kesan rapat kepada padoesa presiden". Hal ini disebabkan oleh karena sebagian besar dari anggota telah meninggalkan rapat.

Maka atas "desakan" rapat pleno di Solo itoe oleh pemerintah telah ditetapkan peraturan pemerintah No.2 yang kemudian secepat selesai dengan sesesunan pemerintah serta sesesuna politik ditjabot kembali dan diganti dengan undang-undang No.12.

Seperti biasa mengetahui hingga kini tentang beberapa pasal dalam undang-undang No.12 belom ada ketetapan berhubung dengan rentjana perubahan yang diadjoekan oleh Badan Pekerja.

Dalam pada itoe banyak orang yang bertanya apakah ada Komite Nasional Pusat yang lama itoe sesudah rapat pleno di Solo? Bahkan ada yang mengatakan dengan tegas bahwa Komite Nasional Pusat lama sudah bohar; Secepat dja-
atoeran peralihan
di undang-undang No.12, "Komite Nasional Pusat yang lama bohar pada saat pelantikan Komite Nasional Pusat baru, yang disesun mencoret undang-undang ini". Hingga kini Komite Nasional Pusat baru yang disesun mencoret undang-undang No.12 belom dilantik bahkan belom dibentuk. Jadi Komite Nasional Pusat lama belom bohar.

Menyesunan Komite Nasional Pusat baru belom dapat dilakoeskan tidak hanya oleh karena belom ada kepastian tentang beberapa pasal dalam undang-undang No.12, melainkan juga usaha pemilihan, sekalipun pemilihan yang tidak sempurna mencoret undang-undang No.12 akan makan banyak waktu. Menenggoe pembentukan Komite Nasional Pusat baru mencoret undang-undang No.12 itoe adalah satoe soal yang tidak dapat kita tanggoeng-djawabkan mencoret keadaan politik baik didalam macepoean diluar negeri.

Dalam pada itoe masih ada pula satoe alasan lain bagi kita centok mengadakan sidang pleno Komite Nasional Pusat yang lama jaitoe patoesan yang diambil oleh Badan Pekerja dalam sidangnya pada tanggal 24 Oktober 1946. Benji patoesan itoe ialah seperti berikut: "Rapat pleno Komite Nasional Pusat yang sekarang diadakan 10 hari sebelum pelantikan Komite Nasional Pusat yang baru tetapi selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 1947.

Bjika Komite Nasional Pusat yang sekarang tidak diadakan bergandengan dengan yang baru maka anggota yang sekarang akan ditambah dengan wakil-wakil dari golongan-golongan yang belom atau koarang mampoenjai wakil dalam Komite Nasional Pusat yang sekarang, terotama dari partai rakjat djelata".

Dengan kedoes alasan itoe maka pemerintah dalam bagian kedoes bulan depan akan memanggil Komite Nasional Pusat yang lama itoe centok bersidang.

Bahwa desakan Badan Pekerja centok mengadakan sidang pada permulaan bulan Djanoari itoe tidak dapat dipenehi ialah oleh karena pemerintah merasa berkewajiban dengan penambahan yang disesulkan oleh Badan Pekerja juga menambahkan anggota-anggota yang lang-
saeng

-3-

seorang datang dari daerah-daerah luar Jawa yang hingga kini belum ada dalam Komite Nasional Pusat sekarang. Centok mendatangkan mereka itoe tante memakan waktu berhoebong dengan sekarnya perhoebongan. Demikianlah maka keputusan pemerintah, mengadakan rapat Komite Nasional Pusat lama dengan ditambah wakil dari golongan-golongan besar yang belum atau kurang mempunyai wakil dalam Komite Nasional Pusat yang sekarang terdapat dari partai rakyat, jelata serta wakil-wakil daerah luar Jawa yang sedapat mungkin langsung datang dari daerah-daerah itoe sendiri.

II. PEMERINTAHAN SEPASAL RUMAH KUNING

Pasal 1:

Hingga kini maka dalam Komite Nasional Pusat doedok djaga sebagai anggota orang-orang yang berhoebong dengan jabatannya haroes bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat seperti Menteri dan wakil Menteri; demikian pula orang-orang yang walaupun tidak langsung bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat akan tetapi oleh karena kedodoekannya dalam pemerintahan teroret serta menetapkan tindakan-tindakan centok mengedokan negara. Ketetapan ini sudah pula dirasakan, bahwa orang yang sesoenggoehnya teroret bertanggung jawab meminta pertanggung jawaban. Maka oleh karena itoe dalam Undang-undang No. 13 (asal 14) itoe ditetapkan bahwa pejabat-pejabat tersebut tidak boleh menjadi anggota Komite Nasional Pusat. Meskipun pasal ini tidak mengenai Komite Nasional Pusat yang lama akan tetapi berhoebong dengan pentingnya kita rasa tidak pada tempatnya jika kekeliruan yang sekarang sudah diakui itoe kita biarkan saja. Maka oleh karena itoe pemerintah telah mengambil keputusan centok membebaskan anggota-anggota tersebut dari kewajibannya sebagai anggota Komite Nasional Pusat. Hal ini berarti bahwa jika mereka hadir dalam sidang Komite Nasional Pusat nanti adalah semata-mata centok memberi pertanggung jawaban atau sebagai penasihat dari mereka yang haroes melakukan pertanggung jawaban itoe.

Pasal 2(1):

Kita semuanya mengetahui bahwa semendjak pengesahan Badan Pekerja, yang mengundjoerkan pembentokan partai-partai pada tanggal 30 Oktober tahun 1945, di Indonesia timbul berpeleoh-peleoh gabongan baik yang berdasarkan politik, ekonomis, maupun sosial. Penggabungan tidak mengorangi kebelaannya kemerdekaan berserikat itoe, kita sekarang mendapat kesukaran centok menetapkan besarnya tiap-tiap organisasi, yang kita perlukan centok menetapkan pembagian yang adil besat perwakilannya dalam Komite Nasional Pusat. Memang sesoenggoehnya pemilihan langsung dan oemalah yang akan bisa memberi perimbangan perwakilan yang memenuhi perasaan keadilan.

Dalam pada itoe tidak djacah dari kenyataan jika kita katakan bahwa pada hakikatnya politik tiap-tiap negara ditetapkan oleh partai-partai politik besar serta golongan-golongan lainnya yang besar pula. Penggabungan ini bisalah kita katakan bahwa dengan tidak mengorangi pentingnya partai-partai politik ketjil maupun golongan-golongan ketjil lainnya, kita mendekati pada kenyataan, jika kita tetapkan bahwa yang berhak centok menambah perwakilannya dalam Komite Nasional Pusat adalah partai dan golongan yang besar saja.

Pasal 2(2):

Seseorang dengan adanya anggota-anggota yang sekarang ternyata menggabungkan diri pada seseorang partai dan atas



-4-

atas dasar itoe dihitung mewakili partai yang kemedian ia menjadi anggotanya, maka centok memenahi rasa keadilan pada partai-partai dan golongan itoe tidak langsung menetapkan wakilnya. Melainkan melalui pengangkatan anggota itoe terhitung mewakili partai yang mengadopsikan dia sebagai tjalon.

Pasal 3 (1):

Dalam menambah banyaknya anggota-anggota dari daerah luar Jawa kita memakai pedoman perimbangan yang telah terdapat dalam Undang-Undang No. 12 (lampiran) dalam pada itoe perimbangan ini tidak pula kita pakai setepat-tepatnya berhubung dengan besarnya jumlah anggota yang telah ada. Lain dari itoe dalam jumlah yang sekarang sudah termasuk juga orang-orang yang dapat dipandang sebagai wakil daerah-daerah di luar Jawa. Jika dalam sidang yang akan datang hadir juga orang-orang yang langsung datang dari daerah-daerah yang beranggakan, tentu akan memberatkan perimbangan-pertimbangan yang ditetapkan sidang.

Pasal 3 (2):

Sudah jelas.

Pasal 4 (1):

Pemilihan di daerah luar Jawa sematera tentu ta' dapat kita harapkan oleh karena itoe kita terpaksa menempuh jalan lain. Komite Nasional di daerah itoe, mungkin bisa memberi pedoman akan tetapi kenyataan di Jawa yang sudah ditolak itoe ta' akan juga berbeda dari kenyataan di daerah luar Jawa. Dalam keadaan ini maka kita sesuai dengan terasasannya anggota-anggota Komite Nasional pusat yang sekarang, kita memperhatikan secara badan-badan yang telah tumbuh dalam masyarakat centok mempertahankan kedaulatan Negara kita. Lihat pendirian kita pada pasal 2 ayat 1, oleh karena itoe kita katakan badan perundangan politik.

Pasal 4 (2) : idem keterangan pasal 2 ayat 2.

Pasal 4 (3):

Dalam pada itoe perlu ditagaskan, bahwa centok memadamkan kedewasaan anggota-anggota dalam masyarakat di Jawa sekarang, yang diperhatikan sejarahnya oleh Goebner tidak hanya badan perundangan politik yang meliputi seluruh daerahnya melainkan juga bersifat lokal. Lebih-lebih oleh karena daerah pemerintahan Goebner itoe sangat luasnya yang menimbulkan kemungkinan perbedaan kepentingan antara badan-badan perundangan.

Pasal 6 :

Memang benar bahwa Negara Republik hanya mengenal satu matjam warga negara dan tidak seperti dalam zaman kolonial kita mengenal tiga matjam golongan. Akan tetapi tidak bisa kita abaikan bahwa bekas-bekas perbedaan itoe, tidak dapat dengan sekali goas dihapuskan. Berdasarkan kenyataan itoe juga Undang-Undang No. 12 telah menetapkan perwakilan golongan warga negara tersebut (pasal 13).

-----0000-----



Lampiran:

pada pasal 2: Partai-partai politik dan golongan-golongan besar yang dimaksudkan dalam pasal 2 Peraturan ini serta djoemlah tambahan perwakilannya dalam Komite Nasional Pusat sekarang ialah seperti berikoet:

<u>bag. a</u>	<u>Partai-partai</u> <u>Wakilnya</u> <u>sekarang</u>	<u>djoemlah wakil</u> <u>tambahan</u>
Masjoemi	35	25
P. B. I.	6	29
Parkindo	4	4
P.K.R.I.	2	2
P. K. I.	2	33
	1	1
<u>bag. b :</u>	<u>Golongan</u>	<u>djoemlah anggota</u> <u>tambahan</u>
B o e r o e h		40
W a n i		40

pada pasal 4: Penambahan wakil oentoe daerah-daerah diloear Djawa Madoera seperti yang dimaksudkan dalam pasal 4 ialah seperti berikoet:

<u>Daerah</u>	<u>Wakilnya</u> <u>sekarang</u>	<u>djoemlah wakil</u> <u>tambahan</u>
Soematera	1	30
Kalimantan	4	8
Soelawesi	5	10
Maloeke	2	5
Boenda Ketjil	2	5

pada pasal 5: Penambahan wakil golongan warga negara boekan Indonesia seperti yang dimaksudkan dalam pasal 5 ialah seperti berikoet:

<u>Golongan</u>	<u>Wakilnya</u> <u>sekarang</u>	<u>djoemlah wakil</u> <u>tambahan</u>
T i o n g h o a :	5	2
A r a b	2	1
B e l a n d a	1	2
	1	1

-----e0e-----

menjadi:
Berhoebeeng dengan tambahan tersebut diatas maka perimbangan perwakilan partai-partai itoe ialah seperti berikoet:

Masjoemi	60 orang
P.N.I.	45 "
Partai Sosialis	35 "
P.B.I.	35 "
P.K.I.	35 "
Parkindo	8 "
P.K.R.I.	4 "

Pendjelasan lampiran

pada lampiran pasal 2 (bag. a):

Seperti diterangkan dalam pendjelasan pada pasal 2 sendiri maka jang dapat hak oentook menembah perwakilanja dalam Komite Nasional Poesat ialah kita batesi pada partai-partai politik besar serta golongan besar jang terdapat dalam mesjareket Indonesia.

Pembatasan ini heroes kita lakoean oentook mantjegah penerahan jang tidak ada hingganya.

Dalam pembatasan pada partai politik kita berpegangen tegeoh akan perserikatan-perserikatan jang membenjai program politik. Dalam pada itoe kita yakin bahwa tidak ada setoe organisasi-poean dalam masa perdojoengan ini jang tidak bertoeadojoen mempertahankan kedaulatan negara Repoebliek Indonesia. Akan tetapi adanja toeadojoen ini pada tiap-tiap organisasi itoe tidak dapat kita pakai sebagai oekoeran bahwa tiap-tiap organisasi itoe adalah partai politik.

Dengan pembatasan hanja pada partai politik sadja barangka-li akan segera timboel pertentjean bahkan perasaan jang koerang adil jaitoe pertentjean tentang hak panambahan perwakilan bagi pemoea. Boekankih pemoea jang mendjadi perintis revoloesi kita? Apakah oempembanja Pemoea Sosialis Indonesia (Pesindo) tidak meroepakan sesoeatoe organisasi jang besar? Organisasi jang merata diseloeeroeh Djawa jang baroesaha dalam segala lapangan pertentjean Negara Repoebliek Indonesia? Memang segala sesoeatoe itoe meroepakan kenjataan. Akan tetapi sampai keneakah batesanja pemoea? Dan berapa banjakkah djoemleh pergerakan pemoea? G.P.I.I., Pemoea Barisan Tani, O.P.I., Serekat Maha Siswa, Ikatan Pemoea Kalimantan, Pemoea Pembangoen Negara, Pemoea Keristen Indonesia, Pemoea Katholik dsb. Medan pertempoeran penoeah dengan pemoea jang berdojoeng dibawah panaji-panaji jang berneka-warna matjammja. Pemoea Pradjoerit Tentara Repoebliek Indonesia, Pradjoerit Lasjker, Pradjoerit Barisan; mereka semua mempertahankan daerah keamanan Negara Repoebliek.

Disamping itoe pemoea poetri djoega masih ada; organisasi wanita djoega tidak koerang, badan ekonomi, jang bersifat degang koperasi; badan sosial dari perawatan orang terlantar hingga perkoempoean sendiwara. Memang semua badan itoe berdojoen tiap-tiap pada lepangannya sendiri, dalam mempertahankan kedaulatan negaranya.

Maka dengan tidak mengoerangi djasa pemoea wanita, organisasi, ekonomi sosial dalam revoloesi kita ini kita terpaksa mengadakan pembatasan oentook mantjegah panambahan jang tidak ada hingganya. Dalam pada itoe kita yakin bahwa banjak djoemleh-nja pemoea dan wanita jang mendjadi enggaute partai-partai politik. Maka dengan djalan perwakilan partai politik ini mereka sampai djoega atau dapat sampai djoega dalam Komite Nasional Poesat.

Tidak djoeh dari kenjataan ageknja djika kita ketakan bahwa ada 7 matjem partai politik jang besar, jaitoe Masjoemi, P.N.I., Partai Sosialis, P.B.I., P.K.I., Parkindo dan P.K.R.I.

Maka bagaimanakah kita menentoekan perbandingan besarnya perwakilan dalam Komite Nasional Poesat itoe? Goena menetapkan ini marilah kita terengken bagaimanakah imbengan perwakilanja sekerang dalam Komite Nasional Poesat jang lama. Perimbangan itoe ialah seperti barikoet:

Masjoemi	36	orang wakil
P.N.I.	45	" "
Partai Sosialis	36	" "
P.B.I.	6	" "
P.K.I.	2	" "
Parkindo	4	" "
P.K.R.I.	2	" "

Tidak ada seorangpoean jang tidak memandang tempeng bahwa perwakilan Masjoemi lebih sedikit djoemlehnya dari perwakilan P.N.I. dan sama dengan partai Sosialis; bahwa perwakilan P.K.I. dan P.B.I. djoeh lebih rendah deripada Partai Sosialis. Maka atas dasar keterangan dari pihak jang bersangkoean dapatlah kita tetapkan, djika dari toeadojoen partai politik itoe Masjoemi-lah



lah yang patoet terbesar perwakilannya. Sedang P.B.I. dan P.K.I kita imbangkan dengan perwakilan partai Sosialis.

Perkiraan adalah lebih besar dari P.K.R.I. tetapi kedua-duanya adalah lebih "ketjil" dari P.K.I.

Bemikianlah maka atas dasar perkiraan ini kita tetapkan penambahan-penambahan seperti yang tersebut dalam lampiran. Kita yakin bahwa kesesuaiannya tidak akan tepat dengan perhitungan yang teliti. Memang sesesuaiannya hanya pemilihan langsung dan semacam yang akan dapat memberi imbang perwakilan yang memuaskan rasa keadilan.

(bagian b):

Disamping partai politik ini terdapatlah dua golongan besar yang terdapat dalam masyarakat kita, yaitu golongan tani dan buruh. Kita takut djoega bahwa ada golongan-golongan lain seperti pedagang-pedagang besar, pedagang-pedagang ketjil; golongan kerajinan di rumah dan perusahaan kerajinan; kaum tengkulak; gabungan wartawan; gabungan tabib; golongan pamong praja lapisan atas (bupati dsb.); pamong praja lapisan bawah (loerah); gabungan penangkap ikan (sarekat belah); gabungan anggota tentara seperti perkoempoelan opsir; golongan kaum tani dengan segala matjam taniannya dsb. dalam masyarakat kita akan tetapi sesesuai dengan pendirian kita pada penempatan "hanja partai-partai politik" begitoe puolalah pendirian kita pada penetapan golongan-golongan mana yang akan dapat penambahan perwakilannya. Dalam perkiraan djoemlah penambahan itoe kita sedikit banjaknja berpedoman djoega kepada perwakilan partai-partai. Sekali lagi sangat boleh jadi bahwa ada pihak yang merasa bahwa perimbangan itoe koerang tepat adanya. Sekali lagi puol kita tegaskan. Hanya pemilihanlah yang bisa memberi imbang yang memuaskan perasaan keadilan.

Pada lampiran pasal 5 :

Mencerret lampiran Undang-undang No.12, anggota-anggota yang dipilih didaerah-daerah (pasal 1 sub a) ialah seperti berikut:

Djawa	70
Sumatera	18
Kalimantan	5
Sulawesi	9
Malakka	4
Sunda Ketjil	4

Seperti kita ketahuai perimbangan ini dalam sesesuai Komite Nasional Pusat mencerret Undang-undang No.12 djoega beres. Sebab adanya anggota-anggota yang mewakili partai-partai (pasal 1 sub b) dan anggota-anggota yang ditunjuk oleh Presiden (pasal 1 sub a), yang bisa datang dari Djawa atau dari daerah luar Djawa dengan mendirikan memberi perimbangan lain jika ditinjau dari sudut "tempat tinggal" anggota-anggota itoe nanti.

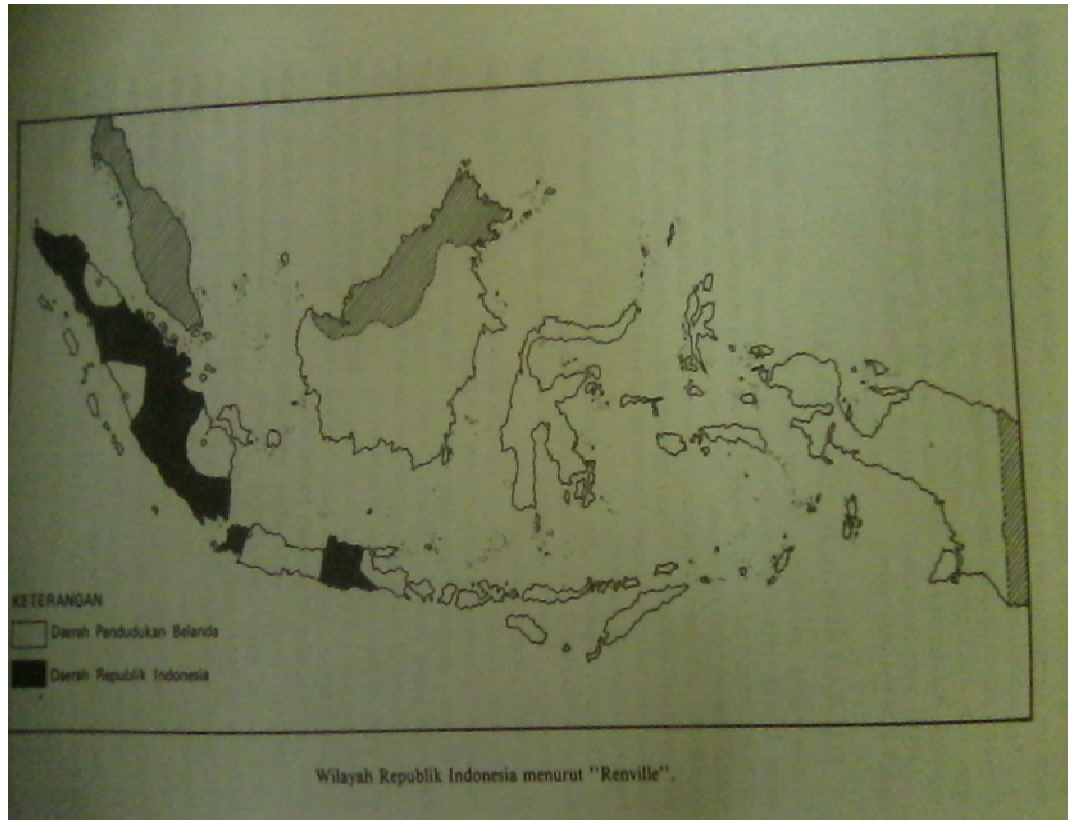
Begitoe puol selain dari pada djoemlah tambahan yang termasuk resmi datang dari daerah luar Djawa, djoega tambahan wakil partai-partai dan golongan-golongan bisa djoega langsung datang dari daerah luar Djawa.

Pada lampiran pasal 5 :

Dalam menetapkan imbang penambahan perwakilan tiga golongan warga negara itoe kita berpedoman pada djoemlah orang masing-masing golongan tersebut. Meskipun tidak dengan teliti akan tetapi kita yakin puol bahwa perimbangan ini dapat memuaskan rasa keadilan, baik bagi golongan warga negara Indonesia maupun bagi golongan warga negara bukan Indonesia. Satoe dan lain berhubung dengan adanya hanya satoe matjam warga negara mencerret hukum negara Republik Indonesia.



LAMPIRAN 4. Peta Wilayah Republik Indonesia berdasarkan Persetujuan Renville



(Sumber: A.H. Nasution. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 7 Periode Renville*. Bandung: Disjarah-AD dan Penerbit Angkasa, 1978, hlm. 454.)

Lampiran 5. Undang-Undang Tentang Mengadakan Peraturan-Peraturan Istimewa Sidang ke-VI Komite Nasional Pusat

UNDANG-UNDANG No. 9 TAHUN 1949
TENTANG
MENGADAKAN PERATURAN-PERATURAN ISTIMEWA UNTUK SIDANG KE VI KOMITE NASIONAL
PUSAT.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa Komite Nasional Pusat perlu segera bersidang untuk mengambil keputusan tentang persetujuan Konperensi Medja Bundar;
2. bahwa Sidang pleno Komite Nasional Pusat yang ke-VI harus berlangsung pada tanggal yang telah ditentukan dan dapat diambil keputusan yang sah pada tanggal yang telah ditentukan;
3. bahwa Sidang tersebut tidak dapat diundurkan lagi;
4. bahwa alamat-alamat, kodalan anggota-anggota Komite Nasional Pusat tidak dapat diketahui selengkapnja, sebagai akibat agresi Belanda yang kedua;
5. bahwa oleh karenanja sukar menjumpai berita undangan;
6. bahwa alat-alat perhubungan dari tempat mereka sampai ke Jogjakarta sukar, sehingga mereka tidak dapat dipastikan kedatangannya pada waktu yang telah ditetapkan;
7. bahwa perlu diadakan peraturan supaya Sidang Komite Nasional Pusat tersebut dalam punt 1 dapat berlangsung dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah walaupun quorum biasa menurut pasal 37 Undang-undang Dasar pada tanggal yang dimaksudkan dalam punt 1 tidak tertjapai;

- Mengingat : 1. Pasal 37 Undang-undang Dasar;
2. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 21 ayat 1 dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar serta Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 1945 No.X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG MENGADAKAN PERATURAN-PERATURAN ISTIMEWA SIDANG KE-VI
KOMITE NASIONAL PUSAT.

Satu-satunya pasal.

Rapat-rapat Sidang Komite Nasional Pusat pleno ke-VI yang diadakan untuk mengambil keputusan-keputusan tentang Persetujuan Konperensi Medja Bundar, yang akibatnya dalam hakikatnya mengubah Undang-undang Dasar Republik Indonesia, jika dihadiri oleh lebih dari separoh dari jumlah anggota seluruhnya ditambah 1 (satu), dan segala keputusan-keputusan dalam rapat-rapat itu diambil dengan suara terbanyak mutlak.

Pasal terakhir.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 5 Desember 1949.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. SOEKARNO

Diumumkan
pada tanggal 5 Desember 1949.

SEKRETARIS NEGARA,

ttd. A.G. PRINGGODIGDO

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd. SOESANTO TIRTOPRODJO

Lampiran 6. Pemberitahuan Presiden kepada Ketua BPKNIP

Jogjakarta, 17 Desember 1949.

Kepada

P.T. Ketua Badan Pekerja K.N.P.

di

J o g j a k a r t a .

M e r d e k a !

Diberitahukan dengan hormat, bahwa:

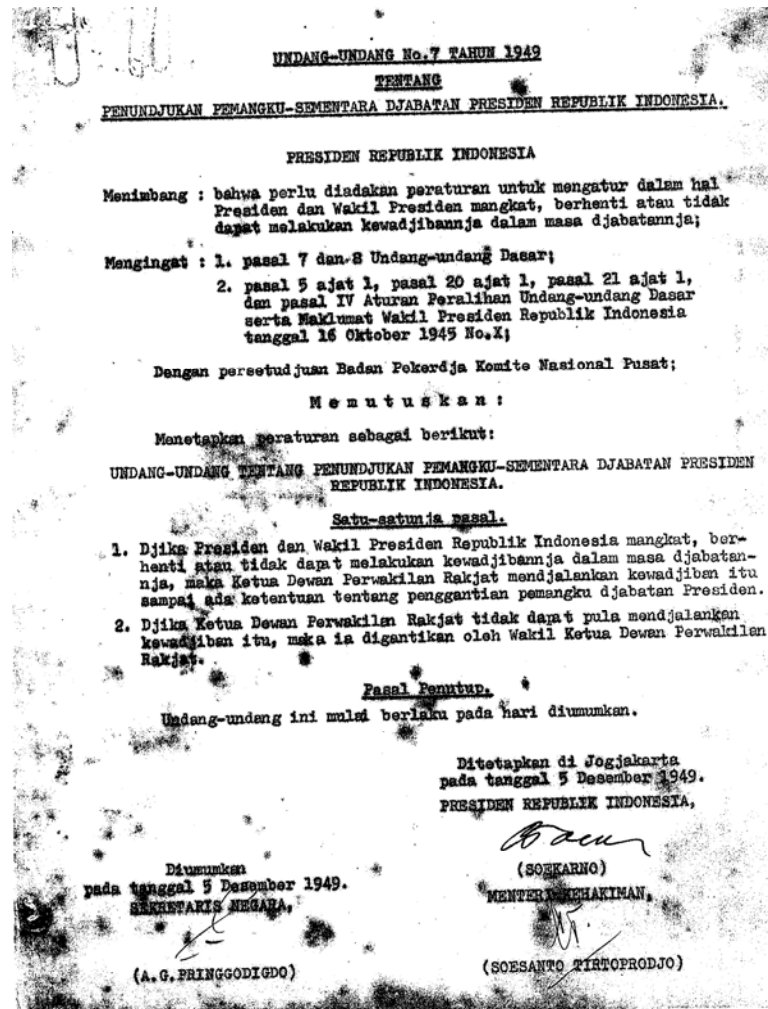
- a. rapat tanggal 16 Desember 1949 di Gedung Kepatihan Jogjakarta dari Kuasa-kuasa dari Pemerintah Republik Indonesia dan Daerah-daerah Bagian termaktub dalam pasal 2 dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat telah memilih kami sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat,
- b. kami menerima pemilihan itu.

Presiden

Republik Indonesia,

(Soekarno)

LAMPIRAN 7. Undang-Undang No. 7 Tahun 1949 tentang Penunjukan Pemangku Sementara Jabatan Presiden Republik Indonesia



Lampiran 8. Keputusan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat

SEKRETARIAT BADAN PEKERDJA
KOMITE NASIONAL PUSAT:
JOGJAKARTA

Jogyakarta, 5 Desember 1949.

No. 991.

Lampiran: 3.-

Perihal: Usul inisiatif rantjangan
Undang-undang.

Kepada

P.J.M. Presiden Republik
Indonesia
di

JOGJAKARTAZ

M e r d e k a !

Kami, Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat, dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat dalam rapatnja pada tg. 3-12-1949 telah menjetudjui usul2 inisiatif rantjangan Undang2 dari Sdr2. Sartono cs., Z. Baharuddin cs., dan Luat Sifegar cs (kemudian dioper oleh Sdr. Sartono cs.) tentang:

1. Penundjukan Pemangku-sementara Djabatan Presiden Republik Indonesia,
2. Perubahan Undang2 No. 9 th. 1948,
3. Mengadakan Peraturan2 istimewa untuk sidang ke-VI Komite Nasional Pusat,

untuk dipertimbangkan oleh Pemerintah.

Keputusan2 jang bersangkutan (Keputusan No. 28/U, 29/U, dan 30/U) dilampirkan pada surat ini.

Perlu kiranja kami kemukakan, bahwa tekst rantjangan Undang2 tsb. diatas tidak sama dengan tekst jang kami sampaikan kepada Pemerintah beberapa hari jang lalu.-

BADAN PEKERDJA
KOMITE NASIONAL PUSAT:



Ketua,

(Assaät)

Tembusan dengan lampiran
disampaikan kepada:

1. P.J.M. Wakil Presiden/Perdana Menteri,
2. J.M. Menteri Kehakiman,

LAMPIRAN 9. Foto pelantikan Mr. Assaat sebagai Pemangku Jabatan Presiden Republik Indonesia



(Sumber: Ginandjar Kartasasmita, dkk. *30 Tahun Indonesia Merdeka (1945-1955)*. Jakarta: Sekretariat Negara, 1995)

LAMPIRAN 10. Foto pelantikan Dr. Halim sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia



(Sumber: aswilnazir.com)

LAMPIRAN 11. Foto Menteri-Menteri dalam Kabinet Natsir



(Sumber: A. Dahana, dkk. (2012). *Indonesia dalam Arus Sejarah 7*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve)